



**PENGADILAN NEGERI DUMAI
KELAS IA**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Dumai, 12 Februari 2026

Pereviu 1,

DICKI IRVANDI, S.H., M.H.

Pereviu 2,

HOTMA REZEKI SINAGA, S.E.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud dari upaya transparansi dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA selama tahun 2025 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah serta penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan satuan kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 merupakan implementasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka penerapan area akuntabilitas Reformasi Birokrasi sebagai perwujudan tanggung jawab atas pencapaian sasaran kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 menyajikan informasi capaian kinerja (*performance result*) berdasarkan rencana kinerja (*performance plan*) yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029 dan menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja sekaligus kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025. Kami menyadari bahwa laporan ini memiliki kekurangan dan oleh sebab itu diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini kami sajikan, semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terhadap tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Dumai, 12 Februari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



MAULIA MARTWENTY INE

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja untuk mencapai target yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja guna mewujudkan sasaran strategis, tujuan, misi, visi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kinerja sesuai Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029 sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang ditargetkan pada tahun 2025 untuk 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama guna mendukung 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	99,03%	101,05%
	1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	99,96%	100,97%
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	80%	80,33%	100,41%
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	75%	76,74%	102,33%
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	93%	96,05%	103,28%
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	28%	28,57%	102,04%
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2,6%	2,68%	103,02%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18%	18,92%	105,11%
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	N/A	N/A
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	94%	94,89%	100,95%
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	96%	97,42%	101,48%
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101,01%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-1			101,97%
	2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9	3,91
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-2			100,38%	
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79	80,5	101,9%
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327)	87	87,75	100,87%
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328)	87	87,48	100,56%
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	97	100	103,09%
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	85	85	100%
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,25	101,56%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-3			101,33%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS				101,23%

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung dengan komitmen yang tinggi dari seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dan optimalisasi pengelolaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.01.400327) berasal dari bagian anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sesuai surat pengesahan petikan DIPA nomor SP DIPA-005.01.2.400327/2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp.7.682.895.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan mengalami revisi sebanyak 11 (sebelas) kali sehingga total pagu akhir mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 8.292.260.000,- (delapan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). DIPA ini mempunyai 1 (satu) program, yaitu Program Dukungan Manajemen (WA) yang terdiri dari :

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT/KOMPONEN			ANGGARAN	REALISASI	%
WA	Program Dukungan Manajemen		8.292.260.000	8.048.468.662	97,06
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		1.001.543.000	890.773.996	88,94
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		1.001.543.000	890.773.996	88,94
951	Layanan Sarana Internal		654.789.000	544.353.996	83,13
051	Pengadaan Kendaraan Bermotor		399.289.000	335.000.000	83,90
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		255.500.000	209.353.996	81,94
971	Layanan Prasarana Internal		346.754.000	346.420.000	99,90
051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan		346.754.000	346.420.000	99,90
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama		7.290.717.000	7.157.694.666	98,18
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		7.290.417.000	7.157.394.666	98,18
962	Layanan Umum		700.000	700.000	100
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan		700.000	700.000	100
994	Layanan Perkantoran		7.289.717.000	7.156.694.666	98,18
001	Gaji dan Tunjangan		5.530.174.000	5.440.777.681	98,38
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.759.543.000	1.715.916.985	97,52
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		300.000	300.000	100
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		300.000	300.000	100
052	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		300.000	300.000	100

2. DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.03.400328) berasal dari bagian anggaran Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung sesuai surat pengesahan petikan DIPA nomor SP DIPA-005.03.2.400328/2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp. 211.915.000,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dan mengalami revisi sebanyak 8 (delapan) kali sehingga total pagu akhir mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 158.025.000,- (seratus lima puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah). DIPA ini mempunyai 1 (satu) program, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (BF) yang terdiri dari :

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT/KOMPONEN			ANGGARAN	REALISASI	%
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		158.025.000	157.904.645	99,92
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		158.025.000	157.904.645	99,92
	AEA	Koordinasi	750.000	750.000	100
	001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	750.000	750.000	100
	052	Dukungan Penyelesaian Perkara	750.000	750.000	100
	BCA	Perkara Hukum Perseorangan	121.275.000	121.154.645	99,90
	U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	121.275.000	121.154.645	99,90
	051	Pendaftaran Berkas Perkara	90.335.000	90.318.645	99,98
	052	Penetapan Hari Sidang	660.000	660.000	100
	053	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	300.000	300.000	100
	054	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	15.120.000	15.120.000	100
	055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa	30.000	0	0
	056	Minutasi/Upaya Hukum	11.730.000	11.730.000	100
	057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	220.000	146.000	66,36
	058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	2.880.000	2.880.000	100
	QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	36.000.000	36.000.000	100
	032	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	36.000.000	36.000.000	100
	051	Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100

DAFTAR ISI

PERNYATAAN REVIU LAPORAN KINERJA i

KATA PENGANTAR..... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI.....vii

DAFTAR TABELviii

DAFTAR GAMBAR..... xi

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

 1. LATAR BELAKANG 1

 2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI..... 2

 3. STRUKTUR ORGANISASI..... 4

 4. ISU STRATEGIS 6

 5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN 9

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 11

 1. RENCANA STRATEGIS 11

 A. VISI 12

 B. MISI..... 12

 C. TUJUAN..... 13

 D. SASARAN STRATEGIS..... 13

 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN..... 1

 3. PERJANJIAN KINERJA 2

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA..... 5

 1. CAPAIAN KINERJA 5

 A. PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TARGET KINERJA..... 5

 B. PERBANDINGAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA..... 7

 C. PERBANDINGAN KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH 12

 D. PERBANDINGAN KINERJA SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI RIAU . 14

 E. PERBANDINGAN KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL..... 21

 F. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 23

 G. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA 66

 1. EFISIENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA 66

 2. EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP KINERJA..... 70

 H. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KINERJA 75

 2. REALISASI ANGGARAN 84

BAB IV. PENUTUP 91

 1. KESIMPULAN 91

 2. SARAN 91

LAMPIRAN :

 1. PERNYATAAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

 2. FORMULIR CHECK LIST LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

 3. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

 4. SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

 5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

 6. RENCANA STRATEGIS

 7. RENCANA KINERJA TAHUNAN

 8. PERJANJIAN KINERJA

DAFTAR TABEL

Tabel I-1.	Matrik isu strategis, permasalahan, dan upaya/strategi penyelesaian	8
Tabel II-1.	Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029	1
Tabel II-2.	Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025.....	1
Tabel II-3.	Realisasi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 s.d. September 2025	3
Tabel II-4.	Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025.....	4
Tabel III-1.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025	7
Tabel III-2.	Perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun sebelumnya.....	11
Tabel III-3.	Capaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun sebelumnya	12
Tabel III-4.	Rincian perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terhadap target jangka menengah	13
Tabel III-5.	Rekapitulasi perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terhadap target jangka menengah	13
Tabel III-6.	Rincian perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terhadap satuan kerja sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau	20
Tabel III-7.	Rekapitulasi perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terhadap satuan kerja sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau.....	21
Tabel III-8.	Rincian perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terhadap target nasional	22
Tabel III-9.	Capaian kinerja sasaran strategis 1 : “Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel”	24
Tabel III-10.	Rincian realisasi penyelesaian perkara secara tepat waktu	25
Tabel III-11.	Rekapitulasi realisasi penyelesaian perkara secara tepat waktu	25
Tabel III-12.	Rincian realisasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA kepada para pihak	26
Tabel III-13.	Rekapitulasi realisasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA kepada para pihak	27
Tabel III-14.	Rincian realisasi pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA kepada para pihak.....	28
Tabel III-15.	Rekapitulasi realisasi pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA kepada para pihak.....	29
Tabel III-16.	Rincian realisasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali tepat waktu kepada para pihak	30
Tabel III-17.	Rekapitulasi realisasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali tepat waktu kepada para pihak	31
Tabel III-18.	Rincian realisasi putusan yang diunggah pada direktori putusan.....	32
Tabel III-19.	Rekapitulasi realisasi putusan yang diunggah pada direktori putusan	33
Tabel III-20.	Rincian realisasi penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	35
Tabel III-21.	Rekapitulasi realisasi penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	35
Tabel III-22.	Rincian realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.....	36
Tabel III-23.	Rekapitulasi realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	37
Tabel III-24.	Rincian realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	38
Tabel III-25.	Rekapitulasi realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.....	38
Tabel III-26.	Rincian realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi.....	40
Tabel III-27.	Rekapitulasi realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi	40
Tabel III-28.	Rincian realisasi perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan E-Court	41
Tabel III-29.	Rekapitulasi realisasi perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan E-Court	42

Tabel III-30. Rincian realisasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)	43
Tabel III-31. Rekapitulasi realisasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)	44
Tabel III-32. Rincian realisasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)	45
Tabel III-33. Rekapitulasi realisasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)	46
Tabel III-34. Capaian kinerja sasaran strategis 2 : “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik”	47
Tabel III-35. Variabel pengukuran survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik	48
Tabel III-36. Skor mutu layanan pengukuran survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik	48
Tabel III-37. Rincian realisasi indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.....	48
Tabel III-38. Rekapitulasi realisasi indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA	49
Tabel III-39. Capaian kinerja sasaran strategis 3 : “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional”	50
Tabel III-40. Kriteria dan bobot pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara.....	51
Tabel III-41. Skor nilai pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara.....	51
Tabel III-42. Indikator dan bobot pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara ...	54
Tabel III-43. Rincian realisasi indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.....	56
Tabel III-44. Rekapitulasi realisasi indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.....	56
Tabel III-45. Aspek dan bobot penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).....	57
Tabel III-46. Kategori dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	57
Tabel III-47. Rincian realisasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.01.400327)	58
Tabel III-48. Rekapitulasi realisasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.01.400327)	58
Tabel III-49. Rincian realisasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.03.400328)	60
Tabel III-50. Rekapitulasi realisasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.03.400328)	60
Tabel III-51. Variabel dan bobot penilaian indeks perencanaan anggaran.....	61
Tabel III-52. Kategori dan nilai indeks perencanaan anggaran.....	61
Tabel III-53. Rekapitulasi realisasi nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.01.400327)	62
Tabel III-54. Rekapitulasi realisasi nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.03.400328)	63
Tabel III-55. Variabel dan bobot penilaian indeks pengelolaan aset	64
Tabel III-56. Kategori dan nilai indeks pengelolaan aset	64
Tabel III-57. Rekapitulasi realisasi nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA	65
Tabel III-58. Jumlah aparatur berdasarkan status kepegawaian	66
Tabel III-59. Jumlah ketersediaan aparatur Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA	67
Tabel III-60. Rincian efisiensi penggunaan sumber daya manusia terhadap capaian kinerja .	69
Tabel III-61. Rekapitulasi efisiensi penggunaan sumber daya manusia terhadap capaian kinerja	69
Tabel III-62. Rincian efisiensi pengelolaan anggaran terhadap capaian kinerja	74
Tabel III-63. Rekapitulasi efisiensi pengelolaan anggaran terhadap capaian kinerja	74
Tabel III-64. Realisasi program/kegiatan penunjang kinerja.....	75
Tabel III-65. Rincian realisasi program/kegiatan penunjang kinerja.....	83
Tabel III-66. Realisasi anggaran DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.01.400327) Tahun Anggaran 2025.....	84

Tabel III-67. Realisasi anggaran DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.01.400327) Tahun Anggaran 2025.....	85
Tabel III-68. Realisasi belanja program dukungan manajemen.....	85
Tabel III-69. Realisasi belanja program dukungan manajemen pada tahun-tahun sebelumnya	86
Tabel III-70. Realisasi belanja program penegakan dan pelayanan hukum	87
Tabel III-71. Realisasi belanja program penegakan dan pelayanan hukum pada tahun-tahun sebelumnya.....	87
Tabel III-72. Realisasi anggaran DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA	88
Tabel III-73. Realisasi anggaran DIPA pada tahun-tahun sebelumnya.....	89
Tabel III-74. Rincian revisi DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Bagian Anggaran Badan Urusan Administrasi (005.01.400327) Tahun Anggaran 2025	90
Tabel III-75. Rincian revisi DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Bagian Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (005.03.400328) Tahun Anggaran 2025	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1.	Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA	2
Gambar I.2.	Kedudukan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.....	2
Gambar I.3.	Kota Dumai	3
Gambar I.4.	Struktur Organisasi.....	4
Gambar II.1.	Visi, Misi, dan Tujuan.....	11
Gambar III.1.	Direktori Putusan Mahkamah Agung	32
Gambar III.2.	Pengawasan elektronik eksekusi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (PERKUSI)	34
Gambar III.3.	E-Court Mahkamah Agung	41
Gambar III.4.	Pelimpahan berkas perkara pidana pada Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu)	43
Gambar III.5.	Layanan perkara pidana pada Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu)	45
Gambar III.6.	Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung	54
Gambar III.7.	Nilai IKPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.01.400327) pada Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan.....	58
Gambar III.8.	Nilai IKPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.03.400328) pada Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan.....	59
Gambar III.9.	Nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.01.400327) pada Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan	62
Gambar III.10.	Nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.03.400328) pada Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan	63
Gambar III.11.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada Aplikasi E-Sadewa Mahkamah Agung	65
Gambar III.12.	Diagram realisasi anggaran program dukungan manajemen	86
Gambar III.13.	Diagram realisasi anggaran program dukungan manajemen pada tahun-tahun sebelumnya	86
Gambar III.14.	Diagram realisasi anggaran program penegakan dan pelayanan hukum	87
Gambar III.15.	Diagram realisasi anggaran program penegakan dan pelayanan hukum	87
Gambar III.16.	Diagram realisasi anggaran DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.....	88
Gambar III.17.	Diagram realisasi anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya	89

BAB I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diamanatkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009). Tanggung jawab tersebut dilaporkan secara tertulis, periodik, dan melembaga dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip *good and clean governance*. Pelaporan tersebut berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi capaian atas kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang akuntabel dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai cerminan keinginan yang nyata dari Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk melaksanakan *good and clean governance* dalam penyelenggaraan negara.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui dan mengukur capaian kinerja sehingga tugas dan fungsi dapat dilaksanakan sesuai rencana dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik yang dimulai dari peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk layanan lembaga peradilan kepada masyarakat pencari keadilan dan didukung oleh sumber daya manusia profesional yang memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang termasuk kedalam jajaran aparat peradilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk menginformasikan pencapaian kinerja (*performance results*) yang diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) sebagai tolak ukur keberhasilan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Analisis hasil capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sehingga dapat dilakukan perbaikan kinerja untuk masa yang akan datang.

2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

KEDUDUKAN



Pengadilan Negeri Dumai dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PR.07.02-80 tanggal 23 Mei 1980 atas usulan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 717/PT/UM/1980 tanggal 05 Februari 1980 dan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/Pemb/0287/80 tanggal 25 Maret 1980 perihal pembentukan Pengadilan Negeri Dumai.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau yang berkedudukan di Kota Dumai Provinsi Riau.



Gambar I.1. Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 15/DjU/SK/Tjb/XI/2008 tanggal 27 November 2008, Pengadilan Negeri Dumai dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB.

Selanjutnya pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Dumai dinaikkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas IA berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas pada Empat Puluh Enam Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Kelas IB dan Tujuh Belas Pengadilan Negeri Kelas IB menjadi Kelas IA.



Gambar I.2. Kedudukan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

TUGAS & FUNGSI



TUGAS :

Menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

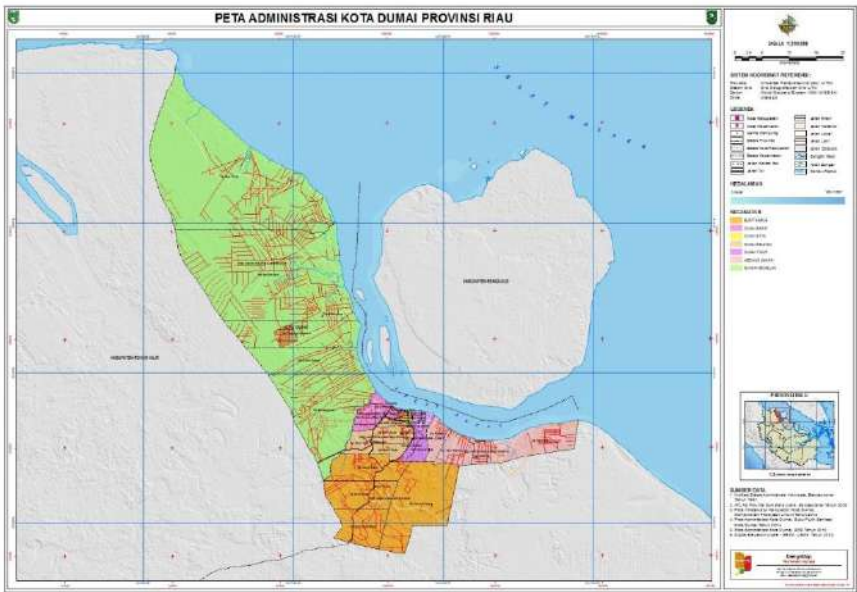
FUNGSI :

- 1. Mengadili;
- 2. Pembinaan;
- 3. Pengawasan;
- 4. Nasihat; dan
- 5. Administratif.

WILAYAH YURISDIKSI



Wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA meliputi seluruh wilayah Kota Dumai yang terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.



Gambar I.3. Kota Dumai

3. STRUKTUR ORGANISASI

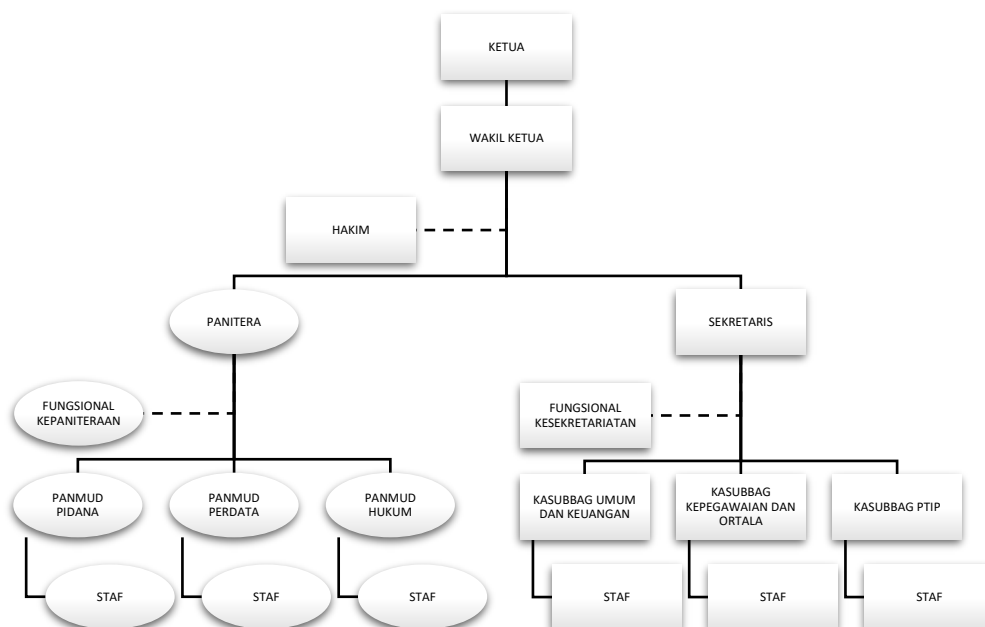
Struktur organisasi merupakan sistem yang mengatur peran, tanggung jawab, dan hubungan komunikasi dan pelaporan antar individu dalam pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan operasional untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum pada dasarnya dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi di bidang teknis yudisial.
2. Menyelenggarakan administrasi di bidang non teknis yudisial (administrasi perkantoran).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA adalah sebagai berikut :



Gambar 1.4. Struktur Organisasi

Rincian jabatan dan tugas pokok sesuai struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut:

1. Jabatan Pimpinan :

Jabatan Pimpinan Pengadilan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua

2. Jabatan Teknis Yudisial :

Jabatan di bidang teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi teknis yudisial yang terdiri dari :

1. Hakim
2. Jabatan Struktural :
 - a. Panitera
 - b. Panitera Muda Pidana
 - c. Panitera Muda Perdata
 - d. Panitera Muda Hukum
3. Jabatan Fungsional :
 - a. Panitera Pengganti
 - b. Juru Sita/Juru Sita Pengganti
 - c. Pranata Peradilan

3. Jabatan Non Teknis Yudisial :

Jabatan di bidang non teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum perkantoran terdiri dari :

1. Jabatan Struktural :
 - a. Sekretaris
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
2. Jabatan Fungsional :
 - a. Pranata Komputer
 - b. Arsiparis
 - c. Pustakawan
 - d. Bendahara

4. ISU STRATEGIS

Isu strategis (*strategic issued*) yang berdampak terhadap visi, misi, dan tujuan yang menjadi perhatian utama/prioritas Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai berikut :

- 1. Kinerja penyelesaian perkara.
- 2. Kualitas pelayanan dan kredibilitas.
- 3. Pelaksanaan eksekusi.
- 4. Akuntabilitas dan transparansi.
- 5. Transformasi digital.
- 6. Kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia.
- 7. Sarana, prasarana, dan anggaran.

Permasalahan dan upaya/strategi penyelesaiannya disajikan dalam matrik sebagai berikut :

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	UPAYA/STRATEGI PENYELESAIAN
1. Kinerja penyelesaian perkara	1. Ketidakseimbangan antara jumlah perkara yang masuk dengan jumlah hakim dan tenaga teknis dapat menyebabkan penumpukan perkara (<i>backlog</i>).	1. Menerapkan sistem <i>Early Warning</i> pada SIPP untuk memantau perkara yang mendekati batas waktu SOP penyelesaian.
	2. Penundaan persidangan yang sering terjadi akibat ketidakhadiran para pihak (saksi, terdakwa, atau penasihat hukum) yang menghambat asas peradilan cepat.	2. Melakukan rapat koordinasi berkala dengan Jaksa dan Lapas/Rutan untuk sinkronisasi jadwal persidangan pidana guna meminimalisir penundaan.
		3. Mewajibkan Hakim Ketua Majelis melakukan audit berkala terhadap perkara yang belum diputus di atas 5 bulan.
2. Kualitas pelayanan dan kredibilitas	1. Kesenjangan antara kebijakan standar pelayanan (SOP) dengan praktik di lapangan, seperti kurangnya responsivitas petugas atau fasilitas ruang tunggu yang belum maksimal.	1. Melakukan <i>Service Excellence Training</i> bagi petugas PTSP secara rutin setiap semester.
	2. Isu mengenai integritas aparat peradilan, termasuk dugaan praktik "mafia peradilan," yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pengadilan.	2. Menyediakan saluran pengaduan (<i>Whistleblowing System/ Aplikasi SIWAS</i>) yang mudah diakses dan dijamin kerahasiaannya di area publik.

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	UPAYA/STRATEGI PENYELESAIAN
		3. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM) secara berkala dan mempublikasikan hasilnya sebagai bentuk transparansi.
3. Pelaksanaan eksekusi	1. Penolakan dari pihak termohon eksekusi atau masyarakat sekitar yang nyaris memicu kericuhan atau perlawanan di lapangan. 2. Hambatan yuridis berupa upaya hukum berkelanjutan (seperti perlawanan atau bantahan) yang menunda proses eksekusi meskipun putusan sudah berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>).	1. Membangun MoU (Nota Kesepahaman) yang lebih intensif dengan Kepolisian Resor Dumai untuk pengamanan eksekusi. 2. Melakukan sosialisasi dan mediasi pra-eksekusi dengan melibatkan tokoh masyarakat atau aparat kelurahan untuk meminimalisir resistensi fisik. 3. Penyusunan checklist dokumen dan prosedur eksekusi yang transparan bagi pemohon eksekusi.
4. Akuntabilitas dan transparansi	1. Publikasi data atau putusan secara <i>real-time</i> di <i>website</i> resmi yang belum optimal, sehingga menyebabkan keterbatasan akses informasi dan menyulitkan masyarakat dalam memantau perkembangan perkara secara mandiri. 2. Mekanisme pengawasan internal dan evaluasi berkala terhadap integritas serta penggunaan anggaran yang dinilai masih lemah.	1. Menunjuk petugas khusus (<i>Quality Control</i>) untuk memastikan setiap putusan diunggah ke Direktori Putusan MA maksimal 1x24 jam setelah dibacakan. 2. Mempublikasikan laporan realisasi anggaran secara rutin di <i>website</i> resmi dan media sosial. 3. Penerapan sistem monitoring mandiri terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diakses internal secara <i>real-time</i>.
5. Transformasi digital	1. Kesulitan sebagian aparatur dan masyarakat (pencari keadilan) dalam beradaptasi dengan sistem digital seperti e-Court atau SIPP.	1. Peningkatan kapasitas <i>bandwidth internet</i> dan pembaruan perangkat keras <i>server</i> secara bertahap.

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	UPAYA/STRATEGI PENYELESAIAN
	2. Ketidakstabilan jaringan internet atau keterbatasan perangkat keras yang mendukung operasional persidangan elektronik dan administrasi digital.	2. Menyediakan "Pojok e-Court" di kantor pengadilan dengan petugas pendamping untuk membantu masyarakat/advokat yang masih gagap teknologi. 3. Digitalisasi arsip perkara aktif maupun inaktif untuk mempermudah temu balik data.
6. Kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia	1. Kesempatan pelatihan atau diklat berkelanjutan yang terbatas untuk menguasai regulasi terbaru menyebabkan terjadinya kekurangan kompetensi spesifik. 2. Budaya kerja yang belum optimal yang disebabkan masih adanya pola pikir (<i>mindset</i>) birokrasi lama yang kaku dan kurang inovatif dalam memberikan layanan publik.	1. Mengadakan program <i>In-House Training</i> atau diskusi hukum internal secara rutin untuk membahas regulasi terbaru. 2. Penerapan sistem <i>Reward and Punishment</i> yang jelas bagi aparatur yang berprestasi dan yang melanggar kode etik. 3. Mendorong aparatur untuk mengikuti pelatihan teknis/fungsional yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung secara aktif.
7. Sarana, prasarana, dan anggaran	1. Keterbatasan sarana pendukung bagi kelompok rentan (disabilitas) serta bangunan gedung yang memerlukan renovasi agar sesuai standar kelas IA . 2. Alokasi anggaran operasional yang sering kali terbatas untuk mendukung seluruh kegiatan inovasi dan pemeliharaan infrastruktur gedung secara rutin.	1. Melakukan skala prioritas pengadaan (misal: perbaikan fasilitas disabilitas dan ruang laktasi) sesuai standar akreditasi penjaminan mutu. 2. Melakukan pemeliharaan sarana IT dan gedung secara preventif (rutin) untuk menghindari kerusakan besar yang memakan biaya tinggi. 3. Menyusun rencana penyerapan anggaran yang terukur agar tidak terjadi penumpukan serapan di akhir tahun (efisiensi fiskal).

Tabel I-1. Matrik isu strategis, permasalahan, dan upaya/strategi penyelesaian

5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Sistematika penyajian merupakan metode atau urutan penyajian atau penyampaian data atau informasi dengan tujuan agar informasi yang disajikan atau disampaikan menjadi terstruktur, rapi, terarah, dan mudah dipahami.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, menyajikan menjelaskan secara umum tentang Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang menekankan pada aspek strategis satuan kerja serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi;

Bab II : Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bab yaitu :

A. Rencana Strategis 2025-2029

- a. Visi
- b. Misi
- c. Tujuan
- d. Sasaran

B. Rencana Kinerja

C. Perjanjian Kinerja

Bab III: Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari 2 (dua) Sub Bab yaitu :

A. Capaian Kinerja, menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan melakukan analisis sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran, menyajikan uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV: Penutup, menyajikan kesimpulan atas capaian kinerja satuan kerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk meningkatkan capaian kinerja.

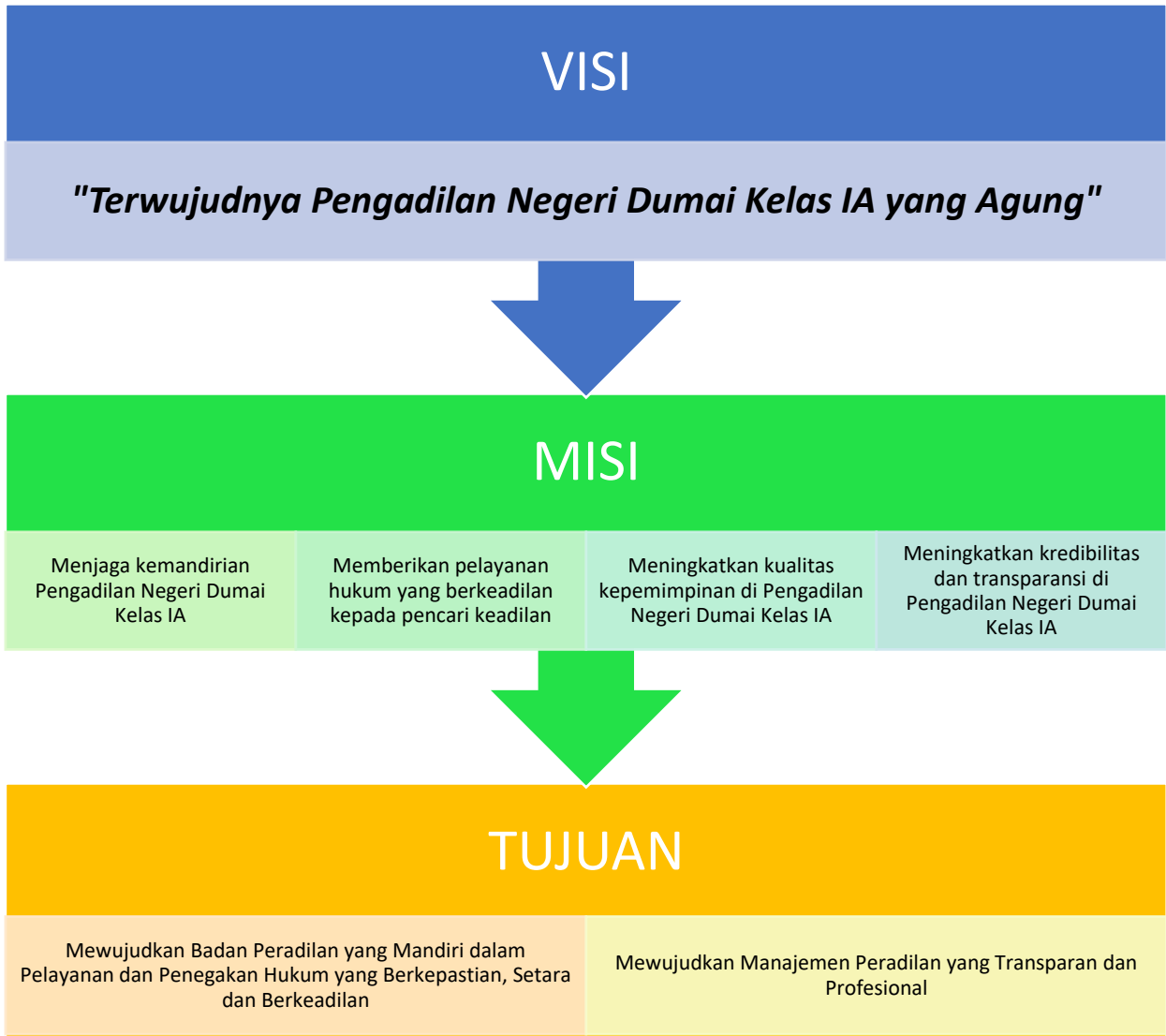
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 ini turut dilampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Pernyataan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Formulir Check List Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Indikator Kinerja Utama
5. Rencana Strategis Tahun 2025-2029
6. Rencana Kinerja Tahun 2025
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
8. Dokumen lain yang dianggap perlu

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama untuk mencapai target kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan secara efektif dan efesien yang diselaraskan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung berdasarkan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 dan disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025-2055 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan satuan kerja pada tahun 2025-2029 serta untuk memberikan pemahaman yang sama tentang tantangan dan komitmen Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan bagi para pengguna serta memenuhi tuntutan *stakeholder* dan pembangunan nasional. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, arah kebijakan, dan strategi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.



Gambar II.1. Visi, Misi, dan Tujuan

A. VISI

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang menjadi cita-cita Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang Agung”.

Melalui visi tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai pengadilan tingkat pertama diharapkan mampu mewujudkan supremasi hukum dan mendapat kepercayaan publik dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, efektif, efisien yang didasari sikap independen.

B. MISI

Misi dirumuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi “Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang Agung”. Misi menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh untuk mencapai visi tersebut. Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mempunyai misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Misi ini diarahkan untuk menjaga kemandirian baik secara institusional maupun fungsional yang erat kaitannya dengan tujuan penyelenggaraan peradilan untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Misi ini diarahkan untuk memastikan proses peradilan yang menghasilkan putusan yang adil serta penyelenggaraan peradilan melalui prosedur yang transparan, sederhana, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Pemimpin Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis yudisial, namun juga memiliki kompetensi manajerial sebagai penggerak utama reformasi internal, pengelola sumber daya, serta penanggung jawab tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Kredibilitas dan kepercayaan publik merupakan syarat mutlak bagi tegaknya otoritas lembaga peradilan dalam sistem negara hukum, sementara transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar dalam memperkuat legitimasi lembaga peradilan. Misi ini didukung melalui pelaksanaan penguatan pembinaan dan pengawasan internal, keterbukaan proses kerja, dan ketersediaan informasi peradilan, serta budaya kerja yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel

C. TUJUAN

Tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur dalam mencapai visi dan misi dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independent dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi. Mandiri bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif.

2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola yang bersih dan professional.

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan berdasarkan indikator kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran strategis berfokus dalam penyusunan program dan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029 sebagaimana Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA nomor 181/KPN.W4-U5/SK.RA1.3/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 berdasarkan Penetapan Reviu Ke-7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA nomor 181 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang berpedoman kepada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sehubungan dengan diterbitkannya Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 dan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025, sasaran strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029 mengacu kepada Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA nomor 169/KPN.W4-U6/SK.RA1.3/XI/2025 tanggal 14 November 2025 sebagai berikut :

Matrik Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Jangka Menengah	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	99%	98%	99%	99%	99%	99%
	1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	99%	99%	99%	99%	99%
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	80%	90%	90%	90%	90%
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	75%	90%	90%	90%	90%
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	93%	95%	95%	95%	95%
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	30%	28%	30%	30%	30%	30%
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	50%	2,6%	50%	50%	50%	50%
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	20%	18%	20%	20%	20%	20%
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98%	94%	98%	98%	98%	98%
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	98%	96%	98%	98%	98%	98%
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	99%	99%	99%	99%	99%
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	79	80	81	82	83
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327)	96	87	96	96	97	97
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328)	96	87	96	96	97	97
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	97	97	97	97	98	98
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	85	85	85	85	85	85
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,3	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3

Tabel II-1. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana kinerja tahunan memuat rencana target kinerja terhadap indikator kinerja utama untuk dicapai pada tahun berkenaan sesuai Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029. Rencana kinerja tahunan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun 2025 terakhir kali direvisi melalui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA nomor 1036/KPN.W4-U6/SK.RA1.9/XI/2025 tanggal 7 November 2025 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA
1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%
	1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	80%
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	75%
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	93%
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	28%
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2,6%
	1.8. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18%
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	50%
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	94%
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	96%
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327)	87
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328)	87
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	97
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	85
	3.6. Nilai Indikator Peggelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2

Tabel II-2. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025

3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 pada mulanya ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA nomor 835/KPN.W4-U5/RA1.10/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025 yang berpedoman kepada Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029 sebagaimana yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA nomor 181/KPN.W4-U5/SK.RA1.3/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 berdasarkan Reviu Ke-7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagaimana yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA nomor 181 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022.

Perjanjian kinerja ini direalisasikan sampai dengan bulan September 2025 dengan capaian sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI (S.D. SEPTEMBER 2025)	CAPAIAN (S.D. SEPTEMBER 2025)
1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	92,13%	96,98%
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%	N/A	N/A
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	92,13%	96,98%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	97%	92,75%	95,62%
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	30%	N/A	N/A
	f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	97,90%	108,78%
	RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-1			99,59%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI (S.D. SEPTEMBER 2025)	CAPAIAN (S.D. SEPTEMBER 2025)
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	99,59%	99,59%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	0%	0%
	RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-2			49,8%
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	95%	100%	105,26%
	RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-3			105,26%
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%	100%	250%
	RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-4			250%

Tabel II-3. Realisasi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 s.d. September 2025

Selanjutnya Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 direvisi pada tanggal 7 November 2025 dengan nomor 1037/KPN.W4-U5/RA1.10/XI/2025 dalam rangka penyesuaian terhadap Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA nomor 169/KPN.W4-U5/SK.RA1.3/XI/2025 tanggal 14 November 2025 sebagai tindak lanjut atas pengesahan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 dan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025.

Revisi perjanjian kinerja ini dilaksanakan dan direalisasikan sampai dengan bulan Desember 2025 dengan target kinerja sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA
1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%
	1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	80%
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	75%
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	93%
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	28%
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2,6%
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18%
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	94%
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	96%
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327)	87
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328)	87
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	97
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	85
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2

Tabel II-4. Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan target kinerja sebagaimana formulasi perhitungan berikut :

Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$ x 100%

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang capainnya diukur berdasarkan 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama yang didukung dengan anggaran yang telah disediakan sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Tahun 2025 nomor 1037/KPN.W4-U5/RA1.10/XI/2025 tanggal 7 November 2025.

A. PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TARGET KINERJA

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA telah merealisasikan target kinerja tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	99,03%	101,05%
	1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	99,96%	100,97%
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	80%	80,33%	100,41%
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	75%	76,74%	102,33%
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	93%	96,05%	103,28%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	28%	28,57%	102,04%
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2,6%	2,68%	103,02%
	1.8. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18%	18,92%	105,11%
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	N/A	N/A
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	94%	94,89%	100,95%
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	96%	97,42%	101,48%
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101,01%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-1			101,97%
	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9	3,91	100,38%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-2			100,38%
	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79	80,5	101,9%
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327)	87	87,75	100,87%
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328)	87	87,48	100,56%
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	97	100	103,09%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	85	85	100%
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,25	101,56%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-3			101,33%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS				101,23%

Tabel III-1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025

Seluruh sasaran strategis telah dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,23% (seratus satu koma dua puluh tiga persen). Namun demikian, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tidak dapat merealisasikan indikator kinerja “Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi” pada sasaran strategis 1 “Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern” yang ditargetkan sebesar 50% (lima puluh persen). Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perkara anak yang diajukan untuk diselesaikan melalui diversi sepanjang tahun 2025, sehingga indikator kinerja tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian capaian kinerja sasaran strategis.

B. PERBANDINGAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

PERBANDINGAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 933/SEK/OT.01.3/10/2017 TANGGAL 24 OKTOBER 2017							INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 173/SEK/SK/1/2022 TANGGAL 31 JANUARI 2022										INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 27101/SEK/RA1.3/10/2025 TANGGAL 31 OKTOBER 2025			
SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	2020			2021			SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024			SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	2025		
	TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN	TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN		TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN	TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN	TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN		TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN
I. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel							I. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel										I. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern			
1. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,23%	110,26%	91%	99,62%	109,47%	92%	99,94%	108,63%	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	99,03%	101,05%
2. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	-	N/A	5%	-	N/A	5%	-	N/A	2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	99,96%	100,97%
3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	81%	89,81%	110,88%	81%	96%	118,52%	3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	99,07%	110,08%	91%	98,08%	107,78%	92%	98,43%	106,99%	3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	80%	80,33%	100,41%
4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,70%	110,78%	90%	100%	111,11%	4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	93%	99,33%	106,81%	93%	98,77%	106,2%	94%	98,88%	105,19%	4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	75%	76,74%	102,33%
5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	86%	99,13%	115,27%	86%	99,47%	115,66%	5. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	14,29%	285,8%	50%	50%	100%	30%	-	N/A	5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	93%	96,05%	103,28%
6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	92%	99,58%	108,24%	92%	99,65%	108,32%	6. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	95%	111,76%	86%	90,82%	105,6%	87%	97,31%	111,85%	6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	28%	28,57%	102,04%

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 933/SEK/OT.01.3/10/2017 TANGGAL 24 OKTOBER 2017							INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 173/SEK/SK/1/2022 TANGGAL 31 JANUARI 2022										INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 27101/SEK/RA1.3/10/2025 TANGGAL 31 OKTOBER 2025				
SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	2020			2021			SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024			SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	2025			
	TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN	TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN		TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN	TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN	TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN		TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN	
7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	99%	99,96%	100,97%	99%	99,97%	100,98%											7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2,6%	2,68%	103,02%	
8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	4,17%	83,4%	5%	14,29%	285,8%											8. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18%	18,92%	105,11%	
9. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	81%	90,69%	111,96%	81%	89%	109,88%											9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	N/A	N/A	
																		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	94%	94,89%	100,95%
																		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	96%	97,42%	101,48%
																		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101,01%
II. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara							II. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara										II. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan				
1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Persentse salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9	3,91	100,38%	

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 933/SEK/OT.01.3/10/2017 TANGGAL 24 OKTOBER 2017							INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 173/SEK/SK/1/2022 TANGGAL 31 JANUARI 2022										INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 27101/SEK/RA1.3/10/2025 TANGGAL 31 OKTOBER 2025						
SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	2020			2021			SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024			SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	2025					
	TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN	TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN		TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN	TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN	TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN		TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN			
2. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	4,11%	137%	5%	5,46%	109,2%	4%	4,88%	122%							
3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	-	N/A	3%	7,41%	247%																	
4. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	74,29%	74,29%	100%	100%	100%																	
5. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus	100%	100%	100%	100%	100%	100%																	
III. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan							III. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan										III. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional						
1. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	90%	100%	111,11%	90%	100%	111,11%	92%	100%	108,7%	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79	80,5	101,9%			

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 933/SEK/OT.01.3/10/2017 TANGGAL 24 OKTOBER 2017							INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 173/SEK/SK/1/2022 TANGGAL 31 JANUARI 2022										INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 27101/SEK/RA1.3/10/2025 TANGGAL 31 OKTOBER 2025				
SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	2020			2021			SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024			SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	2025			
	TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN	TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN		TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN	TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN	TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN		TAR- GET	REAL- ISASI	CAPAIAN	
																	2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327)	87	87,75	100,87%
																	3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328)	87	87,48	100,56%
																	4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	97	100	103,09%
																	5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	85	85	100%
																	6.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,25	101,56%
IV. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan							IV. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan														
1. Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	0%	0%	100%	71,43%	71,43%	1. Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	14,29%	142,9%	20%	20%	100%	60%	44,44%	74,04%					

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk setiap sasaran strategis pada tahun sebelumnya sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NOMOR : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 DAN NOMOR : 173/SEK/SK/1/2022					SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NOMOR : 27101/SEK/RA1.3/10/2025
	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	104,61%	127,81%	120,78%	105,81%	108,71%	1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	113,44%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	93,57%	129,4%	118,5%	104,6%	111 %	2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	111,41%
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100%	100%	111,11%	111,11%	108,7%	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	106,18%
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	0%	71,43%	142,9%	100%	74,07%		

Tabel III-3. Capaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 diatas, perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun ini terhadap tahun sebelumnya tidak dapat disajikan dengan baik pada periode laporan kinerja tahun ini. Hal ini disebabkan terjadinya peralihan dari periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ke periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dimana terdapat perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja antar periode, sehingga tidak relevan untuk dilakukan perbandingan antar kinerja. Namun demikian, perbandingan kinerja akan dilakukan pada laporan kinerja periode berikutnya.

C. PERBANDINGAN KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terhadap target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	2025		JANGKA MENENGAH		HASIL
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	99,03%	98%	101,05%	99%	100,03%	Melebihi target
	1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,96%	99%	100,97%	99%	100,97%	Melebihi target
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	80,33%	80%	100,41%	90%	88,92%	Target tidak tercapai
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	76,74%	75%	102,33%	90%	85,27%	Target tidak tercapai
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96,05%	93%	103,28%	95%	101,11%	Melebihi target
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	28,57%	28%	102,04%	30%	95,23%	Target tidak tercapai
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2,68%	2,6%	103,02%	50%	5,36%	Target tidak tercapai

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	2025		JANGKA MENENGAH		HASIL
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,92%	18%	105,11%	20%	94,6%	Target tidak tercapai
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	N/A	50%	N/A	50%	N/A	Tidak dihitung
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	94,89%	94%	100,95%	98%	96,83%	Target tidak tercapai
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	97,42%	96%	101,48%	98%	99,41%	Target tidak tercapai
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	99%	101,01%	99%	101,01%	Melebihi target
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-1			101,97%		88,07%	Tidak tercapai
2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,91	3,9	100,38%	3,9	100,38%	Melebihi target
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-2			100,38%		100,38%	Tercapai
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79,81	80,5	101,9%	81	98,53%	Target tidak tercapai
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327)	87,75	87	100,87%	96	91,41%	Target tidak tercapai
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328)	87,48	87	100,56%	96	91,13%	Target tidak tercapai
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	100	97	103,09%	97	103,09%	Melebihi target
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	85	85	100%	85	100%	Susuai target
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,25	3,2	101,56%	3,3	98,48%	Target tidak tercapai
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-3			101,33%		97,11%	Tidak tercapai

Tabel III-4. Rincian perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terhadap target jangka menengah

Tingkat ketercapaian realisas kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk masing-masing sasaran strategis terhadap target jangka menengah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN		HASIL	FAKTOR PENDUKUNG/ PENGHAMBAT (KENDALA)
		2025	JANGKA MENENGAH		
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	101,97%	88,07%	Tidak tercapai	Penetapan target kinerja tahun 2025 lebih rendah dari target jangka menengah
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	100,38%	100,38%	Tercapai	Target kinerja tahun 2025 selaras dengan target jangka menengah
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	101,33%	97,11%	Tidak tercapai	Penetapan target kinerja tahun 2025 lebih rendah dari target jangka menengah

Tabel III-5. Rekapitulasi perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terhadap target jangka menengah

Hasil perbandingan capaian kinerja ini menjadi dorongan semangat bagi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di masa yang akan datang.

D. PERBANDINGAN KINERJA SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI RIAU

Capaian kinerja Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu			
	1.1.1. Pengadilan Negeri Pekanbaru	89	93	104,49%
	1.1.2. Pengadilan Negeri Dumai	98	99,03	101,05%
	1.1.3. Pengadilan Negeri Bangkinang	90	94,96	105,51%
	1.1.4. Pengadilan Negeri Pelalawan	98	99,46	101,49%
	1.1.5. Pengadilan Negeri Bengkalis	94	96,8	102,98%
	1.1.6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir	95	96,26	101,33%
	1.1.7. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	90	98,14	109,04%
	1.1.8. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	98	98,37	100,38%
	1.1.9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	95	99,22	104,44%
	1.1.10. Pengadilan Negeri Rengat	97	97,09	100,09%
	1.1.11. Pengadilan Negeri Tembilahan	97	99,78	102,87%
	1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			
	1.2.1. Pengadilan Negeri Pekanbaru	95	100	105,26%
	1.2.2. Pengadilan Negeri Dumai	99	99,96	100,97%
	1.2.3. Pengadilan Negeri Bangkinang	99	100	101,01%
	1.2.4. Pengadilan Negeri Pelalawan	98	99,56	101,59%
	1.2.5. Pengadilan Negeri Bengkalis	94	100	106,38%
	1.2.6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir	98	98	100,31%
	1.2.7. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	91	100	109,89%
	1.2.8. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	100	100	100%
	1.2.9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	99	100	101,01%
	1.2.10. Pengadilan Negeri Rengat	100	100	100%
	1.2.11. Pengadilan Negeri Tembilahan	98	100	102,04%
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			
	1.3.1. Pengadilan Negeri Pekanbaru	36	38	105,56%
	1.3.2. Pengadilan Negeri Dumai	80	80,33	100,41%
	1.3.3. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	100	100	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	1.3.4. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	95	100	105,26%
	1.3.5. Pengadilan Negeri Rengat	100	100	100%
	1.3.6. Pengadilan Negeri Tembilahan	97	100	103,09%
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			
	1.4.1. Pengadilan Negeri Pekanbaru	72	76	105,56%
	1.4.2. Pengadilan Negeri Dumai	75	76,74	102,33%
	1.4.3. Pengadilan Negeri Bangkinang	98	100	102,04%
	1.4.4. Pengadilan Negeri Pelalawan	100	100	100%
	1.4.5. Pengadilan Negeri Bengkalis	94	100	106,38%
	1.4.6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir	90	93,5	103,89%
	1.4.7. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	91	100	109,89%
	1.4.8. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	100	100	100%
	1.4.9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	95	100	105,26%
	1.4.10. Pengadilan Negeri Rengat	100	100	100%
	1.4.11. Pengadilan Negeri Tembilahan	97	100	103,09%
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			
	1.5.1. Pengadilan Negeri Pekanbaru	92	98	106,52%
	1.5.2. Pengadilan Negeri Dumai	93	96,5	103,28%
	1.5.3. Pengadilan Negeri Bangkinang	95	97,35	102,47%
	1.5.4. Pengadilan Negeri Pelalawan	100	100	100%
	1.5.5. Pengadilan Negeri Bengkalis	95	100	105,26%
	1.5.6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir	95	96,8	101,89%
	1.5.7. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	91	97,2	106,81%
	1.5.8. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	100	100	100%
	1.5.9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	96	100	104,17%
	1.5.10. Pengadilan Negeri Rengat	100	100	100%
	1.5.11. Pengadilan Negeri Tembilahan	98	100	102,04%
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata			
	1.6.1. Pengadilan Negeri Pekanbaru	45	48	106,67%
	1.6.2. Pengadilan Negeri Dumai	28	28,57	102,04%
	1.6.3. Pengadilan Negeri Bangkinang	55	65,21	118,56%
	1.6.4. Pengadilan Negeri Pelalawan	20	20	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	1.6.5. Pengadilan Negeri Bengkalis	50	50	100%
	1.6.6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir	5	N/A	N/A
	1.6.7. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	46	50	108,7%
	1.6.8. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	100	100	100%
	1.6.9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	65	66,67	102,57%
	1.6.10. Pengadilan Negeri Rengat	99	100	101,01%
	1.6.11. Pengadilan Negeri Tembilahan	100	100	100%
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif			
	1.7.1. Pengadilan Negeri Pekanbaru	12	13	108,33%
	1.7.2. Pengadilan Negeri Dumai	2,6	2,68	103,02%
	1.7.3. Pengadilan Negeri Bangkinang	50	49,57	99,14%
	1.7.4. Pengadilan Negeri Pelalawan	100	100	100%
	1.7.5. Pengadilan Negeri Bengkalis	25	25,92	103,68%
	1.7.6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir	50	50	100%
	1.7.7. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	91	100	109,89%
	1.7.8. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	97	97,14	100,14%
	1.7.9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	3,5	3,59	102,57%
	1.7.10. Pengadilan Negeri Rengat	100	100	100%
	1.7.11. Pengadilan Negeri Tembilahan	100	100	100%
	1.8. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi			
	1.8.1. Pengadilan Negeri Pekanbaru	3	3	100%
	1.8.2. Pengadilan Negeri Dumai	18	18,92	105,11%
	1.8.3. Pengadilan Negeri Bangkinang	15	15,64	104,27%
	1.8.4. Pengadilan Negeri Pelalawan	14	15,56	111,14%
	1.8.5. Pengadilan Negeri Bengkalis	4	4,76	119%
	1.8.6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir	5	5,7	114%
	1.8.7. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	7	7,55	107,86%
	1.8.8. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	2,9	2,94	101,38%
	1.8.9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	4	4,08	102%
	1.8.10. Pengadilan Negeri Rengat	25	28,57	114,28%
	1.8.11. Pengadilan Negeri Tembilahan	4,3	4,5	104,65%
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi			
	1.9.1. Pengadilan Negeri Pekanbaru	47	50	106,38%
	1.9.2. Pengadilan Negeri Dumai	50	N/A	N/A

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	1.9.3. Pengadilan Negeri Bangkinang	100	100	100%
	1.9.4. Pengadilan Negeri Pelalawan	100	100	100%
	1.9.5. Pengadilan Negeri Bengkalis	90	100	111,11%
	1.9.6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir	50	N/A	N/A
	1.9.7. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	1	N/A	N/A
	1.9.8. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	65	66,67	102,57%
	1.9.9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	95	100	105,26%
	1.9.10. Pengadilan Negeri Rengat	100	100	100%
	1.9.11. Pengadilan Negeri Tembilahan	83	85,71	103,27%
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court			
	1.10.1. Pengadilan Negeri Pekanbaru	95	100	105,26%
	1.10.2. Pengadilan Negeri Dumai	94	94,89	100,95%
	1.10.3. Pengadilan Negeri Bangkinang	99	100	101,01%
	1.10.4. Pengadilan Negeri Pelalawan	100	100	100%
	1.10.5. Pengadilan Negeri Bengkalis	94	100	106,38%
	1.10.6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir	100	100	100%
	1.10.7. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	92	100	108,7%
	1.10.8. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	100	100	100%
	1.10.9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	100	100	100%
	1.10.10. Pengadilan Negeri Rengat	100	100	100%
	1.10.11. Pengadilan Negeri Tembilahan	98	100	102,04%
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)			
	1.11.1. Pengadilan Negeri Pekanbaru	94	99	105,32%
	1.11.2. Pengadilan Negeri Dumai	96	97,42	101,48%
	1.11.3. Pengadilan Negeri Bangkinang	99	100	101,01%
	1.11.4. Pengadilan Negeri Pelalawan	100	100	100%
	1.11.5. Pengadilan Negeri Bengkalis	94	100	106,38%
	1.11.6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir	95	100	105,26%
	1.11.7. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	91	100	109,89%
	1.11.8. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	100	100	100%
	1.11.9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	80	85,34	106,68%
	1.11.10. Pengadilan Negeri Rengat	82	84	102,44%
	1.11.11. Pengadilan Negeri Tembilahan	98	100	102,04%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)			
	1.12.1. Pengadilan Negeri Pekanbaru	95	100	105,26%
	1.12.2. Pengadilan Negeri Dumai	99	100	101,01%
	1.12.3. Pengadilan Negeri Bangkinang	99	100	101,01%
	1.12.4. Pengadilan Negeri Pelalawan	100	100	100%
	1.12.5. Pengadilan Negeri Bengkalis	94	100	106,38%
	1.12.6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir	95	100	105,26%
	1.12.7. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	91	100	109,89%
	1.12.8. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	100	100	100%
	1.12.9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	100	100	100%
	1.12.10. Pengadilan Negeri Rengat	100	100	100%
	1.12.11. Pengadilan Negeri Tembilahan	98	100	102,04%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-1			101,11%
2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			
	2.1.1. Pengadilan Negeri Pekanbaru	94	99	105,32%
	2.1.2. Pengadilan Negeri Dumai	3,9	3,91	100,38%
	2.1.3. Pengadilan Negeri Bangkinang	3,88	3,98	102,38%
	2.1.4. Pengadilan Negeri Pelalawan	3,98	3,99	100,25%
	2.1.5. Pengadilan Negeri Bengkalis	3,9	3,99	102,31%
	2.1.6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir	3,8	3,96	104,21%
	2.1.7. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	3,86	3,99	103,37%
	2.1.8. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	3,9	3,99	102,31%
	2.1.9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	3,6	3,78	105%
	2.1.10. Pengadilan Negeri Rengat	3,9	3,95	101,28%
	2.1.11. Pengadilan Negeri Tembilahan	3,8	4	105,26%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-2			102,7%
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			
	3.1.1. Pengadilan Negeri Pekanbaru	83	83	100%
	3.1.2. Pengadilan Negeri Dumai	79	79,81	101,03%
	3.1.3. Pengadilan Negeri Bangkinang	78	82,15	105,32%
	3.1.4. Pengadilan Negeri Pelalawan	84	90,76	108,05%
	3.1.5. Pengadilan Negeri Bengkalis	76	89,43	117,67%
	3.1.6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir	77	89,29	115,96%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	3.1.7. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	75	82,43	109,91%
	3.1.8. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	75	75	100%
	3.1.9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	75	86,82	115,76%
	3.1.10. Pengadilan Negeri Rengat	80	80	100%
	3.1.11. Pengadilan Negeri Tembilahan	80	81,79	102,24%
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327)			
	3.2.1. Pengadilan Negeri Pekanbaru	99	99	100%
	3.2.2. Pengadilan Negeri Dumai	87	87,75	100,86%
	3.2.3. Pengadilan Negeri Bangkinang	96	98,84	102,96%
	3.2.4. Pengadilan Negeri Pelalawan	97	94,9	97,84%
	3.2.5. Pengadilan Negeri Bengkalis	94	98,98	105,3%
	3.2.6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir	95	98,41	103,59%
	3.2.7. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	85	93,05	109,47%
	3.2.8. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	93	93,75	100,81%
	3.2.9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	91	95,82	105,3%
	3.2.10. Pengadilan Negeri Rengat	98	100	102,04%
	3.2.11. Pengadilan Negeri Tembilahan	98	100	102,04%
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328)			
	3.3.1. Pengadilan Negeri Pekanbaru	97	97	100%
	3.3.2. Pengadilan Negeri Dumai	87	87,48	100,55%
	3.3.3. Pengadilan Negeri Bangkinang	98	100	102,04%
	3.3.4. Pengadilan Negeri Pelalawan	97	97,6	100,62%
	3.3.5. Pengadilan Negeri Bengkalis	94	97,06	103,26%
	3.3.6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir	95	99,53	104,77%
	3.3.7. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	91	99,88	109,76%
	3.3.8. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	95	96,73	101,82%
	3.3.9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	88	88,57	100,65%
	3.3.10. Pengadilan Negeri Rengat	97	97,58	100,6%
	3.3.11. Pengadilan Negeri Tembilahan	98	100	102,04%
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)			
	3.4.1. Pengadilan Negeri Pekanbaru	100	100	100%
	3.4.2. Pengadilan Negeri Dumai	97	100	103,09%
	3.4.3. Pengadilan Negeri Bangkinang	80	79,68	99,6%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	3.4.4. Pengadilan Negeri Pelalawan	80	100	125%
	3.4.5. Pengadilan Negeri Bengkalis	65	100	153,85%
	3.4.6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir	95	100	105,26%
	3.4.7. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	92	100	108,7%
	3.4.8. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	95	100	105,26%
	3.4.9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	80	100	125%
	3.4.10. Pengadilan Negeri Rengat	81	81,25	100,31%
	3.4.11. Pengadilan Negeri Tembilahan	98	100	102,04%
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)			
	3.5.1. Pengadilan Negeri Pekanbaru	78	78	100%
	3.5.2. Pengadilan Negeri Dumai	85	85	100%
	3.5.3. Pengadilan Negeri Bangkinang	75	79,68	106,24%
	3.5.4. Pengadilan Negeri Pelalawan	80	85	106,25%
	3.5.5. Pengadilan Negeri Bengkalis	70	85	121,43%
	3.5.6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir	80	85	106,26%
	3.5.7. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	78	85	108,97%
	3.5.8. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	95	96,14	101,2%
	3.5.9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	80	85	106,25%
	3.5.10. Pengadilan Negeri Rengat	80	80,4	100,5%
	3.5.11. Pengadilan Negeri Tembilahan	80	85	106,25%
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan			
	3.6.1. Pengadilan Negeri Pekanbaru	3	3	100%
	3.6.2. Pengadilan Negeri Dumai	3,2	3,25	101,56%
	3.6.3. Pengadilan Negeri Bangkinang	3	3	100%
	3.6.4. Pengadilan Negeri Pelalawan	3	3,03	100,83%
	3.6.5. Pengadilan Negeri Bengkalis	3	2,78	92,5%
	3.6.6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir	3,2	3,4	106,25%
	3.6.7. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	3,28	3,6	109,76%
	3.6.8. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	3,5	3,5	100%
	3.6.9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	3	3,05	101,67%
	3.6.10. Pengadilan Negeri Rengat	3,3	3,38	102,27%
	3.6.11. Pengadilan Negeri Tembilahan	3	3,23	107,5%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-3			105,24%

Tabel III-6. Rincian perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terhadap satuan kerja sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk masing-masing sasaran strategis terhadap rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau sebagai berikut :

CAPAIAN				
NO.	SASARAN STRATEGIS	PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA	PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI RIAU	HASIL
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	101,97%	101,11%	Diatas rata-rata
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	100,38%	102,7%	Dibawah rata-rata
3.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	101,33%	105,24%	Dibawah rata-rata
RATA-RATA		101,23%	102,02%	Dibawah rata-rata

Tabel III-7. Rekapitulasi perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terhadap satuan kerja sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat capaian kinerja sasaran strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang berada dibawah rata-rata capaian kinerja sasaran strtategis Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Oleh sebab itu, hasil perbandingan capaian kinerja ini menjadi dorongan semangat bagi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di masa yang akan datang.

E. PERBANDINGAN KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL

Perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dengan target kinerja nasional diperlukan untuk memastikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tetap sejalan dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung.

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terhadap target Mahkamah Agung secara nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL	REALISASI PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%	99,03%
		1.2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,97%	99,96%
		1.3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%	80,33%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL	REALISASI PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA	CAPAIAN	
	1.4.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%	76,74%	84,62%	
	1.5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%	96,05%	106,59%	
	1.6.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%	28,07%	70,97%	
	1.7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%	2,68%	25,57%	
	1.8.	Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%	18,92%	101,23%	
	1.9.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97%	-	N/A	
	1.10.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95,76%	94,89%	99,09%	
	1.11.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%	97,42%	108,49%	
	1.12.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93%	100%	111,2%	
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-1				90,79%	
	2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	3,91	103,44%
		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-2				103,44%
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	80,5	113,38%	
	3.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327)	90	87,75	97,5%	
	3.3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328)	90	87,48	97,2%	
	3.4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	94	100	106,38%	
	3.5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	94	85	90,43%	
	3.6.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,75	3,25	86,67%	
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-3				98,59%	
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS					97,61%	

Tabel III-8. Rincian perbandingan capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terhadap target nasional

Tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA masih belum sejalan dengan target kinerja nasional Mahkamah Agung sehingga hal ini menjadi dorongan semangat bagi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja di masa yang akan datang.

F. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA secara terperinci dijelaskan sebagai berikut :

1. TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN

Sasaran strategis 1 “Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern” mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversi, dan keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	99,03%	101,05%
	1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	99,96%	100,97%
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	80%	80,33%	100,41%
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	75%	76,74%	102,33%
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	93%	96,05%	103,28%
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	28%	28,57%	102,04%
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2,6%	2,68%	103,02%
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18%	18,92%	105,11%
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	N/A	N/A

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	94%	94,89%	100,95%
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	96%	97,42%	101,48%
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101,01%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-1			101,97%

Tabel III-9. Capaian kinerja sasaran strategis 1 : “Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel”

Sasaran strategis 1 “Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern” memiliki 12 (dua belas) indikator kinerja dengan masing-masing capaian diuraikan sebagai berikut :

1.1. PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA SECARA TEPAT WAKTU

Penilaian indikator kinerja “persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu” bertujuan untuk mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Perkara yang diselesaikan tepat waktu
- :
- Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.
- Perkara yang diselesaikan
- :
- Sisa perkara tahun lalu dan perkara tahun berjalan yang diselesaikan.

Penilaian indikator kinerja ini dihimpun dan dihitung berdasarkan data yang tersedia pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat diakses melalui alamat <https://sipp.pn-dumai.go.id/> serta konfirmasi dan validasi Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai formulir isian data kinerja yang telah disahkan.

Rincian realisasi penyelesaian perkara secara tepat waktu sebagai berikut :

BULAN	PENYELESAIAN PERKARA			PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU			REALISASI
	PIDANA	PERDATA	TOTAL	PIDANA	PERDATA	TOTAL	
Januari	136	9	145	131	9	140	96,6%
Februari	1.011	19	1.030	1.011	11	1.022	99,2%
Maret	167	16	183	167	16	183	100%
April	175	7	182	175	7	182	100%
Mei	450	14	464	450	4	454	97,8%
Juni	967	13	980	967	12	979	99,9%
Juli	377	31	408	377	25	402	98,5%

BULAN	PENYELESAIAN PERKARA			PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU			REALISASI
	PIDANA	PERDATA	TOTAL	PIDANA	PERDATA	TOTAL	
Agustus	748	16	764	748	11	759	99,3%
September	327	29	356	327	26	353	99,2%
Oktober	220	21	241	220	16	236	97,9%
November	75	17	92	75	13	88	95,7%
Desember	77	21	98	77	20	97	99,%
TOTAL	4.730	213	4.943	4.725	170	4.895	99,03%

Tabel III-10. Rincian realisasi penyelesaian perkara secara tepat waktu

Rekapitulasi realisasi penyelesaian perkara secara tepat waktu sebagai berikut :

NO.	PERKARA	PENYELESAIAN PERKARA	PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU	REALISASI
I.	PIDANA	4.730	4.725	99,97%
1.	Anak	9	9	100%
2.	Biasa	444	439	98,87%
3.	Singkat	-	-	N/A
4.	Cepat	11	11	100%
5.	Lalu Lintas	4.260	4.260	100%
6.	Praperadilan	6	6	100%
II.	PERDATA	213	170	79,81%
1.	Permohonan	111	106	95,5%
2.	Permohonan Konsinyasi	12	7	58,33%
3.	Gugatan	72	47	65,28%
4.	Gugatan Sederhana	15	8	53,33%
5.	Perlawanan Putusan Verstek (Verzet Tegen Verstek)	1	1	100%
6.	Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)/ Perlawanan Pihak (Partij Verzet)	2	1	50%
TOTAL		4.943	4.895	99,03%

Tabel III-11. Rekapitulasi realisasi penyelesaian perkara secara tepat waktu

REALISASI : $\frac{4.895}{4.943} \times 100\% = 99,03\%$

TARGET : 98%

CAPAIAN : $\frac{99,03\%}{98\%} \times 100\% = 101,05\%$

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mampu merealisasikan kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 101,05% (seratus satu koma nol lima persen). Faktor pendukung keberhasilan tersebut sebagai berikut :

- 1. Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dalam proses administrasi dan persidangan perkara.
- 2. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap sisa perkara dan durasi minutasi perkara untuk memastikan tidak ada tunggakan yang melebihi batas waktu.

- 3. Optimalisasi pemanfaatan metode penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi, diversifikasi, atau pendekatan keadilan restoratif.
- 4. Komitmen kinerja aparaturnya yang efektif dan efisien.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu di tahun yang akan datang sehingga pelayanan peradilannya dan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik.

1.2. PERSENTASE PENYEDIAAN/PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KEPADA PARA PIHAK

Penilaian indikator kinerja “persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak” bertujuan untuk menilai kecepatan layanan administrasi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pasca putusan dibacakan dan perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu : Salinan putusan disediakan/dikirim sejak putusan diucapkan (pidana : 7 (tujuh) hari kerja, perdata : 14 (empat belas) hari kerja).
- Perkara yang diputus : Sisa perkara tahun lalu dan perkara tahun berjalan yang diputus.

Penilaian indikator kinerja ini dihimpun dan dihitung berdasarkan data yang tersedia pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat diakses melalui alamat <https://sipp.pn-dumai.go.id/> serta konfirmasi dan validasi Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai formulir isian data kinerja yang telah disahkan.

Rincian realisasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA kepada para pihak sebagai berikut :

BULAN	PUTUSAN			SALINAN PUTUSAN DISEDIAKAN/DIKIRIM TEPAT WAKTU			REALISASI
	PIDANA	PERDATA	TOTAL	PIDANA	PERDATA	TOTAL	
Januari	136	10	146	136	9	145	99,3%
Februari	1.011	18	1.029	1.011	18	1.029	100%
Maret	167	16	183	167	16	183	100%
April	175	7	182	175	7	182	100%
Mei	450	15	465	450	15	465	100%
Juni	967	12	979	967	12	979	100%
Juli	377	31	408	377	31	408	100%
Agustus	748	16	764	748	16	764	100%
September	327	29	356	327	28	355	99,7%
Oktober	220	21	241	220	21	241	100%
November	75	17	92	75	17	92	100%
Desember	77	21	98	77	21	98	100%
TOTAL	4.730	213	4.943	4.730	211	4.941	99,96%

Tabel III-12. Rincian realisasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA kepada para pihak

Rekapitulasi realisasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA kepada para pihak sebagai berikut :

NO.	PERKARA	PUTUSAN	SALINAN PUTUSAN DISEDIAKAN/ DIKIRIM TEPAT WAKTU	REALISASI
I.	PIDANA	4.730	4.730	100%
1.	Anak	9	9	100%
2.	Biasa	444	444	100%
3.	Singkat	-	-	N/A
4.	Cepat	11	11	100%
5.	Lalu Lintas	4.260	4.260	100%
6.	Praperadilan	6	6	100%
II.	PERDATA	213	211	99,06%
1.	Permohonan	104	104	100%
2.	Permohonan Konsinyasi	19	19	100%
3.	Gugatan	72	71	98,61%
4.	Gugatan Sederhana	15	14	93,33%
5.	Perlawanan Putusan Verstek (Verzet Tegen Verstek)	1	1	100%
6.	Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)/ Perlawanan Pihak (Partij Verzet)	2	2	100%
TOTAL		4.943	4.941	99,96%

Tabel III-13. Rekapitulasi realisasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA kepada para pihak

REALISASI : $\frac{4.941}{4.943} \times 100\% = 99,96\%$

TARGET : 99%

CAPAIAN : $\frac{99,96\%}{99\%} \times 100\% = 100,97\%$

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mampu merealisasikan kinerja penyediaan/pengiriman salinan putusan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA kepada para pihak melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 100,97% (seratus koma sembilan puluh tujuh persen). Faktor pendukung keberhasilan tersebut sebagai berikut :

- 1. Penyelesaian berkas perkara (minutasi) dan pemanfaatan sistem informasi pengadilan (SIP) yang efisien.
- 2. Peran pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang optimal.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dalam penyediaan/pengiriman salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu di tahun yang akan datang sehingga pelayanan peradilan dan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik.

1.3. PERSENTASE PENGIRIMAN PEMBERITAHUAN PETIKAN/AMAR PUTUSAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI SECARA TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN PENGAJU KEPADA PARA PIHAK

Penilaian indikator kinerja “pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak” bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menyampaikan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak berperkara untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu

Jumlah petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju

x 100%

Keterangan :
Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu
Petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju

:
:
:

Pemberitahuan petikan/amar putusan disampaikan sejak putusan diucapkan (pidana : 7 (tujuh) hari kerja, perdata : 14 (empat belas) hari kerja).
Petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan negeri Dumai Kelas IA.

Penilaian indikator kinerja ini dihimpun dan dihitung berdasarkan data yang tersedia pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat diakses melalui alamat <https://sipp.pn-dumai.go.id/> serta konfirmasi dan validasi Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai formulir isian data kinerja yang telah disahkan.

Rincian realisasi pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA kepada para pihak sebagai berikut :

BULAN	PETIKAN/AMAR PUTUSAN YANG DITERIMA			PEMBERITAHUAN PETIKAN/AMAR PUTUSAN TEPAT WAKTU			REALISASI
	PIDANA	PERDATA	TOTAL	PIDANA	PERDATA	TOTAL	
Januari	6	3	9	5	3	8	89,9%
Februari	2	5	7	2	5	7	100%
Maret	11	2	13	6	1	7	53,8%
April	6	3	9	5	3	8	88,9%
Mei	4	2	6	3	2	5	83,3%
Juni	9	3	12	5	3	8	66,7%
Juli	10	1	11	6	1	7	63,6%
Agustus	5	3	8	5	3	8	100%
September	5	4	9	5	4	9	100%
Oktober	16	5	21	13	3	16	76,2%
November	3	2	5	3	1	4	80%
Desember	9	3	12	8	3	11	91,7%
TOTAL	86	36	122	66	32	98	80,33%

Tabel III-14. Rincian realisasi pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA kepada para pihak

Rekapitulasi realisasi pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA kepada para pihak sebagai berikut :

NO.	PERKARA	PETIKAN/ AMAR PUTUSAN YANG DITERIMA	PEMBERITAHUAN PETIKAN/AMAR PUTUSAN TEPAT WAKTU	REALISASI
I.	PIDANA	86	66	76,74%
1.	Anak	-	-	N/A
2.	Biasa	86	66	76,74%
3.	Singkat	-	-	N/A
4.	Cepat	-	-	N/A
5.	Lalu Lintas	-	-	N/A
II.	PERDATA	36	32	88,89%
1.	Permohonan	-	-	N/A
2.	Gugatan	33	29	87,88%
3.	Gugatan Sederhana	-	-	N/A
4.	Perlawanan Putusan Verstek (Verzet Tegen Verstek)	-	-	N/A
5.	Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)/ Perlawanan Pihak (Partij Verzet)	3	3	100%
TOTAL		122	98	80,33%

Tabel III-15. Rekapitulasi realisasi pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA kepada para pihak

REALISASI : $\frac{98}{122} \times 100\% = 80,33\%$

TARGET : 80%

CAPAIAN : $\frac{80,33\%}{80\%} \times 100\% = 100,41\%$

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mampu merealisasikan kinerja pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 100,41% (seratus koma empat puluh satu persen). Faktor pendukung keberhasilan tersebut sebagai berikut :

- 1. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi.
- 2. Pemanfaatan kerja sama yang optimal dengan PT. Pos Indonesia dalam proses pengiriman.
- 3. Koordinasi yang efektif antar petugas.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dalam pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak secara tepat waktu di tahun yang akan datang sehingga pelayanan peradilan dan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik.

1.4. PERSENTASE PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA TINGKAT BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN PENGAJU KEPADA PARA PIHAK

Penilaian indikator kinerja “pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak” bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam mengirimkan salinan putusan pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak berperkara untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

Jumlah salinan putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu

Jumlah salinan putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang diterima pengadilan pengaju

x100%

Keterangan :

- Salinan putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu

Salinan putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang diterima pengadilan pengaju
- : Salinan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali disampaikan sejak putusan diucapkan (pidana : 7 (tujuh) hari kerja, perdata : 14 (empat belas) hari kerja).

: Salinan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang diterima Pengadilan negeri Dumai Kelas IA.

Penilaian indikator kinerja ini dihimpun dan dihitung berdasarkan data yang tersedia pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat diakses melalui alamat <https://sipp.pn-dumai.go.id/> serta konfirmasi dan validasi Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai formulir isian data kinerja yang telah disahkan.

Rincian realisasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA kepada para pihak sebagai berikut :

BULAN	SALINAN PUTUSAN TINGKAT BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA YANG DITERIMA	PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TINGKAT BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA TEPAT WAKTU	REALISASI
Januari	6	6	100%
Februari	2	2	100%
Maret	11	6	54,5%
April	6	5	83,3%
Mei	4	3	75%
Juni	9	5	55,6%
Juli	10	6	60%
Agustus	5	5	100%
September	5	4	80%
Oktober	16	13	81,3%
November	3	3	100%
Desember	9	8	88,9%
TOTAL	86	66	76,74%

Tabel III-16. Rincian realisasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali tepat waktu kepada para pihak

Rekapitulasi realisasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA kepada para pihak sebagai berikut :

NO.	PERKARA PIDANA	SALINAN PUTUSAN TINGKAT BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DITERIMA	PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TINGKAT BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI TEPAT WAKTU	REALISASI
1.	Anak	-	-	N/A
2.	Biasa	86	66	76,74%
3.	Singkat	-	-	N/A
4.	Cepat	-	-	N/A
5.	Lalu Lintas	-	-	N/A
TOTAL		86	66	76,74%

Tabel III-17. Rekapitulasi realisasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali tepat waktu kepada para pihak

REALISASI : $\frac{66}{86} \times 100\% = 76,74\%$

TARGET : 75%

CAPAIAN : $\frac{76,74\%}{75\%} \times 100\% = 102,33\%$

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mampu merealisasikan kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak secara tepat waktu melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 102,33% (seratus dua koma tiga puluh tiga persen). Faktor pendukung keberhasilan tersebut sebagai berikut:

- 1. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi.
- 2. Pemanfaatan kerja sama yang optimal dengan PT. Pos Indonesia dalam proses pengiriman.
- 3. Koordinasi yang efektif antar petugas.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak secara tepat waktu di tahun yang akan datang sehingga pelayanan peradilan dan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik.

1.5. PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN

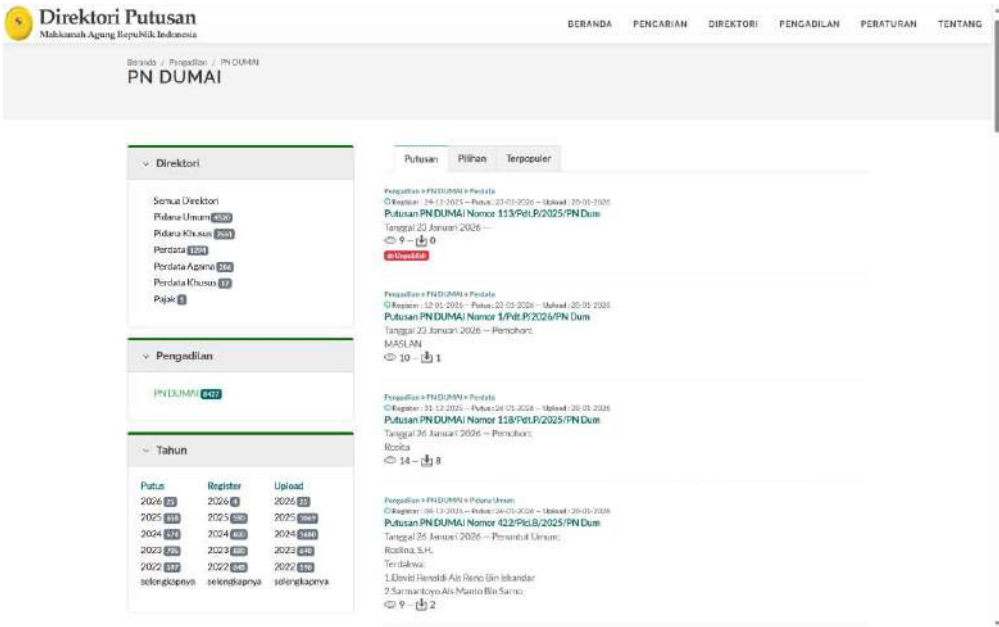
Penilaian indikator kinerja “persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan” bertujuan untuk mengukur sejauh mana putusan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dipublikasikan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>) sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik dan perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Putusan yang diunggah pada direktori putusan : Putusan perkara pidana dan perdata yang diunggah ke direktori putusan.
- Putusan yang telah diminutasi : Putusan perkara pidana dan perdata yang telah diminutasi.

Penilaian indikator kinerja ini dihimpun dan dihitung berdasarkan data yang tersedia pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat diakses melalui alamat <https://sipp.pn-dumai.go.id/> dan Direktori Putusan Mahkamah Agung yang dapat diakses melalui Alamat <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-dumai.html> serta konfirmasi dan validasi Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai formulir isian data kinerja yang telah disahkan.



Gambar III.1. Direktori Putusan Mahkamah Agung

Rincian realisasi putusan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang diunggah pada direktori putusan sebagai berikut :

BULAN	PUTUSAN YANG DIMINUTASI			PUTUSAN YANG DIUNGGAH KE DIREKTORI PUTUSAN			REALISASI
	PIDANA	PERDATA	TOTAL	PIDANA	PERDATA	TOTAL	
Januari	25	9	34	20	9	29	85,3%
Februari	43	19	62	48	19	67	108,1%
Maret	28	16	44	28	16	44	100%
April	21	7	28	21	7	28	100%
Mei	32	14	46	31	9	40	87%
Juni	43	13	56	44	13	57	101,8%
Juli	47	31	78	47	24	71	91%
Agustus	36	16	52	27	11	38	73,1%
September	54	29	83	45	29	74	89,2%
Oktober	51	21	72	60	19	79	109,7%
November	30	17	47	30	18	48	102,1%
Desember	60	21	81	60	21	81	100%
TOTAL	470	213	683	461	195	656	96,05%

Tabel III-18. Rincian realisasi putusan yang diunggah pada direktori putusan

Rekapitulasi realisasi putusan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang diunggah pada direktori putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

NO.	PERKARA	PUTUSAN YANG DIMINUTASI	PUTUSAN YANG DIUNGGAH KE DIREKTORI PUTUSAN	REALISASI
I.	PIDANA	470	461	98,09%
1.	Anak	9	9	100%
2.	Biasa	444	436	98,2%
3.	Singkat	-	-	N/A
4.	Cepat	11	10	90,91%
5.	Praperadilan	6	6	100%
II.	PERDATA	213	195	91,55%
1.	Permohonan	111	108	97,3%
2.	Permohonan Konsinyasi	12	0	0%
3.	Gugatan	72	71	98,61%
4.	Gugatan Sederhana	15	14	93,33%
5.	Perlawanan Putusan Verstek (Verzet Tegen Verstek)	1	1	100%
6.	Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)/ Perlawanan Pihak (Partij Verzet)	2	1	50%
TOTAL		683	656	96,05%

Tabel III-19. Rekapitulasi realisasi putusan yang diunggah pada direktori putusan

REALISASI : $\frac{656}{683} \times 100\% = 96,05\%$

TARGET : 93%

CAPAIAN : $\frac{96,05\%}{93\%} \times 100\% = 103,28\%$

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mampu merealisasikan kinerja pengunggahan putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 103,28% (seratus tiga koma dua puluh delapan persen). Faktor pendukung keberhasilan tersebut sebagai berikut :

- 1. Akselerasi kecepatan pemberkasan putusan (minutasi) sehingga memungkinkan putusan segera diunggah.
- 2. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses pengunggahan putusan.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pengunggahan putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung di tahun yang akan datang sehingga pelayanan peradilan dan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik.

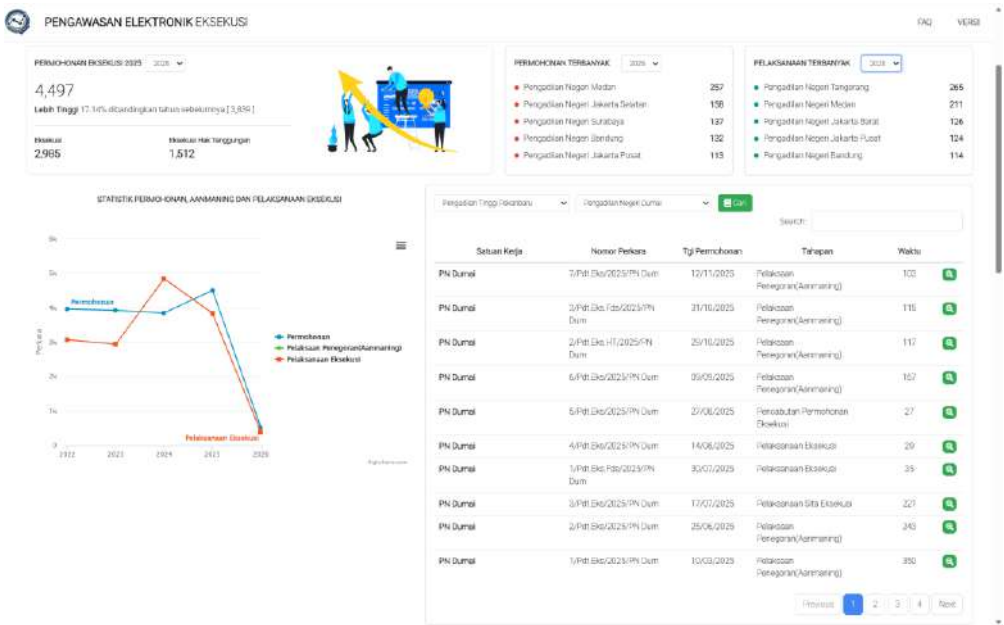
1.6. PERSENTASE PENYELESAIAN PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA

Penilaian indikator kinerja “persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata” bertujuan untuk memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan dan perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$$

Keterangan :
Permohonan eksekusi putusan perkara perdata yang diselesaikan : Permohonan eksekusi putusan perkara perdata yang diselesaikan meliputi yang berhasil dilaksanakan, dicabut, dan dicoret dari register termasuk *non executable*.
Putusan perkara perdata yang dimohonkan eksekusi : Permohonan eksekusi putusan perkara perdata pada tahun berjalan.

Penilaian indikator kinerja ini dihimpun dan dihitung berdasarkan data yang tersedia pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat diakses melalui alamat <https://sipp.pn-dumai.go.id/> dan Pengawasan elektronik eksekusi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (PERKUSI) yang dapat diakses melalui alamat <https://eksekusi.badilum.mahkamahagung.go.id/> serta konfirmasi dan validasi Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai formulir isian data kinerja yang telah disahkan.



Gambar III.2. Pengawasan elektronik eksekusi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (PERKUSI)

Rincian realisasi penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata sebagai berikut :

BULAN	PERMOHONAN EKSEKUSI	PERMOHONAN EKSEKUSI YANG DISELESAIKAN	REALISASI
Januari	-	-	N/A
Februari	-	-	N/A
Maret	1	-	N/A
April	-	-	N/A
Mei	-	-	N/A
Juni	1	-	0%
Juli	1	-	0%
Agustus	2	-	0%
September	1	2	200%
Oktober	-	-	N/A
November	1	-	0%
Desember	-	-	N/A
TOTAL	7	2	28,57%

Tabel III-20. Rincian realisasi penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Rekapitulasi realisasi penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata sebagai berikut :

NO.	PERKARA PERDATA	PERMOHONAN EKSEKUSI	PERMOHONAN EKSEKUSI YANG DISELESAIKAN	REALISASI
1.	Permohonan Konsinyasi	1	0	0%
2.	Gugatan	5	2	40%
3.	Gugatan Sederhana	1	0	0%
4.	Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)/ Perlawanan Pihak (Partij Verzet)	-	-	N/A
TOTAL		7	2	28,57%

Tabel III-21. Rekapitulasi realisasi penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

REALISASI : $\frac{2}{7} \times 100\% = 28,57\%$

TARGET : 28%

CAPAIAN : $\frac{28,57\%}{28\%} \times 100\% = 102,04\%$

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mampu merealisasikan kinerja penyelesaian permohonan eksekusi terhadap putusan perkara perdata melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 102,04% (seratus dua koma nol empat persen). Faktor pendukung keberhasilan tersebut sebagai berikut :

- 1. Optimalisasi mekanisme teguran (aanmaning) sebagai ruang negosiasi yang efektif sehingga termohon bersedia melaksanakan eksekusi secara sukarela tanpa perlu tindakan paksa.
- 2. Koordinasi lintas sectoral yang optimal dalam menjamin kelancaran proses pelaksanaan eksekusi.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja penyelesaian permohonan eksekusi terhadap putusan perkara perdata di tahun yang akan datang sehingga pelayanan peradilan dan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik.

1.7. PERSENTASE PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Penilaian indikator kinerja “persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif” bertujuan untuk mengukur ketaatan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
- :
- Keberhasilan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan, dan penjatuhan pidana percobaan atau pengawasan dan kerja sosial.
- Perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif
- :
- Perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

Penilaian indikator kinerja ini dihimpun dan dihitung berdasarkan data yang tersedia pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat diakses melalui alamat <https://sipp.pn-dumai.go.id/> serta konfirmasi dan validasi Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai formulir isian data kinerja yang telah disahkan.

Rincian realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai berikut :

BULAN	PERKARA YANG MEMENUHI KRITERIA PENERAPAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF	PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF	REALISASI
Januari	14	-	0%
Februari	9	-	0%
Maret	7	-	0%
April	6	-	0%
Mei	14	-	0%
Juni	7	-	0%
Juli	10	-	0%
Agustus	17	-	0%
September	6	-	0%
Oktober	7	-	0%
November	3	-	0%
Desember	12	3	25%
TOTAL	112	3	2,68%

Tabel III-22. Rincian realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Rekapitulasi realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai berikut :

NO.	PERKARA PIDANA	PERKARA YANG MEMENUHI KRITERIA PENERAPAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF	PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF	REALISASI
1.	Anak	3	-	0%
2.	Biasa	101	3	2,97%
3.	Singkat	-	-	N/A
4.	Cepat	8	-	0%
5.	Lalu Lintas	-	-	N/A
TOTAL		112	3	2,68%

Tabel III-23. Rekapitulasi realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

REALISASI : $\frac{3}{112} \times 100\% = 2,68\%$

TARGET : 2,6%

CAPAIAN : $\frac{2,68\%}{2,6\%} \times 100\% = 103,02\%$

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mampu merealisasikan kinerja perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 103,02% (seratus tiga koma nol dua persen). Keberhasilan tersebut didukung oleh peran aktif hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam memfasilitasi penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif di tahun yang akan datang sehingga pelayanan peradilan dan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik.

- 1.8. PERSENTASE PEKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI
- Penilaian indikator kinerja “persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi” bertujuan untuk mengukur ketaatan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menjalankan proses mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

- Keterangan :
- Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

: 1. Berhasil dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim;
2. Berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;
3. Berhasil didamaikan sebagian.
- Perkara yang wajib dilakukan mediasi

: Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak

Penilaian indikator kinerja ini dihimpun dan dihitung berdasarkan data yang tersedia pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat diakses melalui alamat <https://sipp.pn-dumai.go.id/> serta konfirmasi dan validasi Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai formulir isian data kinerja yang telah disahkan.

Rincian realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebagai berikut :

BULAN	PERKARA YANG WAJIB DILAKUKAN MEDIASI	PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI	REALISASI
Januari	-	-	N/A
Februari	3	-	0%
Maret	3	-	0%
April	6	-	0%
Mei	-	-	0%
Juni	3	-	N/A
Juli	4	2	50%
Agustus	3	1	33,3%
September	2	-	0%
Oktober	8	1	12,5%
November	2	2	100%
Desember	3	1	33,3%
TOTAL	37	7	18,92%

Tabel III-24. Rincian realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Rekapitulasi realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebagai berikut :

NO.	PERKARA PERDATA	PERKARA YANG WAJIB DILAKUKAN MEDIASI	PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI	REALISASI
1.	Gugatan	34	6	17,65%
2.	Perlawanan Putusan Verstek (Verzet Tegen Verstek)	1	1	100%
3.	Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)/ Perlawanan Pihak (Partij Verzet)	2	0	0%
TOTAL		37	7	18,92%

Tabel III-25. Rekapitulasi realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

REALISASI : $\frac{7}{37} \times 100\% = 18,92\%$

TARGET : 18%

CAPAIAN : $\frac{18,92\%}{18\%} \times 100\% = 105,11\%$

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mampu merealisasikan kinerja perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 105,11% (seratus lima koma sebelas persen). Keberhasilan tersebut didukung oleh profesionalisme dan kompetensi mediator (mediator hakim dan non-hakim) yang telah memiliki sertifikat khusus dan kemampuan komunikasi empatik dalam mengarahkan para pihak menuju perdamaian.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di tahun yang akan datang sehingga pelayanan peradilan dan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik.

1.9. PERSENTASE PERKARA ANAK YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI

Penilaian indikator kinerja “persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi” bertujuan untuk mengukur ketaatan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menjalankan proses diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$$

Keterangan :
Perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi : Perkara pidana anak yang telah selesai proses musyawarah diversi dan menghasilkan penetapan diversi berhasil dari Ketua Pengadilan.
Perkara anak yang telah selesai proses diversi : Perkara pidana anak yang telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.

Penilaian indikator kinerja ini dihimpun dan dihitung berdasarkan data yang tersedia pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat diakses melalui alamat <https://sipp.pn-dumai.go.id/> serta konfirmasi dan validasi Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai formulir isian data kinerja yang telah disahkan.

Rincian realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi sebagai berikut :

BULAN	PERKARA ANAK YANG TELAH SELESAI PROSES DIVERSI	PERKARA ANAK YANG BERHASIL DISELESAIKAN SECARA DIVERSI	REALISASI
Januari	-	-	N/A
Februari	-	-	N/A
Maret	-	-	N/A
April	-	-	N/A
Mei	-	-	N/A
Juni	-	-	N/A
Juli	-	-	N/A
Agustus	-	-	N/A
September	-	-	N/A

BULAN	PERKARA ANAK YANG TELAH SELESAI PROSES DIVERSI	PERKARA ANAK YANG BERHASIL DISELESAIKAN SECARA DIVERSI	REALISASI
Oktober	-	-	N/A
November	-	-	N/A
Desember	-	-	N/A
TOTAL	-	-	N/A

Tabel III-26. Rincian realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Rekapitulasi realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi sebagai berikut :

NO.	PERKARA PIDANA	PERKARA ANAK YANG TELAH SELESAI PROSES DIVERSI	PERKARA ANAK YANG BERHASIL DISELESAIKAN SECARA DIVERSI	REALISASI
1.	Anak	-	-	N/A
TOTAL		-	-	N/A

Tabel III-27. Rekapitulasi realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi

REALISASI : $\frac{-}{-} \times 100\% = \text{N/A}$

TARGET : 50%

CAPAIAN : $\frac{\text{N/A}}{50\%} \times 100\% = \text{N/A}$

Tidak ada perkara pidana anak yang diajukan untuk diselesaikan secara diversi sepanjang tahun 2025, sehingga Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tidak dapat merealisasikan kinerja tersebut.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan secara diversi di tahun yang akan datang sehingga pelayanan peradilan dan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik.

1.10. PERSENTASE PERKARA PERDATA TINGKAT PERTAMA YANG MENGGUNAKAN E-COURT

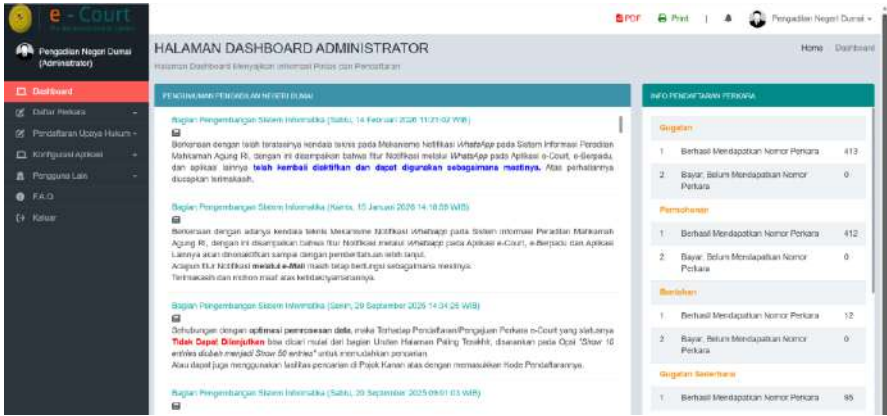
Penilaian indikator kinerja “persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan E-Court” bertujuan untuk mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik melalui E-Court (<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>) dan perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court
- :
- Perkara perdata yang diajukan menggunakan e-Court.
- Perkara perdata tingkat pertama yang diajukan
- :
- Perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan.

Penilaian indikator kinerja ini dihimpun dan dihitung berdasarkan data yang tersedia pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat diakses melalui alamat <https://sipp.pn-dumai.go.id/> dan E-Court Mahkamah Agung yang dapat diakses melalui alamat <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> serta konfirmasi dan validasi Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai formulir isian data kinerja yang telah disahkan.



Gambar III.3. E-Court Mahkamah Agung

Rincian realisasi perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan E-Court sebagai berikut :

BULAN	PERKARA PERDATA YANG DIAJUKAN	PERKARA PERDATA YANG DIAJUKAN MENGGUNAKAN E-COURT	REALISASI
Januari	13	13	100%
Februari	29	29	100%
Maret	15	15	100%
April	13	8	61,5%
Mei	11	11	100%
Juni	23	16	69,6%
Juli	13	13	100%
Agustus	29	29	100%
September	26	26	100%
Oktober	26	26	100%
November	17	17	100%
Desember	20	20	100%
TOTAL	235	223	94,89%

Tabel III-28. Rincian realisasi perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan E-Court

Rekapitulasi realisasi perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan E-Court sebagai berikut :

NO.	PERKARA PERDATA	PERKARA PERDATA YANG DIAJUKAN	PERKARA PERDATA YANG DIAJUKAN MENGGUNAKAN E-COURT	REALISASI
1.	Permohonan	109	109	100%
2.	Permohonan Konsinyasi	21	9	42,86%
3.	Gugatan	87	87	100%
4.	Gugatan Sederhana	15	15	100%

NO.	PERKARA PERDATA	PERKARA PERDATA YANG DIAJUKAN	PERKARA PERDATA YANG DIAJUKAN MENGGUNAKAN E-COURT	REALISASI
5.	Perlawanan Putusan Verstek (Verzet Tegen Verstek)	1	1	100%
6.	Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)/ Perlawanan Pihak (Partij Verzet)	2	2	100%
TOTAL		235	223	94,89%

Tabel III-29. Rekapitulasi realisasi perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan E-Court

REALISASI : $\frac{223}{235} \times 100\% = 94,89\%$

TARGET : 94%

CAPAIAN : $\frac{94,89\%}{94\%} \times 100\% = 100,95\%$

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mampu merealisasikan kinerja perkara perdata yang diajukan menggunakan E-Court melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 100,95% (seratus koma sembilan puluh lima persen). Faktor pendukung keberhasilan tersebut sebagai berikut:

- 1. Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal.
- 2. Pengembangan dan penyempurnaan fitur aplikasi secara berkala oleh Tim Development Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja perkara perdata yang diajukan menggunakan E-Court di tahun yang akan datang sehingga pelayanan peradilan dan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik.

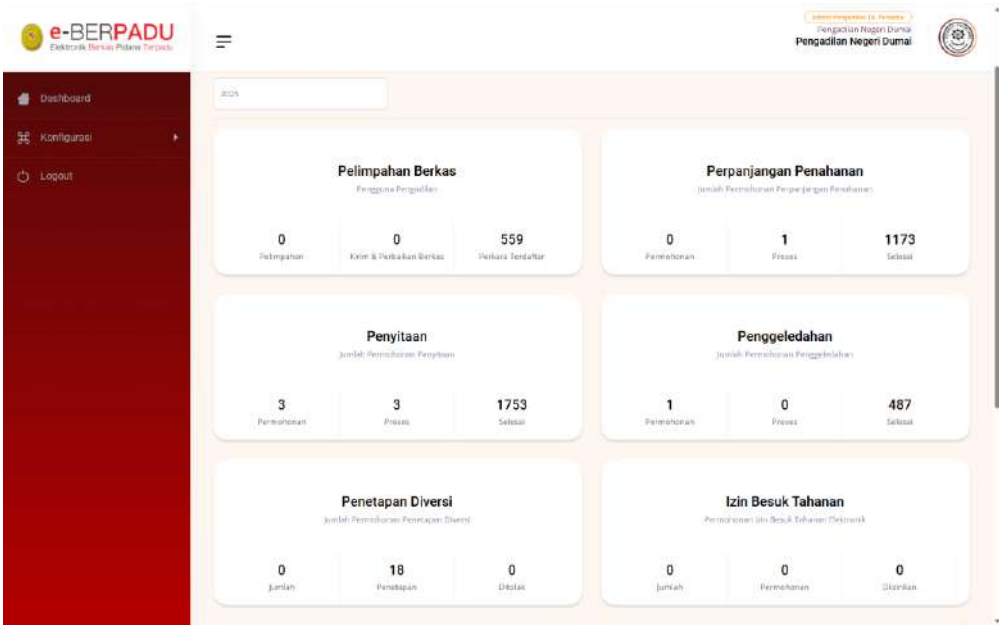
1.11. PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DILIMPAHKAN SECARA ELEKTRONIK (E-BERPADU)

Penilaian indikator kinerja “persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)” bertujuan untuk mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui E-Berpadu (<https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/>) dan perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$$

Keterangan :
Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik : Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu.
Perkara pidana yang dilimpahkan : Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.

Penilaian indikator kinerja ini dihimpun dan dihitung berdasarkan data yang tersedia pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat diakses melalui alamat <https://sipp.pn-dumai.go.id/> dan Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) Mahkamah Agung yang dapat diakses melalui alamat <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/> serta konfirmasi dan validasi Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai formulir isian data kinerja yang telah disahkan.



Gambar III.4. Pelimpahan berkas perkara pidana pada Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu)

Rincian realisasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu) sebagai berikut :

BULAN	PERKARA PIDANA YANG DILIMPAHKAN	PERKARA PIDANA YANG DILIMPAHKAN SECARA ELEKTRONIK (E-BERPADU)	REALISASI
Januari	31	29	93,5%
Februari	33	32	97%
Maret	34	33	97,1%
April	23	23	100%
Mei	52	52	100%
Juni	42	41	97,6%
Juli	43	43	100%
Agustus	36	34	94,4%
September	54	53	98,1%
Oktober	51	50	98%
November	30	29	96,7%
Desember	37	35	94,6%
TOTAL	466	454	97,42%

Tabel III-30. Rincian realisasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)

Rekapitulasi realisasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu) sebagai berikut :

NO.	PERKARA PIDANA	PERKARA PIDANA YANG DILIMPAHKAN	PERKARA PIDANA YANG DILIMPAHKAN SECARA ELEKTRONIK (E-BERPADU)	REALISASI
1.	Anak	9	9	100%
2.	Biasa	447	445	99,55%
3.	Singkat	-	-	N/A
4.	Cepat	10	-	0%
TOTAL		466	454	97,42%

Tabel III-31. Rekapitulasi realisasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)

REALISASI : $\frac{454}{466} \times 100\% = 97,42\%$

TARGET : 96%

CAPAIAN : $\frac{97,42\%}{96\%} \times 100\% = 101,48$

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mampu merealisasikan kinerja perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu) melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 101,48% (seratus satu koma empat puluh delapan persen). Faktor pendukung keberhasilan tersebut sebagai berikut :

- 1. Optimalisasi implementasi E-Berpadu memangkas prosedur birokrasi pelimpahan berkas perkara sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendaftaran berkas perkara.
- 2. Pemanfaatan E-Berpadu secara optimal oleh aparat penegak hukum sehingga berkas perkara dapat diproses secara efisien.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu) di tahun yang akan datang sehingga pelayanan peradilan dan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik.

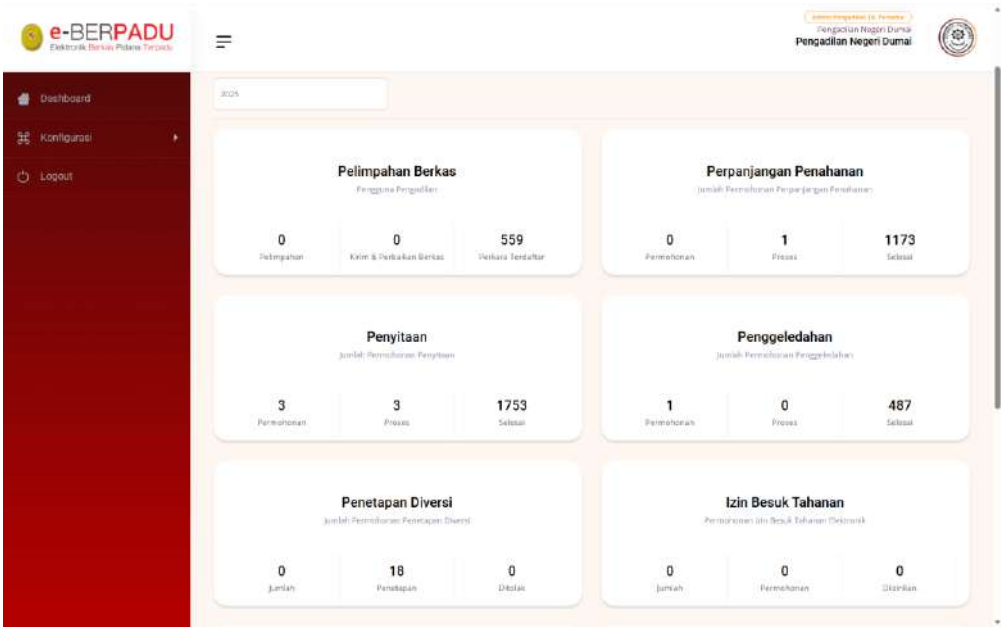
1.12. PERSENTASE LAYANAN PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK (E-BERPADU)

Penilaian indikator kinerja “persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)” bertujuan untuk mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui E-Berpadu (<https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/>) dan perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$$

Keterangan :
Layanan perkara pidana : Layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll).
Layanan perkara pidana : Layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.

Penilaian indikator kinerja ini dihimpun dan dihitung berdasarkan data yang tersedia pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat diakses melalui alamat <https://sipp.pn-dumai.go.id/> dan Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) Mahkamah Agung yang dapat diakses melalui alamat <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/> serta konfirmasi dan validasi Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai formulir isian data kinerja yang telah disahkan.



Gambar III.5. Layanan perkara pidana pada Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu)

Rincian realisasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) sebagai berikut :

BULAN	LAYANAN PERKARA PIDANA	LAYANAN PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK (E-BERPADU)	REALISASI
Januari	91	91	100%
Februari	95	95	100%
Maret	112	112	100%
April	87	87	100%
Mei	84	84	100%
Juni	104	104	100%
Juli	86	86	100%
Agustus	83	83	100%
September	123	123	100%
Oktober	109	109	100%
November	79	79	100%
Desember	107	107	100%
TOTAL	1.160	1.160	100%

Tabel III-32. Rincian realisasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)

Rekapitulasi realisasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) sebagai berikut :

NO.	LAYANAN PERKARA PIDANA	JUMLAH LAYANAN PERKARA PIDANA	JUMLAH LAYANAN PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK (E-BERPADU)	REALISASI
1.	Izin Penggeledahan	158	158	100%
2.	Izin Penyitaan	540	540	100%
3.	Perpanjangan Penahanan (PN, PT, MA)	450	450	100%
4.	Izin Besuk Tahanan	-	-	N/A
5.	Izin Keluar Tahanan	-	-	N/A
6.	Izin Pinjam Pakai Barang Bukti	1	1	100%
7.	Pengalihan Penahanan	-	-	N/A
8.	Penangguhan Penahanan	-	-	N/A
9.	Pendaftaran Praperadilan	6	6	100%
10.	Pembantaran	-	-	N/A
11.	Penetapan Diversi	5	5	100%
12.	Pindah Tempat Sidang	-	-	N/A
TOTAL		1.160	1.160	100%

Tabel III-33. Rekapitulasi realisasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)

REALISASI : $\frac{1.160}{1.160} \times 100\% = 100\%$

TARGET : 99%

CAPAIAN : $\frac{100\%}{99\%} \times 100\% = 101,01\%$

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mampu merealisasikan kinerja layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 101,01% (seratus satu koma nol satu persen). Faktor pendukung keberhasilan tersebut sebagai berikut :

1. Penggunaan Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) secara optimal dan terintegrasi dapat mempercepat pertukaran dokumen antar penegak hukum.
2. Sosialisasi berkelanjutan terhadap penggunaan layanan pidana melalui E-Berpadu kepada masyarakat.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) di tahun yang akan datang sehingga pelayanan peradilan dan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik.

2. MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK
- Sasaran strategis 2 “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” bertujuan untuk memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA melalui sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9	3,91	100,38%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-2			100,38%

Tabel III-34. Capaian kinerja sasaran strategis 2 : “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik”

Sasaran strategis 2 “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” memiliki 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian diuraikan sebagai berikut :

2.1. INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN BERDASARKAN STANDAR LAYANAN YANG DITETAPKAN

Penilaian indikator kinerja “indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan” bertujuan untuk mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan dan perhitungannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan variabel pengukuran sebagai berikut :

NO.	VARIABEL	DESKRIPSI
1.	Persyaratan	Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2.	Prosedur	Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3.	Waktu Pelayanan	jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4.	Biaya/Tarif	Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

NO.	VARIABEL	DESKRIPSI
7.	Perilaku Pelaksana	Sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9.	Sarana dan Prasarana	Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Tabel III-35. Variabel pengukuran survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik

Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 (sembilan) item dengan 4 (empat) opsi jawaban menggunakan skala Likert dengan skor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dan kemudian dikonversi ke dalam skala 100 (seratus) yang ditentukan sebagai berikut :

NO.	MUTU LAYANAN	NORMA SKOR	
		SKALA 100	SKALA 4
1.	A (Sangat Baik)	88,31 – 100	3,524 – 4
2.	B (Baik)	76,61 – 88,3	3,0644 – 3,532
3.	C (Kurang Baik)	65 – 76,6	2,6 – 3,064
4.	D (Tidak Baik)	25 – 64,99	1 – 2,5996

Tabel III-36. Skor mutu layanan pengukuran survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik

Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau per triwulan dengan cara pengisian kuisisioner yang dibagikan kepada responden yang diselenggarakan oleh Tim Survey yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Penilaian indikator kinerja ini dihimpun dan dihitung berdasarkan data yang tersedia pada aplikasi siSUPER yang dapat diakses melalui alamat <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/400327> serta konfirmasi dan validasi Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai formulir isian data kinerja yang telah disahkan.

Rincian realisasi indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai berikut :

TRIWULAN	NILAI SKOR
I	3,947
II	3,894
III	3,907
IV	3,911
RATA-RATA	3,9148

Tabel III-37. Rincian realisasi indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

Rekapitulasi realisasi indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai berikut :

NO.	KRITERIA	NILAI SKOR			
		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1.	Persyaratan	3,93	3,87	3,85	3,81
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	4	3,9	3,88	3,88
3.	Waktu penyelesaian	3,93	3,87	3,9	3,96
4.	Biaya/tarif	3,88	3,87	3,9	3,92
5.	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,93	3,87	3,94	3,93
6.	Kompetensi pelaksana	3,96	3,9	3,91	3,93
7.	Perilaku pelaksana	3,93	3,87	3,9	3,86
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,96	3,9	3,91	3,91
9.	Sarana dan prasarana	4	4	3,97	4
RATA-RATA		3,947	3,894	3,907	3,911
		3,9148			

Tabel III-38. Rekapitulasi realisasi indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

REALISASI : 3,9148

TARGET : 3,9

CAPAIAN : $\frac{3,9148}{3,9} \times 100\% = 100,38\%$

Berdasarkan data tersebut diatas, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA secara rata-rata bernilai 3,9148 dan berada pada pada kategori “Sangat Baik” karena berada pada interval antara 3,524 – 4.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja layanan di tahun yang akan datang sehingga pelayanan peradilan dan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik.

3. TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

Sasaran strategis 3 “Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional” bertujuan untuk memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA melalui sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79	80,5	101,9%
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327)	87	87,75	100,87%
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328)	87	87,48	100,56%
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	97	100	103,09%
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	85	85	100%
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,25	101,56%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-3			101,33%

Tabel III-39. Capaian kinerja sasaran strategis 3 : “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional”

Sasaran strategis 3 “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” memiliki 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian diuraikan sebagai berikut :

3.1. INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN) SATUAN KERJA PENGADILAN

Penilaian indikator kinerja “indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan” bertujuan untuk menilai penerapan sistem merit dalam manajemen ASN yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan tanpa diskriminasi sesuai ketentuan dan perhitungannya dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dengan variabel pengukuran sebagai berikut :

NO.	KRITERIA	BOBOT	DESKRIPSI
1.	Kualifikasi	25%	Mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.
2.	Komptetensi	40%	Mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.
3.	Kinerja	30%	Mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau satuan kerja dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
4.	Disiplin	5%	Mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Tabel III-40. Kriteria dan bobot pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara

Setiap indikator pengukuran kriteria mempunyai bobot nilai sebagai berikut:

NO.	NILAI	SEBUTAN
1.	91 – 100	Sangat Tinggi
2.	81 – 90	Tinggi
3.	71 – 80	Sedang
4.	61 – 70	Rendah
5.	60 ke bawah	Sangat Rendah

Tabel III-41. Skor nilai pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara

Indikator yang digunakan dalam menghitung setiap dimensi kriteria pengukuran diuraikan sebagai berikut :

NO.	DIMENSI	INDIKATOR	INSTRUMEN	BOBOT NILAI
1.	Kualifikasi (25%)	Jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS	Pendidikan S-3 (Strata Tiga)	25
			Pendidikan S-2 (Strata Dua)	20

NO.	DIMENSI	INDIKATOR	INSTRUMEN	BOBOT NILAI
			Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat)	15
			Pendidikan D-III (Diploma Tiga)	10
			Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat	5
			Di bawah SLTA	1
2.	Kompetensi (40%)	Riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas diklat kepemimpinan, fungsional, teknis, dan seminar/workshop/ magang/kursus/ sejenisnya	PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki	15
			PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki	0
			PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki	15
			PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki	0
			PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	15
			PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang	0

NO.	DIMENSI	INDIKATOR	INSTRUMEN	BOBOT NILAI
			mendukung tugas dan fungsi jabatannya	
			PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir	22,5
			PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir	0
			PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	10
			PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	0
			PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	17,5
			PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	0

NO.	DIMENSI	INDIKATOR	INSTRUMEN	BOBOT NILAI
3.	Kinerja (30%)	Riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP)	Nilai kinerja 90 – 100	30
			Nilai kinerja 76 – 90	25
			Nilai kinerja 61 – 75	15
			Nilai kinerja 51 – 60	5
			Nilai kinerja 50 ke bawah	1
4.	Disiplin (5%)	Data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat	Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin	5
			Dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan	3
			Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang	2
			Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat	1

Tabel III-42. Indikator dan bobot pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara

Penilaian indikator kinerja ini dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dihimpun dan dihitung secara sistematis menggunakan aplikasi MYASN yang dapat diakses melalui alamat <https://myasn.bkn.go.id/layanan-asn/indeks-profesionalitas> dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung yang dapat diakses melalui alamat <https://sikep.mahkamahagung.go.id/> serta konfirmasi dan validasi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai formulir isian data kinerja yang telah disahkan.



Gambar III.6. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung

Rincian realisasi indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN		NILAI				TOTAL
		NAMA	KELOMPOK	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	
1.	Maulia Martwenty Ine, S.H., M.H.	Ketua	Pimpinan Tinggi	25	40	30	5	100
2.	Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.	Hakim	Fungsional	20	30	25	5	80
3.	Hamdan Saripudin, S.H.	Hakim	Fungsional	20	20	25	5	70
4.	Nurafriani Putri, S.H., M.H.	Hakim	Fungsional	25	30	25	5	85
5.	Antoni Trivolta, S.H.	Hakim	Fungsional	20	35	25	3	83

NO.	NAMA	JABATAN		NILAI				TOTAL
		NAMA	KELOMPOK	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	
6.	Dicki Irvandi, S.H., M.H.	Hakim	Fungsional	25	35	25	5	90
7.	Rina Yose, S.H.	Hakim	Fungsional	20	35	25	5	85
8.	Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn.	Hakim	Fungsional	25	35	25	5	90
9.	Samsyir Sihombing, S.H.	Panitera	Administrator	20	20	25	5	70
10.	Ade Junaedy, S.T., M.Si.	Sekretaris	Administrator	25	30	25	5	85
11.	Sapriono, S.H., M.H.	Panitera Muda	Pengawas	25	20	25	5	75
12.	Zainal Abidin, S.H.	Panitera Muda	Pengawas	20	20	25	5	70
13.	Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H.	Panitera Muda	Pengawas	25	20	25	5	75
14.	Ibrahim Makmur, S.T.	Kepala Sub Bagian	Pengawas	25	35	25	5	90
15.	Heru Saputra, S.T.	Kepala Sub Bagian	Pengawas	25	35	30	5	95
16.	Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.	Panitera Pengganti	Fungsional	25	20	25	5	75
17.	Parlianto	Panitera Pengganti	Fungsional	10	20	25	5	60
18.	Reski Hakiki, S.H.	Panitera Pengganti	Fungsional	20	30	25	5	80
19.	Lia Debora, A. Md.	Jurusita	Fungsional	25	30	25	5	85
20.	Heri Dwi Putra	Jurusita	Fungsional	20	20	25	5	70
21.	Taufik Isnaini, S.T.	Pranata Komputer	Fungsional	20	30	30	5	85
22.	Irma Yunita, S.AP.	Pranata Keuangan APBN Mahir	Fungsional	25	40	30	5	100
23.	Fransisca Juwita Arinda Ariesty, A.Md.A.P.	Arsiparis Terampil	Fungsional	25	35	30	5	95
24.	Hotma Rezeki Sinaga, S.E.	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	25	35	25	5	90
25.	Mella Anggraini, S.H.	Klerek – Analis Perkara Peradilan	Pelaksana	25	25	25	5	80
26.	Dinia Joyanda Putri, S.H.	Klerek – Analis Perkara Peradilan	Pelaksana	25	25	25	5	80
27.	Iffana Hayu, S.H.	Klerek – Analis Perkara Peradilan	Pelaksana	25	25	25	5	80
28.	Muhammad Kahirul Fikhri, S.H.	Klerek – Analis Perkara Peradilan	Pelaksana	25	25	25	5	80
29.	Apriyani Saragih, A.Md., S.E.	Operator – Penata Layanan Operasional	Pelaksana	25	35	25	5	90
30.	Belsazar Jose Tua, S.T.	Teknisi Sarana Prasarana	Pelaksana	25	25	25	5	80
31.	Rimma Itasari Nababan, S.H.	Klerek – Analis Perkara Peradilan	Pelaksana	25	30	30	5	90
32.	Agnes Angelina Siallagan, S.H.	Klerek – Analis Perkara Peradilan	Pelaksana	25	25	25	5	80
33.	Nindy Elisa, A.Md.	Klerek – Pengelola Penanganan Perkara	Pelaksana	25	20	25	5	75
34.	Felistya Natalia, A.Md.A.B.	Klerek – Pengelola Penanganan Perkara	Pelaksana	25	20	25	5	75
35.	Rina Winda, A.Md.	Klerek – Dokumentalis Hukum	Pelaksana	25	25	25	5	80
36.	Melani, A.Md.Kom.	Klerek – Dokumentalis Hukum	Pelaksana	25	25	25	5	80
37.	Santa Laura P.O. Tampubolon, A.Md.T.	Klerek – Dokumentalis Hukum	Pelaksana	25	25	25	5	80
38.	Cindy Theresia Tiomely Br Sitanggang, A.Md.	Klerek – Dokumentalis Hukum	Pelaksana	25	25	25	5	80

NO.	NAMA	JABATAN		NILAI				TOTAL
		NAMA	KELOMPOK	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	
39.	Leny Sepryanti, S.H.	Operator – Penata Layanan Operasional	Pelaksana	25	35	25	5	90
40.	Septi Wulandari SJ, S.Kom.	Operator – Penata Layanan Operasional	Pelaksana	25	35	25	5	90
41.	Masrida Hasibuan	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	20	35	25	5	85
42.	Ermince Yoseva Manik	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	20	30	25	5	80
43.	Hidayat	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	20	30	25	5	80
44.	Elfrida Fransisca Angelina Siregar	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	20	35	25	5	85
45.	Budianto	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	20	40	30	5	90
46.	Rahmat	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	20	35	25	5	85
47.	Nursakinah Muharromi	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	20	30	25	5	80
48.	Ari Jondra Volta	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	20	35	25	5	85
49.	Risdianto	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	20	35	25	5	85
50.	Yuyu Oktaliora	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	20	35	25	5	85
RATA-RATA				22,5	27	26	5	80,5

Tabel III-43. Rincian realisasi indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

Rekapitulasi realisasi indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai berikut :

NO.	KRITERIA	NILAI
1.	Kualifikasi	22,5
2.	Kompetensi	27
3.	Kinerja	26
4.	Disiplin	5
INDEKS IP ASN		80,5

Tabel III-44. Rekapitulasi realisasi indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

REALISASI : 80,5

TARGET : 79

CAPAIAN : $\frac{80,5}{79} \times 100\% = 101,9\%$

Berdasarkan data tersebut diatas, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA bernilai 79,81 dan berada pada pada kategori “Sedang” karena berada pada interval antara 71 – 80.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin aparatur di tahun yang akan datang sehingga profesionalitas aparatur dapat berdampak positif terhadap pelayanan peradilan dan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik.

3.2. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SATUAN KERJA PENGADILAN (DIPA 005.01.400327)

Penilaian indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327)” bertujuan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia dan perhitungannya dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dengan variabel pengukuran sebagai berikut :

NO.	ASPEK/INDIKATOR	BOBOT
I.	Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran	
1.	Revisi DIPA	10%
2.	Deviasi halaman III DIPA	15%
II.	Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran	
1.	Penyerapan anggaran	20%
2.	Belanja kontraktual	10%
3.	Penyelesaian tagihan	10%
4.	Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP)	10%
5.	Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)	Menjadi pengurang nilai IKPA
III.	Kualitas hasil pelaksanaan anggaran	
1.	Capaian <i>output</i>	25%
	TOTAL	100%

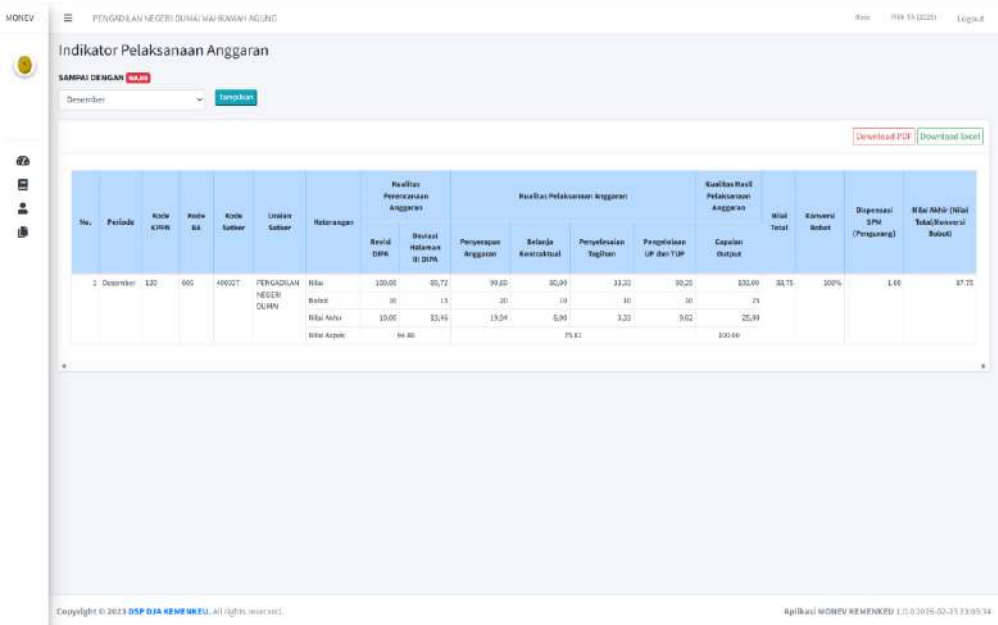
Tabel III-45. Aspek dan bobot penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan penjumlahan hasil pembobotan masing-masing indikator (revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan capaian output) dikurangi dengan indikator Dispensasi SPM yang dikategorikan menjadi :

NO.	KATEGORI	NILAI
1.	Sangat Baik	≥ 95
2.	Baik	≥ 89 dan < 95
3.	Cukup	≥ 70 dan < 89
4.	Kurang	< 70

Tabel III-46. Kategori dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)

Penilaian indikator kinerja ini dilakukan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dihimpun dan dihitung secara sistematis menggunakan aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan yang dapat diakses melalui alamat <https://monev.kemenkeu.go.id/> serta konfirmasi dan validasi Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai formulir isian data kinerja yang telah disahkan.



Gambar III.7. Nilai IKPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.01.400327) pada Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan

Rincian realisasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.01.400327) sebagai berikut :

NO.	BULAN	NILAI IKPA
1.	Januari	100
2.	Februari	100
3.	Maret	100
4.	April	96,92
5.	Mei	98,14
6.	Juni	100
7.	Juli	98,61
8.	Agustus	99,05
9.	September	96,22
10.	Oktober	95,47
11.	November	95,45
12.	Desember	87,75

Tabel III-47. Rincian realisasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.01.400327)

Rekapitulasi realisasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.01.400327) sebagai berikut :

NO.	ASPEK/INDIKATOR	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR
I.	Kualitas Perencanaan Anggaran			
1.	Revisi DIPA	100	10%	10
2.	Deviasi Halaman III DIPA	89,72	15%	13,46
II.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran			
1.	Penyerapan Anggaran	99,69	20%	19,94
2.	Belanja Konstruktual	80	10%	8
3.	Penyelesaian Tagihan	33,33	10%	3,33
4.	Pengelolaan UP dan TUP	90,25	10%	9,02
III.	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran			
1.	Capaian Output	100	20%	25
NILAI TOTAL				88,75
KONVERSI BOBOT				100%
PENGURANG (Dispensasi SPM)				1
NILAI AKHIR				87,75

Tabel III-48. Rekapitulasi realisasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.01.400327)

REALISASI : 87,75

TARGET : 87

CAPAIAN : $\frac{87,75}{87} \times 100\% = 100,87\%$

Berdasarkan data tersebut diatas, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.01.400327) bernilai 87,75 dan berada pada pada kategori “Cukup” karena berada pada interval antara 70 – 88.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran di tahun yang akan datang sehingga pelayanan peradilan dan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik.

3.3. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SATUAN KERJA PENGADILAN (DIPA 005.03.400328)

Penilaian indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328)” bertujuan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia dan perhitungannya dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Penilaian indikator kinerja ini dilakukan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dihimpun dan dihitung secara sistematis menggunakan aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan yang dapat diakses melalui alamat <https://monev.kemenkeu.go.id/> serta konfirmasi dan validasi Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai formulir isian data kinerja yang telah disahkan.

No.	Periode	Kode KPA	Kode SA	Kode Subter	Unit	Subter	Hutang	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Realisasi Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Kategori	Stabilitas SPN (Pengantar)	Nilai Akhir (Nilai Total Revisi)
								Realisasi DIPA	Realisasi Hutan DIPA	Persentase Anggaran	Selanjutnya	Pengeluaran Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP	Capaian Output	Capaian				
1	Desember	005	005	400327	PENGADILAN NEGERI DUMAI	Revisi	100,00	90,72	90,72	90,72	90,72	90,72	90,72	90,72	90,72	90,72	90,72	90,72	90,72
						Revisi	10	15	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
						Revisi Akhir	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
						Revisi Akhir	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Gambar III.8. Nilai IKPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.03.400328) pada Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan

Rincian realisasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.03.400328) sebagai berikut :

NO.	BULAN	NILAI IKPA
1.	Januari	100
2.	Februari	100
3.	Maret	100
4.	April	89,12
5.	Mei	89,33
6.	Juni	87,77
7.	Juli	87,03
8.	Agustus	86,43
9.	September	85,63
10.	Oktober	86,74
11.	November	87,67
12.	Desember	87,48

Tabel III-49. Rincian realisasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.03.400328)

Rekapitulasi realisasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.03.400328) sebagai berikut :

NO.	ASPEK/INDIKATOR	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR
I.	Kualitas Perencanaan Anggaran			
1.	Revisi DIPA	100	10%	10
2.	Deviasi Halaman III DIPA	58,26	15%	8,74
II.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran			
1.	Penyerapan Anggaran	90,73	20%	18,15
2.	Belanja Kontraktual	0	0%	0
3.	Penyelesaian Tagihan	0	0%	0
4.	Pengelolaan UP dan TUP	81,02	10%	8,1
III.	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran			
1.	Capaian Output	100	20%	25
NILAI TOTAL				69,99
KONVERSI BOBOT				80%
PENGURANG (Dispensasi SPM)				0
NILAI AKHIR				87,48

Tabel III-50. Rekapitulasi realisasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.03.400328)

REALISASI : 87,48

TARGET : 87

CAPAIAN : $\frac{87,48}{87} \times 100\% = 100,56\%$

Berdasarkan data tersebut diatas, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.03.400328) bernilai 87,48 dan berada pada pada kategori “Cukup” karena berada pada interval antara 70 – 88.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran di tahun yang akan datang sehingga pelayanan peradilan dan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik.

3.4. NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (DIPA 005.01.400327)

Penilaian indikator kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)” bertujuan untuk menilai kualitas perencanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia dan perhitungannya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pemantauan, serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/MK/AG/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pemantauan, serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran dengan variabel pengukuran sebagai berikut :

NO.	VARIABEL/INDIKATOR	BOBOT
I.	Efektivitas	
1.	Capaian RO	75%
II.	Efisiensi	
1.	Penggunaan SBK	10%
2.	Efisiensi SBK	15%
TOTAL		100%

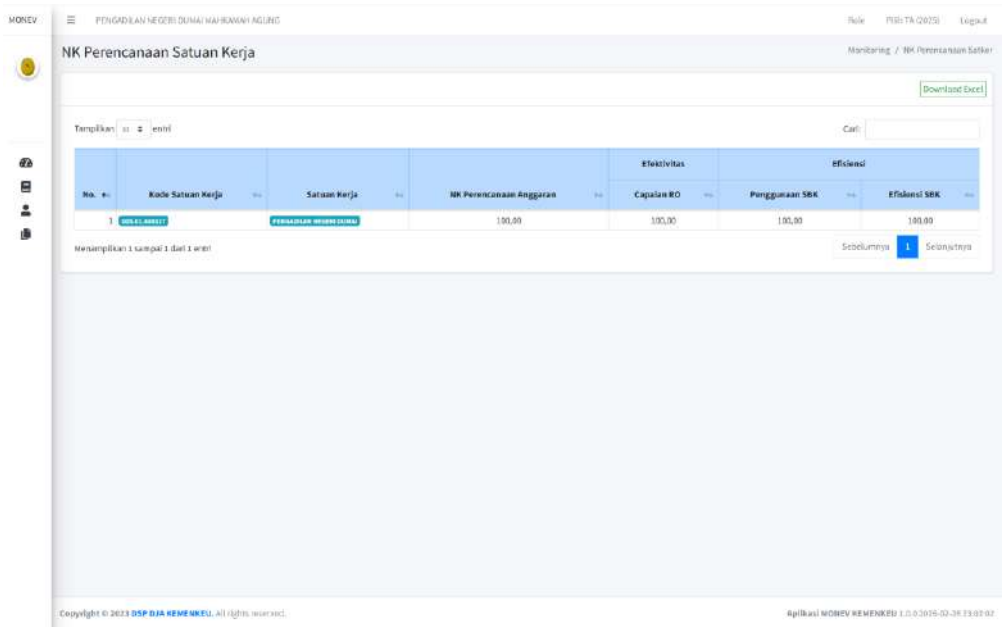
Tabel III-51. Variabel dan bobot penilaian indeks perencanaan anggaran

Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan penjumlahan hasil pembobotan masing-masing indikator yang dikategorikan menjadi :

NO.	KATEGORI	NILAI
1.	Sangat Baik	≥ 91
2.	Baik	81 – 90
3.	Cukup	61 – 80
4.	Kurang	51 – 60
5.	Sangat Kurang	≤ 50

Tabel III-52. Kategori dan nilai indeks perencanaan anggaran

Penilaian indikator kinerja ini dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran yang dihimpun dan dihitung secara sistematis menggunakan aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan yang dapat diakses melalui alamat <https://monev.kemenkeu.go.id/> serta konfirmasi dan validasi Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai formulir isian data kinerja yang telah disahkan.



Gambar III.9. Nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.01.400327) pada Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan

Rekapitulasi realisasi nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.01.400327) sebagai berikut :

NO.	VARIABEL/INDIKATOR	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR
I.	Efektivitas			
1.	Capaian RO	100	75%	75
II.	Efisiensi			
1.	Penggunaan SBK	100	10%	10
2.	Efisiensi SBK	100	15%	15
NILAI AKHIR				100

Tabel III-53. Rekapitulasi realisasi nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.01.400327)

REALISASI : 100

TARGET : 97

CAPAIAN : $\frac{100}{97} \times 100\% = 103,9\%$

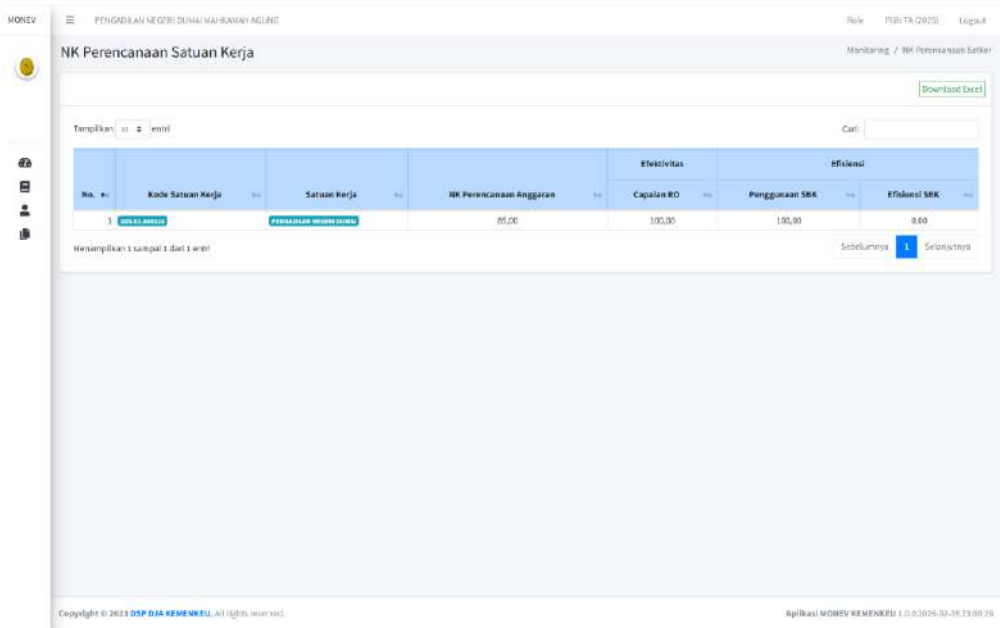
Berdasarkan data tersebut diatas, nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.01.400327) bernilai 100 dan berada pada pada kategori “Sangat Baik” karena berada pada interval ≥ 91 .

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja perencanaan anggaran di tahun yang akan datang sehingga pelayanan peradilan dan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik.

3.5. NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (DIPA 005.03.400328)

Penilaian indikator kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)” bertujuan untuk menilai kualitas perencanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia dan perhitungannya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pemantauan, serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/MK/AG/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pemantauan, serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Penilaian indikator kinerja ini dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran yang dihimpun dan dihitung secara sistematis menggunakan aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan yang dapat diakses melalui alamat <https://monev.kemenkeu.go.id/> serta konfirmasi dan validasi Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai formulir isian data kinerja yang telah disahkan.



Gambar III.10. Nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.03.400328) pada Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan

Rekapitulasi realisasi nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.03.400328) sebagai berikut :

NO.	VARIABEL/INDIKATOR	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR
I.	Efektivitas			
1.	Capaian RO	100	75%	75
II.	Efisiensi			
1.	Penggunaan SBK	100	10%	10
2.	Efisiensi SBK	0	15%	0
NILAI AKHIR				85

Tabel III-54. Rekapitulasi realisasi nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.03.400328)

REALISASI : 85

TARGET : 85

CAPAIAN : $\frac{85}{85} \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan data tersebut diatas, nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (DIPA 005.03.400328) bernilai 85 dan berada pada pada kategori “Baik” karena berada pada interval 81 – 90.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja perencanaan anggaran di tahun yang akan datang sehingga pelayanan peradilan dan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik.

- 3.6. NILAI INDIKATOR PENGELOLAAN ASET (IPA) SATUAN KERJA PENGADILAN
- Penilaian indikator kinerja “Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan” bertujuan untuk menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset dan perhitungannya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.6/2025 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025 dengan variabel pengukuran sebagai berikut :

NO.	VARIABEL/INDIKATOR	BOBOT
I.	Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif	
1.	Tindak lanjut temuan pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN	15%
2.	Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan aset	10%
II.	Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan	
1.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	10%
2.	Asuransi BMN	10%
III.	Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif	
1.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN	15%
2.	Tindak lanjut BMN rusak berat	10%
IV.	Administrasi BMN yang andal	
1.	BMN memiliki dokumen kepemilikan	15%
2.	Penggunaan BMN sesuai ketentuan	15%
TOTAL		100%

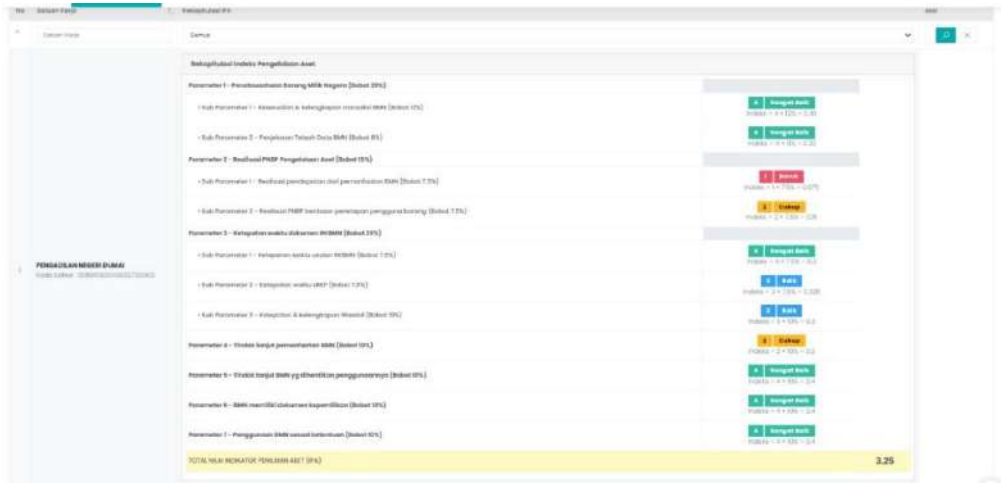
Tabel III-55. Variabel dan bobot penilaian indeks pengelolaan aset

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) merupakan penjumlahan hasil pembobotan masing-masing indikator yang dikategorikan menjadi :

NO.	KATEGORI	NILAI
1.	Indeks 4 (Sangat Baik)	≥ 80
2.	Indeks 3 (Baik)	60 – 79
3.	Indeks 2 (Cukup)	40 – 69
4.	Indeks 1 (Buruk)	< 40

Tabel III-56. Kategori dan nilai indeks pengelolaan aset

Penilaian indikator kinerja ini dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran yang dihimpun dan dihitung secara sistematis menggunakan aplikasi E-Sadewa Mahkamah Agung yang dapat diakses melalui alamat <https://e-sadewa.mahkamahagung.go.id/> serta konfirmasi dan validasi Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai formulir isian data kinerja yang telah disahkan.



Gambar III.11. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada Aplikasi E-Sadewa Mahkamah Agung

Rekapitulasi realisasi Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai Aplikasi E-Sadewa Mahkamah Agung sebagai berikut:

NO.	VARIABEL/INDIKATOR	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR
I.	Penatausahaan barang milik negara			
1.	Kesesuaian dan kelengkapan transaksi BMN	4	12%	0,48
2.	Penjelasan telaah data BMN	4	8%	0,32
II.	Realisasi PNPB pengelolaan aset			
1.	Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN	1	7,5%	0,075
2.	Realisasi PNPB berdasar penetapan pengguna barang	2	7,5%	0,15
III.	Ketepatan waktu dokumen RKBMN			
1.	Ketepatanwaktu usulan RKBMN	4	7,5%	0,3
2.	Ketepatan waktu LBKP	3	7,5%	0,225
3.	Ketepatan dan kelengkapan wasdal	3	10%	0,3
IV.	Tindak lanjut pemanfaatan BMN	2	10%	0,2
V.	Tindak lanjut BMN yang dihentikan penggunaannya	4	10%	0,4
VI.	BMN memiliki dokumen kepemilikan	4	10%	0,4
VII.	Penggunaan BMN sesuai ketentuan	4	10%	0,4
NILAI AKHIR				3,25

Tabel III-57. Rekapitulasi realisasi nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

REALISASI : 3,25

TARGET : 3,2

CAPAIAN : $\frac{3,25}{3,2} \times 100\% = 101,56\%$

Berdasarkan data tersebut diatas, Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA bernilai 3,25 dan berada pada pada kategori “Baik” karena berada pada indeks 3.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan aset di tahun yang akan datang sehingga pelayanan peradilan dan kepastian hukum dapat berjalan dengan baik.

G. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

1. EFISIENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki jumlah aparatur yang terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Aparatur yang tersedia di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2025 sebagai berikut :

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	Hakim	8
2.	Calon Hakim	-
3.	PNS	23
4.	Calon PNS	7
5.	PPPK	12
6.	Calon PPPK	-
	TOTAL	50

Tabel III-58. Jumlah aparatur berdasarkan status kepegawaian

Jumlah ini mempunyai deviasi sebesar 62,41% (enam puluh dua koma empat puluh satu persen) jika dibandingkan dengan standar aparatur peradilan tingkat pertama kelas IA sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan, dan Administrasi Keprotokolan Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI. Hal ini dapat terlihat sebagaimana data pada tabel berikut :

NO.	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG	JUMLAH	
				STANDAR (SK KMA 143/2007)	TERSEDIA
1.	Ketua	Pembina Utama Muda	IV/c	1	1
2.	Wakil Ketua	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-
3.	Hakim	Penata Tk. I	III/d	Max. 23	7
4.	Panitera/Sekretaris	Penata Tk. I	III/d	1	2
5.	Wakil Panitera	Penata	III/c	1	-
6.	Wakil Sekretaris	Penata	III/c	1	-
7.	Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian	Penata atau Penata Muda Tk. I	III/c atau III/b	6	5
8.	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I atau Penata Muda	III/b atau III/a	Max. 32	3

NO.	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG	JUMLAH	
				STANDAR (SK KMA 143/2007)	TERSEDIA
9.	Jurusita	Pengatur Muda Tk. I	II/b	5	2
10.	Jurusita Pengganti	Pengatur Muda	II/a	10	-
11.	Urusan-Urusan Perkara	Penata Muda Tk. I Penata Muda Pengatur Tk. I Pengatur Pengatur Muda Tk. I Pengatur Muda	III/b III/a II/d II/c II/b II/a	12	16
12.	Urusan Tata Usaha	Penata Muda Tk. I Penata Muda Pengatur Tk. I Pengatur Pengatur Muda Tk. I Pengatur Muda	III/b III/a II/d II/c II/b II/a	10	14
13.	Juru Ketik	Juru Tk. I	I/d	10	-
14.	Sopir	Juru	I/c	5	-
15.	Pesuruh	Juru Muda Tk. I	I/b	10	-
16.	Jaga Malam	Juru Muda	I/a	3	-
17.	Tukang Kebun	Juru Muda	I/a	2	-
TOTAL APARATUR				133	50
PERSENTASE KETERSEDIAAN APARATUR				37,59%	

Tabel III-59. Jumlah ketersediaan aparatur Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

Berdasarkan tabel diatas, aparatur Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tersedia sebanyak 37,59% (tiga puluh tujuh koma lima puluh sembilan persen) dari jumlah standar aparatur peradilan tingkat pertama kelas IA. Namun demikian, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mampu meyelesaikan target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien sebagaimana tabel berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA				JUMLAH APARATUR		
	RINCIAN	TARGET	REAKISASI	CAPAIAN	STANDAR	TERSEDIA	PERSENTASE KETERSEDIAAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern						
1.1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	99,03%	101,05%	133	50	37,59%
1.2.	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	99,96%	100,97%	133	50	37,59%
1.3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	80%	80,33%	100,41%	133	50	37,59%

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA				JUMLAH APARATUR		
	RINCIAN	TARGET	REAKISASI	CAPAIAN	STANDAR	TERSEDIA	PERSENTASE KETERSEDIAAN
1.4.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	75%	76,74%	102,33%	133	50	37,59%
1.5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	93%	96,05%	103,28%	133	50	37,59%
1.6.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	28%	28,57%	102,04%	133	50	37,59%
1.7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2,6%	2,68%	103.02%	133	50	37,59%
1.8.	Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18%	18,92%	105,11%	133	50	37,59%
1.9.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	N/A	N/A	133	50	37,59%
1.10.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	94%	94,89%	100,95%	133	50	37,59%
1.11.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	96%	97,42%	101,48%	133	50	37,59%
1.12.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101,01%	133	50	37,59%
RATA-RATA				101,97%			37,59%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik						
2.1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9	3,91	100,38%	133	50	37,59%
RATA-RATA				100,38%			37,59%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional						
3.1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79	80,5	101,9%	133	50	37,59%
3.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327)	87	87,75	100,87%	133	50	37,59%

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA				JUMLAH APARATUR		
	RINCIAN	TARGET	REAKISASI	CAPAIAN	STANDAR	TERSEDIA	PERSENTASE KETERSEDIAAN
3.3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328)	87	87,48	100,56%	133	50	37,59%
3.4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	97	100	103,09%	133	50	37,59%
3.5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	85	85	100%	133	50	37,59%
3.6.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,25	101,56%	133	50	37,59%
RATA-RATA				101,33%			37,59%

Tabel III-60. Rincian efisiensi penggunaan sumber daya manusia terhadap capaian kinerja

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang tersedia terhadap capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA	EFISIENSI	
				PERSENTASE	HASIL
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	101,97%	37,59%	271,27%	Efisien
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	100,38%	37,59%	267,04%	Efisien
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	101,33%	37,59%	269,57%	Efisien
RATA-RATA		101,23%	33,59%	269,29%	Efisien

Tabel III-61. Rekapitulasi efisiensi penggunaan sumber daya manusia terhadap capaian kinerja

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mampu mengelola dan memanfaatkan ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas untuk mencapai target kinerja secara efisien yang didorong oleh semangat dan tanggung jawab aparatur yang tinggi dalam pelaksanaan tugas untuk mendukung tercapainya sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

2. EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mengelola 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Tahun Anggaran 2025 dan melakukan berbagai upaya secara optimal dalam mengelola anggaran yang tersedia untuk dapat menghasilkan kinerja yang terbaik sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat tercapai dengan baik. Tingkat efisiensi pengelolaan anggaran terhadap capaian kinerja secara terperinci dapat diukur sebagaimana tabel berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern						
1.1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	99%	99,03%	101,05%			
	Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum KRO : Koordinasi KRO : Perkara Hukum Perseorangan KRO : Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				750.000 121.275.000 36.000.000	750.000 121.154.645 36.000.000	100% 99,9% 100%
1.2.	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	99,96%	100,97%			
	Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum KRO : Perkara Hukum Perseorangan				121.275.000	121.154.645	99,90%
1.3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	80%	80,33%	100,41%			
	Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum KRO : Perkara Hukum Perseorangan				121.275.000	121.154.645	99,90%
1.4.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	75%	76,74%	102,33%			

NO.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
	Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum KRO : Perkara Hukum Perseorangan				121.275.000	121.154.645	99,90%
1.5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	30%	N/A	N/A			
	Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum KRO : Perkara Hukum Perseorangan				121.275.000	121.154.645	99,90%
1.6.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	87%	97,31%	105,19%			
	Non APBN : Biaya Proses Perkara				1.259.400	1.259.400	100%
1.7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2,6%	2,68%	103,02%			
	Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum KRO : Perkara Hukum Perseorangan				121.275.000	121.154.645	99,90%
1.8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18%	18,92%	105,11%			
	Non APBN : Biaya Proses Perkara				1.259.400	1.259.400	100%
1.9.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	N/A	N/A			
	Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum KRO : Perkara Hukum Perseorangan				121.275.000	121.154.645	99,90%
1.10.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	94%	94,89%	100,95%			
	Non APBN : Biaya Proses Perkara				1.259.400	1.259.400	100%
1.11.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	96%	97,42%	101,48%			
	Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum KRO : Perkara Hukum Perseorangan				121.275.000	121.154.645	99,90%

NO.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
1.12.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	100%	101,01%			
	Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum KRO : Perkara Hukum Perseorangan				121.275.000	121.154.645	99,90%
RATA-RATA				101,97%			99,94%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik						
2.1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,91	3,9	100,38%			
	Program : Dukungan Manajemen Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung KRO : Layanan Sarana dan Prasarana Internal Kegiatan : Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama KRO : Layanan Dukungan Manajemen Internal				1.001.543.000	890.773.996	88,94%
					7.290.417.000	7.157.394.666	98,18%
	KRO : Layanan Manajemen Kinerja Internal Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum KRO : Koordinasi KRO : Perkara Hukum Perseorangan KRO : Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				300.000	300.000	100%
					750.000	750.000	100%
					121.275.000	121.154.645	99,9%
					36.000.000	36.000.000	100%
RATA-RATA				100,38%			97,84%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional						
3.1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79	80,5	101,9%			
	Program : Program Dukungan Manajemen Kegiatan : Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama KRO : Layanan Dukungan Manajemen Internal KRO : Layanan Manajemen Kinerja Internal				7.290.417.000	7.157.394.666	98,18%
					300.000	300.000	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
3.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327)	87	87,75	100,87%			
	Program : Program Dukungan Manajemen Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung KRO : Layanan Sarana dan Prasarana Internal				1.001.543.000	890.773.996	88,94%
	Kegiatan : Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama KRO : Layanan Dukungan Manajemen Internal				7.290.417.000	7.157.394.666	98,18%
	KRO : Layanan Manajemen Kinerja Internal				300.000	300.000	100%
3.3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328)	87	87,48	100,56%			
	Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum						
	KRO : Koordinasi KRO : Perkara Hukum Perseorangan				750.000 121.275.000	750.000 121.154.645	100% 99,9%
	KRO : Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				36.000.000	36.000.000	100%
3.4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	97	100	103,09%			
	Program : Program Dukungan Manajemen						
	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung KRO : Layanan Sarana dan Prasarana Internal				1.001.543.000	890.773.996	88,94%
	Kegiatan : Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama KRO : Layanan Dukungan Manajemen Internal KRO : Layanan Manajemen Kinerja Internal				7.290.417.000 300.000	7.157.394.666 300.000	98,18% 100%
3.5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	85	85	100%			

NO.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
	Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum KRO : Koordinasi KRO : Perkara Hukum Perseorangan KRO : Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				750.000 121.275.000 36.000.000	750.000 121.154.645 36.000.000	100% 99,9% 100%
3.6.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,25	101,56%			
	Program : Program Dukungan Manajemen Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung KRO : Layanan Sarana dan Prasarana Internal				1.001.543.000	890.773.996	88,94%
	Kegiatan : Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama KRO : Layanan Dukungan Manajemen Internal				7.290.417.000	7.157.394.666	98,18%
RATA-RATA				101,33%			97,46%

Tabel III-62. Rincian efisiensi pengelolaan anggaran terhadap capaian kinerja

Tingkat esisiensi pengelolaan anggaran terhadap capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI	
				PERSENTASE	HASIL
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	101,97%	99,94%	102,03%	Efisien
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	100,38%	97,84%	102,6%	Efisien
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	101,33%	97,46%	103,97%	Efisien
RATA-RATA		101,23%	98,41%	102,87%	Efisien

Tabel III-63. Rekapitulasi efisiensi pengelolaan anggaran terhadap capaian kinerja

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mampu mengelola dan memanfaatkan ketersediaan anggaran untuk mencapai target kinerja secara efisien yang didorong oleh semangat dan tanggung jawab aparatur yang tinggi dalam pelaksanaan tugas untuk mendukung tercapainya sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

H. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KINERJA

Pelaksanaan pencapaian kinerja sasaran strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA didukung dengan program, kegiatan, dan anggaran yang tersedia melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT		OUTPUT			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
WA	Program Dukungan Manajemen				8.292.260.000	8.048.468.662	97,06
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung				1.001.543.000	890.773.996	88,94
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				1.001.543.000	890.773.996	88,94
951	Layanan Sarana Internal	39 Unit	39 Unit	100	654.789.000	544.353.996	83,13
971	Layanan Prasarana Internal	2 Unit	2 Unit	100	346.754.000	346.420.000	99,90
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama				7.290.717.000	7.157.694.666	98,18
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				7.290.417.000	7.157.394.666	98,18
962	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100	700.000	700.000	100
994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100	7.289.717.000	7.156.694.666	98,18
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				300.000	300.000	100
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	300.000	300.000	100
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				158.025.000	157.904.645	99,92
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				158.025.000	157.904.645	99,92
AEA	Koordinasi				750.000	750.000	100
001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	750.000	750.000	100
BCA	Perkara Hukum Perseorangan				121.275.000	121.154.645	99,90
U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	391 Perkara	391 Perkara	100	121.275.000	121.154.645	99,90
QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				36.000.000	36.000.000	100
032	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	70 Orang	70 Orang	100	36.000.000	36.000.000	100

Tabel III-64. Realisasi program/kegiatan penunjang kinerja

Pengadilan Negeri Dumai Kelas I berhasil dengan baik merealisasikan target output program dan kegiatan dengan anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis. Faktor pendukung keberhasilan tersebut sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana penggunaan atau pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.
2. Optimalisasi penggunaan atau pengelolaan anggaran melalui mekanisme revisi anggaran.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran yang menunjang pencapaian kinerja dirinci sebagai berikut :

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KINERJA

SATUAN KERJA/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			OUTPUT		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA					8.450.285.000	8.206.373.307	97,11%	41 Unit, 3 Layanan, 1 Kegiatan, 391 Perkara, 70 Orang	41 Unit, 3 Layanan, 1 Kegiatan, 391 Perkara, 70 Orang	100%
	1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern									
	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	98%	99,03%	101,05%						
	1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	99%	99,96%	100,97%						
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	80%	80,33%	100,41%						
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	75%	76,74%	102,33%						
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	93%	96,05%	103,28%						
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	28%	28,57%	102,04%						
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	2,6%	2,68%	103,02%						

SATUAN KERJA/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			OUTPUT		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	18%	18,92%	105,11%						
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	50%	N/A	N/A						
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	94%	94,89%	100,95%						
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	96%	97,42%	101,48%						
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	99%	100%	101,01%						
	2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.									
	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,9	3,91	100,38%						
	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.									
	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	79	80,5	101,9%						
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327).	87	87,75	100,87%						
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328).	87	87,48	100,56%						

SATUAN KERJA/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			OUTPUT		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327).	97	100	103,09%						
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328).	85	85	100%						
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3,2	3,25	101,56%						
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM					158.025.000	157.904.645	99,92%	1 Kegiatan, 391 Perkara, 70 Orang	1 Kegiatan, 391 Perkara, 70 Orang	100%
	02. Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang Pasti dan Berkeadilan									
	2.4 - Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	98%	99,03%	101,05%						
	2.6 - Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	99%	99,96%	100,97%						
	2.7 - Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	80%	80,33%	100,41%						
	2.8 - Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	75%	76,74%	102,33%						
	2.9 - Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	93%	96,05%	103,28%						
	2.10 - Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	28%	28,57%	102,04%						
	2.11 - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	2,6%	2,68%	103,02%						

SATUAN KERJA/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			OUTPUT		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	2.12 - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	18%	18,92%	105,11%						
	2.13 - Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	50%	N/A	N/A						
	2.14 - Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	94%	94,89%	100,95%						
	2.16 - Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	96%	97,42%	101,48%						
	2.17 - Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	99%	100%	101,01%						
	05. Terselenggaranya Layanan peradilan Bagi Kelompok Rentan di Lingkungan Peradilan Umum yang Mudah dan Terjangkau									
	05.1 – Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan umum	-	-	N/A						
	05.2 – Persentase perkara siding di luar gedung di lingkungan peradilan umum	-	-	N/A						
	08. Terselenggaranya Dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum yang optimal									
	08.1 – Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan umum	100%	100%	100%						
	08.2 – Indeks kepuasan masyarakat atas layanan di lingkungan peradilan umum	3,9	3,91	100,38%						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					8.292.260.000	8.048.468.662	97,06%	41 Unit, 3 Layanan	41 Unit, 3 Layanan	100%
	02. Terlaksananya Dukungan Manajemen di Lingkungan Peradilan Umum yang Prima dan Optimal									
	2.1 - Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	79	80,5	101,9%						

SATUAN KERJA/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			OUTPUT		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	2.2 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327).	87	87,75	100,87%						
	2.3 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328).	87	87,48	100,56%						
	2.4 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327).	97	100	103,09%						
	2.5 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328).	85	85	100%						
	2.6 - Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3,2	3,25	101,56%						
KEGIATAN 1049 - PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM					158.025.000	157.904.645	99,92%	1 Kegiatan, 391 Perkara, 70 Orang	1 Kegiatan, 391 Perkara, 70 Orang	100%
	1049.01 – Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Peradilan Umum Sesuai Ketentuan Yang berlaku									
	1049.01.2 – Jumlah perkara di lingkungan peradilan umum di tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu	4.802	4.895	101,94%						
	1049.02 – Terlaksananya Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum									
	1049.02.2 – Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	135	170	125,93%						
	1049.02.4 – Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	4.841	4.941	102,07%						

SATUAN KERJA/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			OUTPUT		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	1049.02.5 – Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman petikan/ pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	88	91	103,41%						
	1049.02.6 – Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	60	66	110%						
	1049.02.7 – Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	558	656	117,56%						
	1049.02.8 – Jumlah pelaksanaan penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata di lingkungan peradilan umum	2	2	100%						
	1049.02.9 – Jumlah pelaksanaan koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	3	3	100%						
	1049.02.10 – Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi di lingkungan peradilan umum	7	7	100%						
	1049.02.11 – Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	1	-	N/A						

SATUAN KERJA/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			OUTPUT		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	1049.02.12 – Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata menggunakan e-court	188	223	118,62%						
	1049.02.13 – Jumlah pelaksanaan koordinasi layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara eletronik (e-Berpadu)	432	454	105,09%						
	1049.02.14 – Jumlah pelaksanaan koordinasi layanan perkara pidana yang diajukan secara eletronik (e-Berpadu)	1.150	1.160	100,87%						
	1049.03 – Terselenggaranya Kemudahan Akses Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Umum									
	1049.03.1 – Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan umum	-	-	N/A						
	1049.03.2 – Jumlah perkara yang diselesaikan melalui siding di luar gedung di lingkungan peradilan umum	-	-	N/A						
	1049.04 – Terselenggaranya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan									
	1049.04.1 – Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan umum	70	70	100%						
KEGIATAN 1071 - PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG					1.001.543.000	890.773.996	88,94%	41 Unit	41 Unit	100%
	1071.01 – Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan									
	1071.01.1 – Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana pengadilan	3,9	3,91	100,38%						

SATUAN KERJA/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			OUTPUT		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
KEGIATAN 6986 - DUKUNGAN MANAJEMEN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA					7.290.717.000	7.157.694.666	98,18%	3 Layanan	3 Layanan	100%
	6986.01 – Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial, dan Aset									
	6986.01.1 – Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	79	80,5	101,9%						
	6986.01.2 – Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327).	87	87,75	100,87%						
	6986.01.3 – Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328).	87	87,48	100,56%						
	6986.01.4 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327).	97	100	103,09%						
	6986.01.5 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328).	85	85	100%						
	6986.01.6 – Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3,2	3,25	101,56%						

Tabel III-65. Rincian realisasi program/kegiatan penunjang kinerja

2. REALISASI ANGGARAN

Keberhasilan capaian kinerja didukung dengan ketersediaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA, yaitu :

1. DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.01.400327) berasal dari bagian anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sesuai surat pengesahan petikan DIPA nomor SP DIPA-005.01.2.400327/2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp. 7.682.895.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan mengalami revisi sebanyak 11 (sebelas) kali sehingga total pagu akhir mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 8.292.260.000,- (delapan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). DIPA ini mempunyai 1 (satu) program, yaitu Program Dukungan Manajemen (WA) yang terdiri dari :

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT/KOMPONEN		ANGGARAN	REALISASI	%
WA	Program Dukungan Manajemen	8.292.260.000	8.048.468.662	97,06
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1.001.543.000	890.773.996	88,94
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.001.543.000	890.773.996	88,94
951	Layanan Sarana Internal	654.789.000	544.353.996	83,13
051	Pengadaan Kendaraan Bermotor	399.289.000	335.000.000	83,90
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	255.500.000	209.353.996	81,94
971	Layanan Prasarana Internal	346.754.000	346.420.000	99,90
051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	346.754.000	346.420.000	99,90
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	7.290.717.000	7.157.694.666	98,18
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.290.417.000	7.157.394.666	98,18
962	Layanan Umum	700.000	700.000	100
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	700.000	700.000	100
994	Layanan Perkantoran	7.289.717.000	7.156.694.666	98,18
001	Gaji dan Tunjangan	5.530.174.000	5.440.777.681	98,38
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.759.543.000	1.715.916.985	97,52
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	300.000	300.000	100
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	100
052	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	100

Tabel III-66. Realisasi anggaran DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.01.400327) Tahun Anggaran 2025

2. DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.03.400328) berasal dari bagian anggaran Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung sesuai surat pengesahan petikan DIPA nomor SP DIPA-005.03.2.400328/2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp. 211.915.000,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dan mengalami revisi sebanyak 8 (delapan) kali sehingga total pagu akhir mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 158.025.000,- (seratus lima puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah). DIPA ini mempunyai 1 (satu) program, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (BF) yang terdiri dari :

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT/KOMPONEN			ANGGARAN	REALISASI	%
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		158.025.000	157.904.645	99,92
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		158.025.000	157.904.645	99,92
	AEA	Koordinasi	750.000	750.000	100
	001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	750.000	750.000	100
	052	Dukungan Penyelesaian Perkara	750.000	750.000	100
	BCA	Perkara Hukum Perseorangan	121.275.000	121.154.645	99,90
	U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	121.275.000	121.154.645	99,90
	051	Pendaftaran Berkas Perkara	90.335.000	90.318.645	99,98
	052	Penetapan Hari Sidang	660.000	660.000	100
	053	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	300.000	300.000	100
	054	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	15.120.000	15.120.000	100
	055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa	30.000	0	0
	056	Minutasi/Upaya Hukum	11.730.000	11.730.000	100
	057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	220.000	146.000	66,36
	058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	2.880.000	2.880.000	100
	QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	36.000.000	36.000.000	100
	032	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	36.000.000	36.000.000	100
	051	Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100

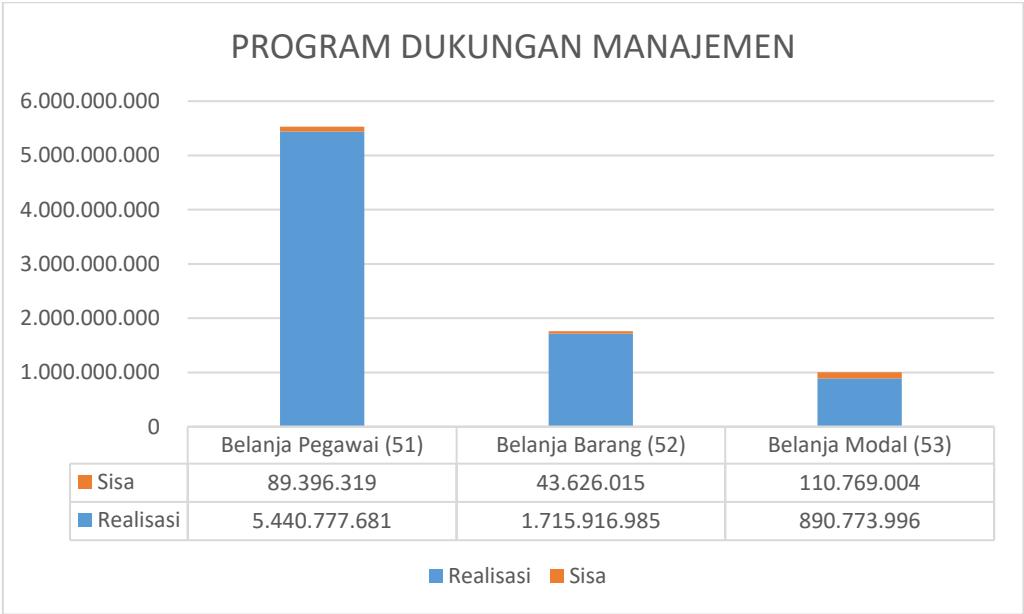
Tabel III-67. Realisasi anggaran DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.01.400327) Tahun Anggaran 2025

Realisasi belanja dari setiap program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA hingga akhir tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

NO.	KELOMPOK BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	Belanja Pegawai (51)	5.530.174.000	5.440.777.681	98,38	89.396.319
2.	Belanja Barang (52)	1.759.543.000	1.715.916.985	97,52	43.626.015
3.	Belanja Modal (53)	1.001.543.000	890.773.996	88,94	110.769.004

Tabel III-68. Realisasi belanja program dukungan manajemen

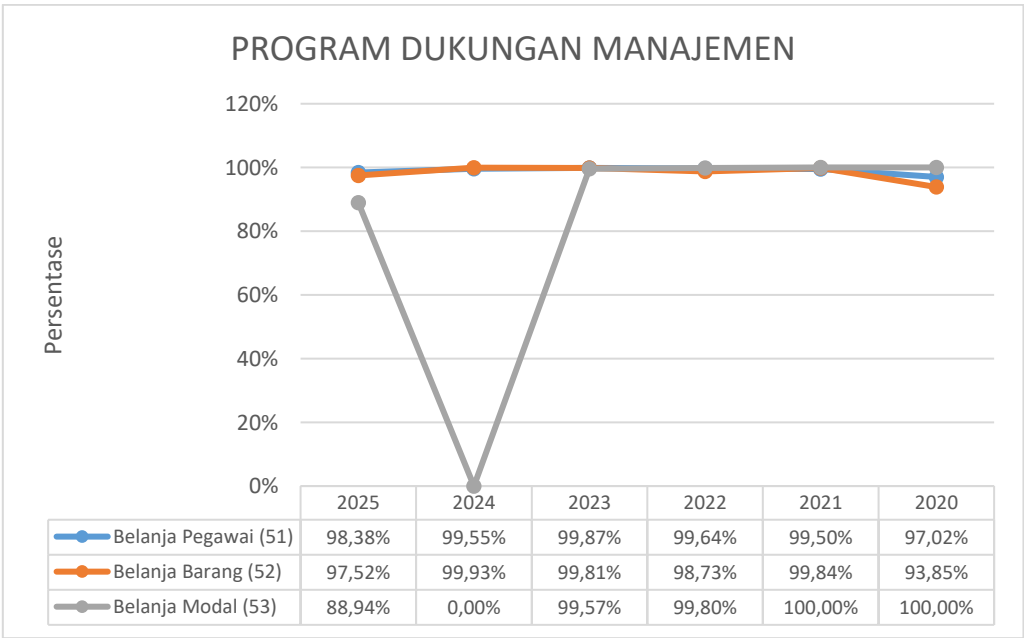


Gambar III.12. Diagram realisasi anggaran program dukungan manajemen

Realisasi belanja program dukungan manajemen pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSENTASE
1.	2024	Pegawai (51)	4.872.645.000	4.850.713.136	21.931.864	99,55%
		Barang (52)	1.933.757.000	1.932.419.631	1.337.369	99,93%
		Modal (53)	-	-	-	-
2.	2023	Pegawai (51)	5.262.410.000	5.255.340.695	7.069.305	99,87%
		Barang (52)	1.958.979.000	1.955.231.444	3.147.556	99,91%
		Modal (53)	631.681.000	628.945.900	1.735.100	99,73%
3.	2022	Pegawai (51)	5.141.364.000	5.122.831.334	18.532.666	99,64%
		Barang (52)	2.060.436.000	2.034.290.769	26.145.231	98,73%
		Modal (53)	250.500.000	249.990.579	509.421	99,8%
4.	2021	Pegawai (51)	4.701.839.000	4.678.168.006	23.670.994	99,50%
		Barang (52)	1.664.533.000	1.661.889.342	2.643.658	99,84%
		Modal (53)	65.000.000	65.000.000	0	100%
5.	2020	Pegawai (51)	5.122.343.000	4.969.810.273	152.532.727	97,02%
		Barang (52)	1.657.037.000	1.555.147.446	101.889.554	93,85%
		Modal (53)	25.000.000	24.999.999	1	99,99%

Tabel III-69. Realisasi belanja program dukungan manajemen pada tahun-tahun sebelumnya

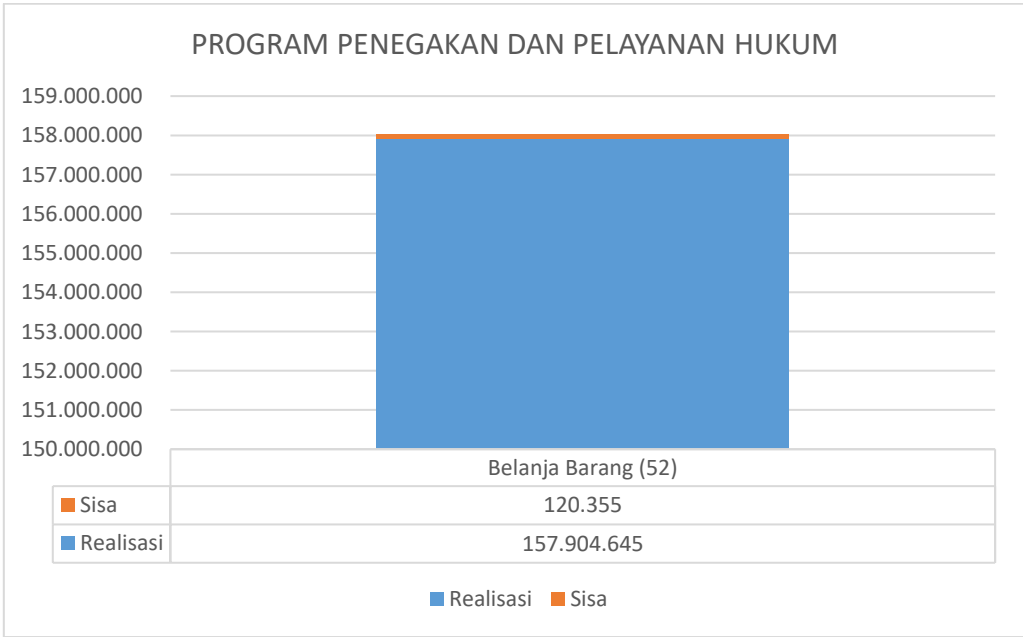


Gambar III.13. Diagram realisasi anggaran program dukungan manajemen pada tahun-tahun sebelumnya

2. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

NO.	KELOMPOK BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	Belanja Barang (52)	158.025.000	157.904.645	99,92	120.355

Tabel III-70. Realisasi belanja program penegakan dan pelayanan hukum

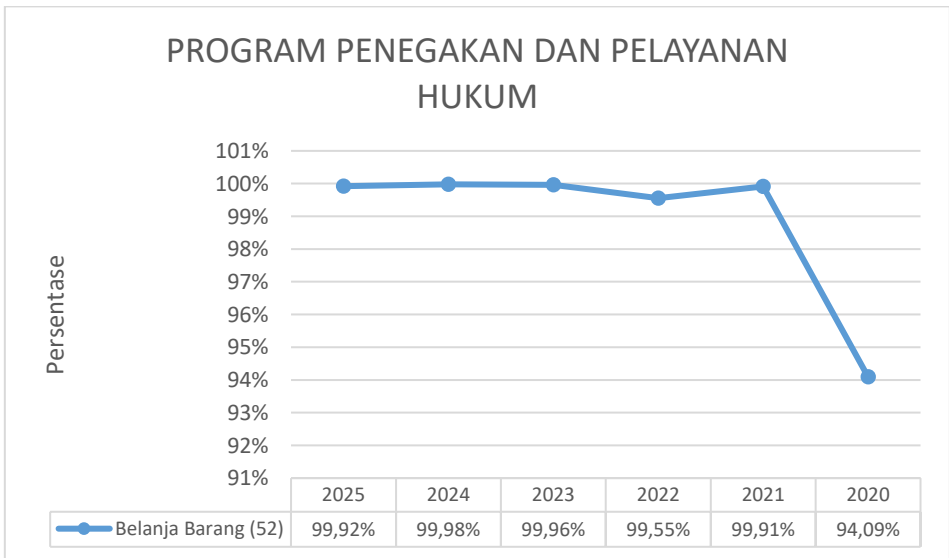


Gambar III.14. Diagram realisasi anggaran program penegakan dan pelayanan hukum

Realisasi belanja program penegakan dan pelayanan hukum pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSENTASE
1.	2024	Barang (52)	228.600.000	228.547.955	50.045	99,98%
2.	2023	Barang (52)	223.800.000	223.710.530	89.470	99,96%
3.	2022	Barang (52)	220.730.000	219.745.350	984.650	99,55%
4.	2021	Barang (52)	178.910.000	178.753.760	156.240	99,91%
5.	2020	Barang (52)	221.130.000	208.068.600	13.061.400	94,09%

Tabel III-71. Realisasi belanja program penegakan dan pelayanan hukum pada tahun-tahun sebelumnya

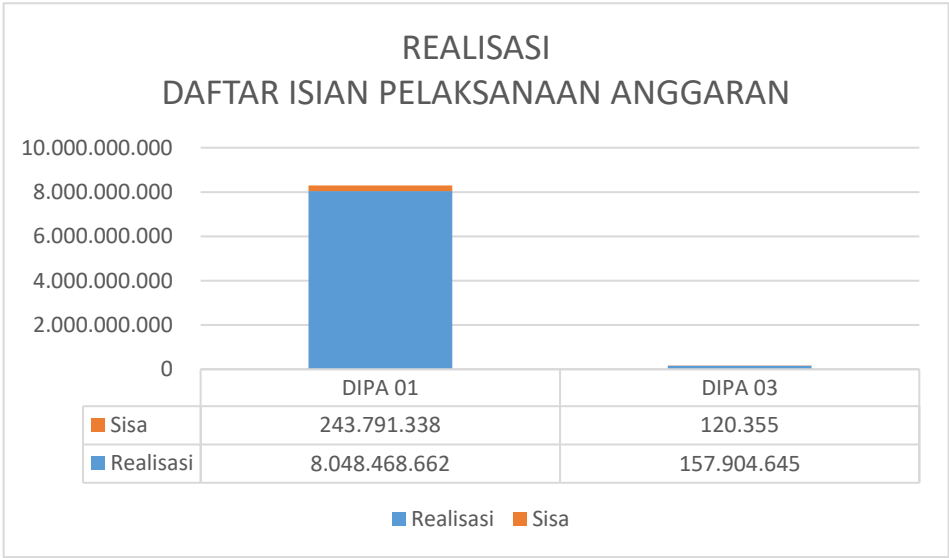


Gambar III.15. Diagram realisasi anggaran program penegakan dan pelayanan hukum

Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2025 untuk masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah sebagai berikut :

NO.	DIPA	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.01.400327)/BA BUA (01)	8.292.260.000	8.048.468.662	97,06	243.791.338
2.	Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.03.400328)/BA DITJEN BADILUM (03)	158.025.000	157.904.645	99,92	120.355

Tabel III-72. Realisasi anggaran DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA



Gambar III.16. Diagram realisasi anggaran DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

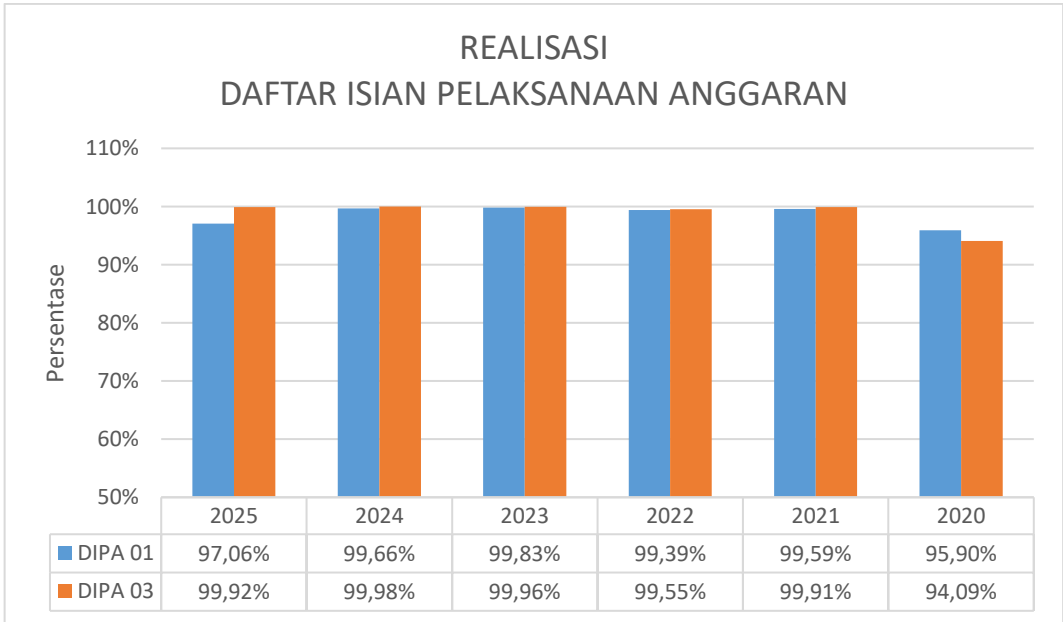
Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat merealisasikan kegiatan dan anggaran pada tahun 2025 dengan baik. Hal tersebut tercermin pada realisasi pelaksanaan atau penyerapan anggaran yang capainnya mendekati 100%.

Adapun realisasi anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	URAIAN	DIPA BA BUA (01)	DIPA BA DIRJEN BADILUM (03)
1.	2024	Pagu (Rp)	6.806.402.000	228.600.000
		Realisasi (Rp)	6.783.132.767	228.547.955
		Sisa (Rp)	23.269.233	52.045
		Persentase Realisasi	99,66%	99,98%
2.	2023	Pagu (Rp)	7.853.070.000	223.800.000
		Realisasi (Rp)	7.841.118.039	223.710.530
		Sisa (Rp)	11.951.961	89.470
		Persentase Realisasi	99,85%	99,96%
3.	2022	Pagu (Rp)	7.452.300.000	220.730.000
		Realisasi (Rp)	7.407.112.682	219.745.350
		Sisa (Rp)	45.187.318	984.650
		Persentase Realisasi	99,39%	99,55%

NO.	TAHUN	URAIAN	DIPA BA BUA (01)	DIPA BA DIRJEN BADILUM (03)
4.	2021	Pagu (Rp)	6.439.972.000	178.910.000
		Realisasi (Rp)	6.413.582.848	178.753.760
		Sisa (Rp)	26.389.152	156.240
		Persentase Realisasi	99,59%	99,91%
5.	2020	Pagu (Rp)	6.782.239.000	221.130.000
		Realisasi (Rp)	6.503.872.146	208.068.600
		Sisa (Rp)	278.366.854	13.061.400
		Persentase Realisasi	95,90%	94,09%

Tabel III-73. Realisasi anggaran DIPA pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar III.17. Diagram realisasi anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya

Keberhasilan capaian kinerja tersebut juga didukung melalui optimalisasi kegiatan dan anggaran dengan melakukan upaya perubahan atau revisi terhadap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Revisi DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Bagian Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (005.01.400327) sebagai berikut :

NO.	NAMA REVISI	TANGGAL PENGESAHAN REVISI	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Revisi ke-1	13 Januari 2025	7.682.895.000	Revisi halaman III DIPA dan pergeseran anggaran (POK)
2.	Revisi ke-2	23 Februari 2025	7.682.895.000	Revisi pergeseran anggaran (POK)
3.	Revisi ke-3	23 Maret 2025	7.682.895.000	Revisi pergeseran anggaran (POK)
4.	Revisi ke-4	24 April 2025	7.682.895.000	Revisi pergeseran anggaran (POK)
5.	Revisi ke-5	10 Juli 2025	7.682.895.000	Revisi halaman III DIPA dan pergeseran anggaran (POK)

NO.	NAMA REVISI	TANGGAL PENGESAHAN REVISI	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
6.	Revisi ke-6	27 Agustus 2025	7.682.895.000	Revisi pergeseran anggaran (POK)
7.	Revisi ke-7	29 September 2025	7.716.310.000	Revisi penambahan anggaran (belanja pegawai sesuai PP 44 Tahun 2024), halaman III DIPA, dan pergeseran anggaran (POK)
8.	Revisi ke-8	10 Oktober 2025	7.716.310.000	Revisi halaman III DIPA dan pergeseran anggaran (POK)
9.	Revisi ke-9	24 Oktober 2025	7.685.020.000	Revisi pergeseran anggaran antar satuan kerja (belanja pegawai), halaman III DIPA, dan pergeseran anggaran (POK)
10.	Revisi ke-10	14 November 2025	8.292.260.000	Revisi penambahan anggaran (belanja pegawai), halaman III DIPA, dan pergeseran anggaran (POK)
11.	Revisi ke-11	12 Desember 2025	8.292.260.000	Revisi pergeseran anggaran (POK)

Tabel III-74. Rincian revisi DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Bagian Anggaran Badan Urusan Administrasi (005.01.400327) Tahun Anggaran 2025

2. Revisi DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Bagian Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (005.03.400328) sebagai berikut :

NO.	NAMA REVISI	TANGGAL PENGESAHAN REVISI	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Revisi ke-1	22 Februari 2025	211.915.000	Revisi halaman III DIPA dan pergeseran anggaran (POK)
2.	Revisi ke-2	21 Maret 2025	211.915.000	Revisi pergeseran anggaran (POK)
3.	Revisi ke-3	24 April 2025	211.915.000	Revisi halaman III DIPA dan pergeseran anggaran (POK)
4.	Revisi ke-4	9 Juli 2025	211.915.000	Revisi halaman III DIPA dan pergeseran anggaran (POK)
5.	Revisi ke-5	31 Juli 2025	161.645.000	Revisi antar satuan kerja, halaman III DIPA, dan pergeseran anggaran (POK)
6.	Revisi ke-6	8 Oktober 2025	161.645.000	Revisi halaman III DIPA dan pergeseran anggaran (POK)
7.	Revisi ke-7	24 Oktober 2025	158.025.000	Revisi pergeseran anggaran (POK)
8.	Revisi ke-8	8 November 2025	158.025.000	Revisi pergeseran anggaran (POK)

Tabel III-75. Rincian revisi DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Bagian Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (005.03.400328) Tahun Anggaran 2025

BAB IV. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berhasil mencapai kinerja sasaran strategis dengan rata-rata sebesar 101,18% (seratus satu koma delapan belas persen) berdasarkan target kinerja yang dimungkinkan untuk tercapai secara realistis sesuai dinamika pelaksanaannya sepanjang tahun 2025. Keberhasilan tersebut dapat dicapai secara efisien yang didukung dengan ketersediaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan sumber pendanaan lainnya yang sah serta komitmen kinerja yang tinggi dari seluruh aparatur meskipun dengan jumlah aparatur yang terbatas.

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA masih belum sejalan dengan target kinerja Mahkamah Agung secara nasional. Hal ini terlihat dari realisasi kinerja yang relatif masih lebih rendah jika dibandingkan dengan target kinerja secara nasional dengan tingkat capaian kinerja sasaran strategis yang secara rata-rata hanya tercapai sebesar 97,61% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh satu persen).

Hal ini mendorong Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk terus berupaya memperbaiki serta bertekad untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan melalui dukungan yang bersifat konstruktif dari semua pihak, sehingga target kinerja dapat terealisasi dengan baik untuk mewujudkan akuntabilitas dan terselenggaranya pelayanan peradilan yang berkelanjutan serta kepastian hukum yang tepat sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja (*operational plan*), rencana kinerja (*performance plan*), rencana anggaran (*financial plan*), dan rencana strategis (*strategic plan*) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA di masa yang akan datang.

2. SARAN

Hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan dan perhatian untuk mencapai kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang sebagai berikut :

1. Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait guna terselenggaranya pelayanan peradilan yang berkelanjutan serta kepastian hukum yang tepat sasaran.
2. Pembentukan komitmen yang solid dan budaya kerja yang tangguh setiap aparatur dalam penerapan akuntabilitas kinerja sebagai instrumen *control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai dengan *core bussines* dari tugas dan fungsinya serta peningkatan penyelesaian perkara.

3. Penambahan dan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia atau aparatur Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang sesuai dengan kualifikasi bidang masing-masing sangat diperlukan sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat tercapai secara optimal.
4. Peningkatan sarana dan prasarana terutama perluasan, renovasi, atau pembangunan gedung kantor yang sesuai dengan standar bangunan gedung Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA masih menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menunjang efektivitas kinerja aparatur.

LAMPIRAN I

FORMULIR CHECKLIST

FORMULIR CHECK LIST
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025

NO.	URAIAN		CHECKLIST
I.	Format	1. Laporan kinerja telah menampilkan data penting instansi pemerintah.	√
		2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja.	√
		3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai.	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan.	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√
II.	Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja instansi pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai.	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan laporan kinerja.	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya.	√
		6. Analisis/penjelasan dalam laporan kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait.	√
		7. Laporan kinerja instansi pemerintah bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	√
III.	Subtansi	1. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		2. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis.	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		4. Terget Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		5. Indikator kinerja utama pada laporan kinerja telah sesuai dengan dokumen indikator kinerja utama yang ditetapkan.	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		8. Indikator kinerja utama dan indikator kinerja telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	√

NO.	URAIAN		CHECKLIST
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai.	√
		10. Indikator kinerja utama dan indikator kinerja telah SMART.	√

Dumai, 12 Februari 2026

Pereviu 1,

Pereviu 2,



DICKI IRVANDI, S.H., M.H.



HOTMA REZEKI SINAGA, S.E.

LAMPIRAN II

**SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2025**



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

NOMOR :  /KPN.W4-U5/SK.RA1.1/II/2026

**TENTANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 9/KWPT.W4-U/RA1.3/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP dan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP;
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
3. Bahwa untuk menyajikan laporan yang lengkap, tepat, akurat, dan mudah dipahami sebagai pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi serta kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun 2025 yang akuntabel berdasarkan :
- a. Indikator Kinerja Utama;
 - b. Rencana Strategis;
 - c. Rencana Kinerja Tahunan; dan
 - d. Perjanjian Kinerja.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2025.
- Pertama : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk Tahun 2025.
- Kedua : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sesuai pedoman penyusunan laporan kinerja dan disajikan secara akurat, andal, dan valid serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini informasi atau data yang tersaji pada laporan kinerja dimaksud.
- Ketiga : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 menjadi refleksi atau gambaran dalam pencapaian target kinerja pada tahun 2026.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai

Pada Tanggal : 12 Februari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,


MAULIA MARTWENTY INE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

LAMPIRAN III

SURAT KEPUTUSAN

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025**



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
NOMOR : 167/KPN.W4-U5/SK.RA1.1/XII/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

6.Peraturan ...

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; dan
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2025.
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA;

- Ketiga : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2026;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun Anggaran 2026; dan
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 15 Desember 2025

KETUA,
MAULIA MARTWENTY INE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA
Nomor : 167/KPN.W4-U6/SK.RA1.1/XII/2025
Tanggal : 15 Desember 2025

TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung jawab	MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.
2.	Koordinator Validasi Data	TAUFIK ABDUL HALIM NAINGGOLAN, S.H.
4.	Ketua	SAMSYIR SIHOMBING, S.H.
5.	Sekretariat	ADE JUNAEDY, S.T.,M.Si.
6.	Anggota	1. ZAINAL ABIDIN, S.H. 2. SAPRIONO, S.H., M.H. 3. RULLY ANDRIAN, S.Sos., S.H.,M.H. 4. IBRAHIM MAKMUR, ST. 5. HERU SAPUTRA, S.T. 6. TAUFIQ ISNAINI, S.T.
7.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. DICKI IRVANDI, S.H., M.H. 2. HOTMA REZEKI SINAGA, S.E.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 15 Desember 2025

KETUA,

MAULIA MARTWENTY INE

Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA
Nomor : 167/KPN.W4-U6/SK.RA1.1/XII/2025
Tanggal : 15 Desember 2025

**TUGAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025**

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025.
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan teknis penyusunan laporan kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja, serta menganalisis indikator kinerja.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 15 Desember 2025

KETUA,

MAULIA MARTWENTY INE

LAMPIRAN IV

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

NOMOR : 168 /KPN.W4-U5/SK.RA1.3/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memberikan informasi dan ukuran keberhasilan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA;
 2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 3. Bahwa untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025-2029 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035;
 4. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
 5. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029; dan
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Memperhatikan : Hasil rapat tim penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029 tanggal 6 November 2025 tentang pembahasan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2025-2029.
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran strategis operasional serta menjadi acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk :
1. Menyusun rencana kinerja tahunan;
 2. Menetapkan perjanjian kinerja;
 3. Menyusun rencana aksi kinerja;
 4. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 5. Melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- Kedua : Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan kembali isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat digunakan dalam mengukur kinerja dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 7 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,


MAULIA MARTWENTY INE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025-2029**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan putusan diterima oleh para pihak. b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan. c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).		
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			- Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak. - Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak. - Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. - Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.		
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Dasar hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi : a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut : - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Tindak pidana merupakan delik aduan; - Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; - Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; - Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. - Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: - Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; - Terdapat relasi kuasa; - Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. - Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif : - Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. - Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; - Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi : - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim; - Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi - Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; - Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. - Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan. Dasar Hukum : 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu. 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll). 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.	Panitera	Laporan bulanan, semesteran, dan tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara(prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;	Panitera dan Sekretaris	Laporan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019.	Sekretaris	Laporan tahunan
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327)	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penyerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.	Sekretaris	Laporan bulanan, semester, triwulan, dan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328)	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penyerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.	Sekretaris	Laporan bulanan, semester, triwulan, dan tahunan
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : 1. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: a. Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) b. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) c. Agregasi Capaian RO Satker (30%) 2. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan bulanan, semester, triwulan, dan tahunan
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : 1. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: a. Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) b. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) c. Agregasi Capaian RO Satker (30%) 2. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan bulanan, semester, triwulan, dan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3.6. Nilai Indikator Peggelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.	Sekretaris	Laporan tahunan aplikasi E-Sadewa, MonSAKTI, dan laporan Realisasi Anggaran

Dumai, 7 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



MAULIA MARTWENTY INE

LAMPIRAN V

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN 1 : MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT KERJA PELAKSANA
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA								7.878	7.979	73.255	19.502	20.007	
	1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern												Kepaniteraan
	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	99%	98%	99%	99%	99%	99%						
	1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	99%	99%	99%	99%	99%	99%						
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%	80%	90%	90%	90%	90%						
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%	75%	90%	90%	90%	90%						
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	95%	93%	95%	95%	95%	95%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT KERJA PELAKSANA
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	30%	28%	30%	30%	30%	30%						
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	50%	2,6%	50%	50%	50%	50%						
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	20%	18%	20%	20%	20%	20%						
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	50%	50%	50%	50%	50%	50%						
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	98%	94%	98%	98%	98%	98%						
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	98%	96%	98%	98%	98%	98%						
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	99%	99%	99%	99%	99%	99%						
	2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.												Kepaniteraan
	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT KERJA PELAKSANA
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.												Kesekretariatan
	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	81	79	80	81	82	83						
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327).	96	87	96	96	97	97						
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328).	96	87	96	96	97	97						
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327).	97	97	97	97	98	98						
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328).	85	85	85	85	85	85						
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3,3	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3						
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM								162	194	274	278	283	
	02. Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang Pasti dan Berkeadilan												Kepaniteraan
	2.4 - Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	99%	98%	99%	99%	99%	99%						
	2.6 - Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	99%	99%	99%	99%	99%	99%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT KERJA PELAKSANA
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2.7 - Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%	80%	90%	90%	90%	90%						
	2.8 - Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%	75%	90%	90%	90%	90%						
	2.9 - Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	95%	93%	95%	95%	95%	95%						
	2.10 - Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	30%	28%	30%	30%	30%	30%						
	2.11 - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	50%	2,6%	50%	50%	50%	50%						
	2.12 - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	20%	18%	20%	20%	20%	20%						
	2.13 - Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	50%	50%	50%	50%	50%	50%						
	2.14 - Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	98%	94%	98%	98%	98%	98%						
	2.16 - Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	98%	96%	98%	98%	98%	98%						
	2.17 - Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	99%	99%	99%	99%	99%	99%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT KERJA PELAKSANA
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	05. Terselenggaranya Layanan peradilan Bagi Kelompok Rentan di Lingkungan Peradilan Umum yang Mudah dan Terjangkau												Kepaniteraan
	05.1 – Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan umum	-	-	-	-	-	-						
	05.2 – Persentase perkara siding di luar gedung di lingkungan peradilan umum	-	-	-	-	-	-						
	08. Terselenggaranya Dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum yang optimal												Kepaniteraan
	08.1 – Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan umum												
	08.2 – Indeks kepuasan masyarakat atas layanan di lingkungan peradilan umum	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								7.716	7.786	73.081	19.224	19.724	
	02. Terlaksananya Dukungan Manajemen di Lingkungan Peradilan Umum yang Prima dan Optimal												Kesekretariatan
	2.1 - Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	81	79	80	81	82	83						
	2.2 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327).	96	87	96	96	97	97						
	2.3 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328).	96	87	96	96	97	97						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT KERJA PELAKSANA
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2.4 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327).	97	97	97	97	98	98						
	2.5 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328).	85	85	85	85	85	85						
	2.6 - Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3,3	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3						
KEGIATAN 1049 - PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM								162					Kepaniteraan
	1049.01 – Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Peradilan Umum Sesuai Ketentuan Yang berlaku												
	1049.01.2 – Jumlah perkara di lingkungan peradilan umum di tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu		4.802	4.850	4.900	4.950	5.000						
	1049.02 – Terlaksananya Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum												
	1049.02.2 – Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum		135	140	145	150	155						
	1049.02.4 – Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum		4.841	4.850	4.900	4.950	5.000						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT KERJA PELAKSANA
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1049.02.5 – Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman petikan/ pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum		88	90	95	100	100						
	1049.02.6 – Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum		60	65	70	75	75						
	1049.02.7 – Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum		558	600	650	700	700						
	1049.02.8 – Jumlah pelaksanaan penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata di lingkungan peradilan umum		2	5	5	5	5						
	1049.02.9 – Jumlah pelaksanaan koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum		3	50	50	50	50						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT KERJA PELAKSANA
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1049.02.10 – Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi di lingkungan peradilan umum		7	10	10	10	10						
	1049.02.11 – Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi		1	2	2	2	2						
	1049.02.12 – Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata menggunakan e-court		188	190	195	200	210						
	1049.02.13 – Jumlah pelaksanaan koordinasi layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara eletronik (e-Berpadu)		432	450	460	470	480						
	1049.02.14 – Jumlah pelaksanaan koordinasi layanan perkara pidana yang diajukan secara eletronik (e-Berpadu)		1.150	1.200	1.250	1.300	1.350						
	1049.03 – Terselenggaranya Kemudahan Akses Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Umum												
	1049.03.1 – Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan umum		-	-	-	-	-						
	1049.03.2 – Jumlah perkara yang diselesaikan melalui siding di luar gedung di lingkungan peradilan umum		-	-	-	-	-						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT KERJA PELAKSANA
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1049.04 – Terselenggaranya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan												
	1049.04.1 – Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan umum		70	72	150	150	150						
KEGIATAN 1071 - PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG								1.002	35	56.357	2.500	3.000	Kesekretariatan
	1071.01 – Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan												
	1071.01.1 – Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana pengadilan		3,1	3,2	3,3	3,4	3,5						
KEGIATAN 6986 - DUKUNGAN MANAJEMEN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA								6.714	7.751	16.724	16.724	16.724	Kesekretariatan
	6986.01 – Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial, dan Aset												
	6986.01.1 – Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	81	79	80	81	82	83						
	6986.01.2 – Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327).	96	87	96	96	97	97						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT KERJA PELAKSANA
		JANGKA MENENGAH	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	6986.01.3 – Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328).	96	87	96	96	97	97						
	6986.01.4 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327).	97	97	97	97	98	98						
	6986.01.5 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328).	85	85	85	85	85	85						
	6986.01.6 – Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3,3	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3						

LAMPIRAN VI

RENCANA KINERJA
TAHUN 2025



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Nomor : 1036/KPN.W4-U5/SK.RA1.9/XI/2025

**TENTANG
REVISI KE-2 (DUA)
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. Bahwa telah ditetapkan Indiktor Kinerja Utama Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029 sesuai Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Nomor 1035/KPN.W4-U5/SK.RA1.3/XI/2025 tanggal 6 November 2025;
2. Bahwa untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2025;
3. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tingkat pertama; dan
4. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Revisi Ke-2 (Dua) Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029; dan
15. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG REVISI KE-2 (DUA) RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2025. |
| Pertama | : | Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk tahun 2025. |
| Kedua | : | Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 memuat rencana target kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2025 sesuai Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025-2029. |

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 7 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

MAULIA MARTWENTY INE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

REVISI KE-2 (DUA)
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA
A. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	80%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	75%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	93%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	28%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2,6%
		1.8. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18%
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	50%
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	94%
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	96%
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA
	2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9
B. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327)	87
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328)	87
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	97
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	85
		3.6. Nilai Indikator Peggelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

MAULIA MARTWENTY INE



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Nomor : 182/KPN.W4-U5/SK.RA1.9/II/2025

**TENTANG
REVISI KE-1 (SATU)
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. Bahwa telah ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Nomor 181/KPN.W4-U5/SK.RA1.3/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Penetapan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA 2025-2029;
2. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tingkat pertama;
3. Bahwa untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2025; dan
4. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Revisi ke-1 (satu) Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; dan
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG REVISI KE-1 (SATU) RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2025.
- Pertama : Revisi Ke-1 (satu) Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk tahun 2025.
- Kedua : Revisi Ke-1 (satu) Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Tahun 2025 memuat rencana target kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama sesuai Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang akan dicapai pada tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 10 Februari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

REVISI KE-1 (SATU)
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	95%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	97%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	30%
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	4%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	95%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	40%

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,





PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Nomor : 79 /KPN.W4-U5/SK.RA1.9/I/2024

**TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tingkat pertama;
2. Bahwa untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2025; dan
3. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2025.
- Pertama : Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk tahun 2025.
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Tahun 2025 memuat rencana target kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama sesuai Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang akan dicapai pada tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai

Pada Tanggal : 29 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	92% 5% 92% 94% 50% 87%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	100% 5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	- - 90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	20%

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



LAMPIRAN VII

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

**REVISI KE-3 (TIGA)
PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025**

Nomor : 1037/KPN.W4-U5/RA1.10/XI/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.**
NIP : 19760321 199903 2 002
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.**
NIP : 19610402 198203 2003
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

DIAH SULASTRI DEWI



Dumai, 7 November 2025

Pihak Pertama,

MAULIA MARTWENTY INE

REVISI KE-3 (TIGA)
PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025

1. KINERJA

TUJUAN	SASARAN STTRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA
A. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	80%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	75%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	93%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	28%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	2,6%
		1.8. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18%
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	94%
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	96%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%
	2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9
B. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.01.400327)	87
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 005.03.400328)	87
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	97
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	85
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2

2. KEGIATAN DAN ANGGARAN

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT/KOMPONEN			ANGGARAN
005.01.400327 PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA			7.716.310.000
WA	Program Dukungan Manajemen		7.716.310.000
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		1.001.543.000
	<i>EBB</i>	<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>	<i>1.001.543.000</i>
	951	Layanan Sarana Internal	654.789.000
	051	Pengadaan Kendaraan Bermotor	399.289.000
	053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	255.500.000
	971	Layanan Prasarana Internal	346.754.000
	051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	346.754.000
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama		6.714.467.000
	<i>EBA</i>	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	<i>6.681.052.000</i>
	962	Layanan Umum	700.000
	051	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	700.000

PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT/KOMPONEN		ANGGARAN
994	Layanan Perkantoran	6.713.767.000
001	Gaji dan Tunjangan	4.943.750.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.770.017.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	300.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000
052	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000
005.03.400328 PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA		161.645.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	161.645.000
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	161.645.000
AEA	Koordinasi	1.500.000
001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	1.500.000
052	Dukungan Penyelesaian Perkara	1.500.000
BCA	Perkara Hukum Perseorangan	124.145.000
U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	124.145.000
051	Pendaftaran Berkas Perkara	90.335.000
052	Penetapan Hari Sidang	660.000
053	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	300.000
054	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	15.120.000
055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa	30.000
056	Minutasi/Upaya Hukum	11.730.000
057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	3.090.000
058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	2.880.000
QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	36.000.000
032	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	36.000.000
051	Pos Bantuan Hukum	36.000.000



Ketua Pengadilan Tinggi Riau,

DIAH SULASTRI DEWI

Dumai, 7 November 2025

Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA,



MAULIA MARTWENTY INE



REVISI KE-2 (DUA)
PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025

Nomor : 835/KPN.W4-U5/RA1.10/X/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.**
NIP : 19760321 199903 2 002
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.**
NIP : 19610402 198203 2003
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

DIAH SULASTRI DEWI



Dumai, 17 Oktober 2025

Pihak Pertama,

MAULIA MARTWENTY INE

Lampiran
 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025
 Nomor : 835/KPN.W4-U5/RA1.10/X/2025
 Tanggal : 17 Oktober 2025

**REVISI KE-2 (DUA)
 PERJANJIAN KINERJA
 PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
 TAHUN 2025**

1. KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	92% 5% 92% 93% 30% 95%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	99% 3%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	- - 95%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%

2. KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET
1.	Program Dukungan Manajemen (WA) Rp. 8.292.260.000,-	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) Rp. 1.001.543.000,-	1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (EBB) Rp. 1.001.543.000,-	1. Layanan Sarana Internal (951) Rp. 654.789.000,-	1. Pengadaan Kendaraan Bermotor (051) Rp. 399.289.000,-	80%
				2. Layanan Prasarana Internal (971) Rp. 346.754.000,-	2. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (053) Rp. 255.500.000,-	80%
		2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (6986) Rp. 7.290.717.000,-	1. Layanan Dukungan Manajemen Internal (EBA) Rp. 7.290.417.000,-	1. Layanan Umum (962) Rp. 700.000,-	1. Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan (051) Rp. 346.754.000,-	99%
				2. Layanan Perkantoran (994) Rp. 7.289.717.000,-	1. Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan (051) Rp. 700.000,-	100%
			2. Layanan Manajemen Kinerja Internal (EBD) Rp. 300.000,-	1. Gaji dan Tunjangan (001) Rp. 5.530.214.000,-	2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002) Rp. 1.59.543.000,-	99%
				1. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (953) Rp. 300.000,-	2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002) Rp. 1.59.543.000,-	95%
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 158.025.000,-	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049) Rp. 158.025.000,-	1. Koordinasi (AEA) Rp. 750.000,-	1. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (953) Rp. 300.000,-	1. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (051) Rp. 300.000,-	100%
			2. Perkara Hukum Perseorangan (BCA) Rp. 121.75.000,-	1. Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum (001) Rp. 750.000,-	1. Dukungan Penyelesaian Perkara (052) Rp. 750.000,-	100%
				1. Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat (U03) Rp. 121.275.000,-	1. Pendaftaran Berkas Perkara (051) Rp. 90.335.000,-	99%
					2. Penetapan Hari Sidang (052) Rp. 660.000,-	100%



**REVISI KE-1 (SATU)
PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025**

Nomor : **425** /KPN.W4-U5/RA1.10/VI/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.**
NIP : 19760321 199903 2 002
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.**
NIP : 19610402 198203 2003
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DIAH SULASTRI DEWI

Dumai, 12 Juni 2025
Pihak Pertama,

MAULIA MARTWENTY INE

**REVISI KE-1 (SATU)
PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025**

1. KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95% 5% 95% 97% 30% 90%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	100% 3%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	- - 95%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	40%

2. KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET
1.	Program Dukungan Manajemen (WA) Rp. 7.682.895.000,-	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) Rp. 1.001.543.000,-	1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (EBB) Rp. 1.001.543.000,-	1. Layanan Sarana Internal (951) Rp. 654.789.000,-	1. Pengadaan Kendaraan Bermotor (051) Rp. 399.289.000,-	100%
					2. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (053) Rp. 255.500.000,-	100%
		2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (6986) Rp. 6.681.352.000,-	1. Layanan Dukungan Manajemen Internal (EBA) Rp. 6.681.052.000,-	2. Layanan Prasarana Internal (971) Rp. 346.754.000,-	1. Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan (051) Rp. 346.754.000,-	100%
				1. Layanan Umum (962) Rp. 700.000,-	1. Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan (051) Rp. 700.000,-	100%
			2. Layanan Manajemen Kinerja Internal (EBD)	2. Layanan Perkantoran (994) Rp. 6.680.352.000,-	1. Gaji dan Tunjangan (001) Rp. 4.676.644.000,-	100%
					2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002) Rp. 2.003.708.000,-	100%
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 211.915.000,-	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049) Rp. 211.915.000,-	1. Koordinasi (AEA) Rp. 1.500.000,-	1. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (953) Rp. 300.000,-	1. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (051) Rp. 300.000,-	100%
				1. Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum (001) Rp. 1.500.000,-	1. Dukungan Penyelesaian Perkara (052) Rp. 1.500.000,-	100%

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET
			3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (QBA) Rp. 36.000.000,-	1. Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum (032) Rp. 36.000.000,-	1. Pos Bantuan Hukum (051) Rp. 36.000.000,-	100%


Ketua Pengadilan Tinggi Riau,

DIAH SULASTRI DEWI

Dumai, 12 Juni 2025
Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA,


MAULIA MARTWENTY-INE



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nomor : 9 /KPN.W4-U5/RA1.10/I/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EFENDI, S.H.**
NIP : 19681026 199603 1 001
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.

Nama : **Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.**
NIP : 19590602 198512 1 001
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SISWANDRIYONO

Dumai, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,

EFENDI

**PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025**

1. KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95% 5% 95% 97% 30% 90%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	100% 3%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	- - 95%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	40%

2. KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET
1.	Program Dukungan Manajemen (WA) Rp. 7.682.895.000,-	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) Rp. 1.001.543.000,-	1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (EBB) Rp. 1.001.543.000,-	1. Layanan Sarana Internal (951) Rp. 654.789.000,-	1. Pengadaan Kendaraan Bermotor (051) Rp. 399.289.000,-	100%
					2. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (053) Rp. 255.500.000,-	100%
		2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (6986) Rp. 6.681.352.000,-	1. Layanan Dukungan Manajemen Internal (EBA) Rp. 6.681.052.000,-	2. Layanan Prasarana Internal (971) Rp. 346.754.000,-	1. Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan (051) Rp. 346.754.000,-	100%
				1. Layanan Umum (962) Rp. 700.000,-	1. Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan (051) Rp. 700.000,-	100%
				2. Layanan Perkantoran (994) Rp. 6.680.352.000,-	1. Gaji dan Tunjangan (001) Rp. 4.676.644.000,- 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002) Rp. 2.003.708.000,-	100% 100%
			2. Layanan Manajemen Kinerja Internal (EBD)	1. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (953) Rp. 300.000,-	1. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (051) Rp. 300.000,-	100%
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 211.915.000,-	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049) Rp. 211.915.000,-	1. Koordinasi (AEA) Rp. 1.500.000,-	1. Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum (001) Rp. 1.500.000,-	1. Dukungan Penyelesaian Perkara (052) Rp. 1.500.000,-	100%

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET
			3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (QBA) Rp. 36.000.000,-	1. Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum (032) Rp. 36.000.000,-	1. Pos Bantuan Hukum (051) Rp. 36.000.000,-	100%


 Ketua Pengadilan Tinggi Riau,

SISWANDRIYONO

Dumai, 2 Januari 2025
 Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA,


EFENDI

LAMPIRAN VIII

PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2025

**LAPORAN PENGUKURAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025**

PERIODE PENGUKURAN CAPAIAN

: TRIWULAN IV

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET NILAI KINERJA	ATRIBUT PENILAIAN INDIKATOR KINERJA	KINERJA PARSIAL (TRIWULAN IV)			KINERJA KUMULATIF (S.D. PERIODE PARSIAL)		
					REALISASI		CAPAIAN	REALISASI		CAPAIAN
					VOLUME	NILAI		VOLUME	NILAI	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	421	97,68%	99,67%	4.895	99,03%	101,05%
				Perdata	49			170		
				Pidana	372			4.725		
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	Jumlah perkara yang diselesaikan	431		101,01%	4.943	99,96%	100,97%
				Perdata	59			213		
				Pidana	372			4.730		
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	80%	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu	431	100,00%	101,97%	4.941		100,41%
				Perdata	59			211		
				Pidana	372			4.730		
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	75%	Jumlah perkara yang diputus	431		114,29%	4.943	76,74%	102,33%
				Perdata	59			213		
				Pidana	372			4.730		
		1.5. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	80%	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	31	81,58%	111,83%	98	96,05%	103,28%
				Perdata	7			32		
				Pidana	24			66		
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	28%	Jumlah petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	38		0,00%	122	28,57%	102,04%
				Perdata	10			36		
				Pidana	28			86		
		1.7. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	93%	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	24	85,71%	111,83%	66		102,33%
				Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	28			86		
				Jumlah putusan yang diunggah pada direktori	208	104,00%		656	96,05%	
		1.8. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	28%	Perdata	58		0,00%	195		102,04%
				Pidana	150			461		
				Jumlah putusan yang telah diminutasi	200			683		
		1.9. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	28%	Perdata	59		0,00%	213		102,04%
				Pidana	141			470		
				Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	0	0,00%		2	28,57%	
				Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	1			7		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET NILAI KINERJA	ATRIBUT PENILAIAN INDIKATOR KINERJA	KINERJA PARSIAL (TRIWULAN IV)			KINERJA KUMULATIF (S.D. PERIODE PARSIAL)		
					REALISASI		CAPAIAN	REALISASI		CAPAIAN
					VOLUME	NILAI		VOLUME	NILAI	
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3%	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3	13,64%	524,48%	3	2,68%	103,02%
				Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	22			112		
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18%	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4	30,77%	170,94%	7	18,92%	105,11%
				Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	13			37		
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	0			0		
				Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	0			0		
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	94%	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court	63	100,00%	106,38%	223	94,89%	100,95%
				Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan	63			235		
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	96%	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	114	96,61%	100,64%	454	97,42%	101,48%
				Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	118			466		
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	295	100,00%	101,01%	1.160	100,00%	101,01%
				Jumlah layanan perkara pidana	295			1.160		
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	Nilai Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	3,91	3,91	100,28%	3,91	3,91	100,38%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79,00	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	79,81	79,81	101,02%	79,81	79,81	101,02%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	87,00	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	87,75	87,75	100,87%	87,75	87,75	100,87%
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	87,00	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	87,48	87,48	100,56%	87,48	87,48	100,56%
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	97,00	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	100,00	100,00	103,09%	100,00	100,00	103,09%
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85,00	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	85,00	85,00	100,00%	85,00	85,00	100,00%
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,20	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3,25	3,25	101,56%	3,25	3,25	101,56%

Dumai, 8 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

MAULIA MARTWENTY INE

**LAPORAN PENGUKURAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025**

PERIODE PENGUKURAN CAPAIAN

: TRIWULAN III

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET NILAI KINERJA	ATRIBUT PENILAIAN INDIKATOR KINERJA	KINERJA PARSIAL (TRIWULAN III)			KINERJA KUMULATIF (S.D. PERIODE PARSIAL)		
					REALISASI		CAPAIAN	REALISASI		CAPAIAN
					VOLUME	NILAI		VOLUME	NILAI	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	1.514	99,08%	101,11%	4.474	99,16%	101,18%
				Perdata	62			127		
				Pidana	1.452			4.353		
				Jumlah perkara yang diselesaikan	1.528			4.512		
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	Perdata	76		100,95%	154		100,97%
				Pidana	1.452			4.358		
				Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu	1.527	99,93%		4.510	99,96%	
				Perdata	75			152		
				Pidana	1.452			4.358		
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	80%	Jumlah perkara yang diputus	1.528		107,14%	4.512		99,70%
				Perdata	76			154		
				Pidana	1.452			4.358		
				Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	24	85,71%		67	79,76%	
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	75%	Perdata	8		100,00%	25		96,55%
				Pidana	16			42		
				Jumlah petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	28			84		
				Perdata	8			26		
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	93%	Pidana	20		92,38%	58		99,74%
				Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	15	75,00%		42	72,41%	
				Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	20			58		
				Jumlah putusan yang diunggah pada direktori	183	85,92%		448	92,75%	
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	28%	Perdata	64		178,57%	137		119,05%
				Pidana	119			311		
				Jumlah putusan yang telah diminutasi	213			483		
				Perdata	76			154		
				Pidana	137			329		
				Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	2	50,00%		2	33,33%	
				Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	4			6		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET NILAI KINERJA	ATRIBUT PENILAIAN INDIKATOR KINERJA	KINERJA PARSIAL (TRIWULAN III)			KINERJA KUMULATIF (S.D. PERIODE PARSIAL)		
					REALISASI		CAPAIAN	REALISASI		CAPAIAN
					VOLUME	NILAI		VOLUME	NILAI	
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3%	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
				Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	33			90		
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18%	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3	33,33%	185,19%	3	12,50%	69,44%
				Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	9			24		
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	0			0		
				Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	0			0		
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	94%	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court	68	100,00%	106,38%	160	93,02%	98,96%
				Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan	68			172		
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	96%	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	130	97,74%	101,82%	340	97,70%	101,77%
				Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	133			348		
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	292	100,00%	101,01%	865	100,00%	101,01%
				Jumlah layanan perkara pidana	292			865		
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	Nilai Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	3,91	3,91	100,18%	3,92	3,92	100,41%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79,00	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	87,00	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	87,00	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	97,00	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85,00	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,20	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dumai, 13 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

MAULIA MARTWENTY INE

**LAPORAN PENGUKURAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025**

PERIODE PENGUKURAN CAPAIAN

: TRIWULAN II

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET NILAI KINERJA	ATRIBUT PENILAIAN INDIKATOR KINERJA	KINERJA PARSIAL (TRIWULAN II)			KINERJA KUMULATIF (S.D. PERIODE PARSIAL)		
					REALISASI		CAPAIAN	REALISASI		CAPAIAN
					VOLUME	NILAI		VOLUME	NILAI	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	1.615	99,32%	101,35%	2.960	99,20%	101,22%
				Perdata	23			59		
				Pidana	1.592			2.901		
				Jumlah perkara yang diselesaikan	1.626			2.984		
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	Perdata	34		101,01%	77		100,98%
				Pidana	1.592			2.906		
				Jumlah perkara yang diputus	1.626			2.984		
				Perdata	34			78		
				Pidana	1.592			2.906		
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	80%	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	21	77,78%	97,22%	43	76,79%	95,98%
				Perdata	8			17		
				Pidana	13			26		
				Jumlah petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	27			56		
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	75%	Perdata	8		91,23%	18		94,74%
				Pidana	19			38		
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	93%	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	13	68,42%	103,39%	27	71,05%	105,54%
				Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	19			38		
				Jumlah putusan yang diunggah pada direktori	125	96,15%		265	98,15%	
				Perdata	29			73		
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	28%	Pidana	96		0,00%	192		0,00%
				Jumlah putusan yang telah diminutasi	130			270		
				Perdata	34			78		
				Pidana	96			192		
				Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
				Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	1			2		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET NILAI KINERJA	ATRIBUT PENILAIAN INDIKATOR KINERJA	KINERJA PARSIAL (TRIWULAN II)			KINERJA KUMULATIF (S.D. PERIODE PARSIAL)		
					REALISASI		CAPAIAN	REALISASI		CAPAIAN
					VOLUME	NILAI		VOLUME	NILAI	
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3%	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
				Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	27			57		
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18%	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
				Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	9			15		
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	0			0		
				Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	0			0		
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	94%	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court	35	74,47%	79,22%	92	88,46%	94,11%
				Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan	47			104		
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	96%	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	116	99,15%	103,28%	210	97,67%	101,74%
				Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	117			215		
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	275	100,00%	101,01%	573	100,00%	101,01%
				Jumlah layanan perkara pidana	275			573		
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	Nilai Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	3,89	3,89	99,86%	3,92	3,92	100,53%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79,00	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	87,00	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	87,00	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	97,00	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85,00	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,20	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dumai, 13 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

MAULIA MANTWENTY INE

**LAPORAN PENGUKURAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS 1A
TAHUN 2025**

PERIODE PENGUKURAN CAPAIAN

: TRIWULAN I

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET NILAI KINERJA	ATRIBUT PENILAIAN INDIKATOR KINERJA	KINERJA PARSIAL (TRIWULAN I)			KINERJA KUMULATIF (S.D. PERIODE PARSIAL)		
					REALISASI		CAPAIAN	REALISASI		CAPAIAN
					VOLUME	NILAI		VOLUME	NILAI	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	1.345	99,04%	101,06%	1.345	99,04%	101,06%
				Perdata	36			36		
				Pidana	1.309			1.309		
				Jumlah perkara yang diselesaikan	1.358			1.358		
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99%	Perdata	44		100,94%	44		100,94%
				Pidana	1.314			1.314		
				Jumlah perkara yang diputus	1.358			1.358		
				Perdata	44			44		
				Pidana	1.314			1.314		
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	80%	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	22	75,86%	94,83%	22	75,86%	94,83%
				Perdata	9			9		
				Pidana	13			13		
				Jumlah petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	29			29		
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	75%	Perdata	10		98,25%	10		98,25%
				Pidana	19			19		
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	93%	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	14	73,68%	107,53%	14	73,68%	107,53%
				Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	19			19		
				Jumlah putusan yang diunggah pada direktori	140	100,00%		140	100,00%	
				Perdata	44			44		
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	28%	Pidana	96		0,00%	96		0,00%
				Jumlah putusan yang telah diminutasi	140			140		
				Perdata	44			44		
				Pidana	96			96		
				Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
				Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	1			1		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET NILAI KINERJA	ATRIBUT PENILAIAN INDIKATOR KINERJA	KINERJA PARSIAL (TRIWULAN I)			KINERJA KUMULATIF (S.D. PERIODE PARSIAL)		
					REALISASI		CAPAIAN	REALISASI		CAPAIAN
					VOLUME	NILAI		VOLUME	NILAI	
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3%	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
				Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	30			30		
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18%	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
				Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	6			6		
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	0			0		
				Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	0			0		
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	94%	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court	57	100,00%	106,38%	57	100,00%	106,38%
				Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan	57			57		
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	96%	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	94	95,92%	99,91%	94	95,92%	99,91%
				Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	98			98		
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99%	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	298	100,00%	101,01%	298	100,00%	101,01%
				Jumlah layanan perkara pidana	298			298		
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	Nilai Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	3,95	3,95	101,20%	3,95	3,95	101,20%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79,00	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	87,00	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	87,00	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	97,00	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.01.400327)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85,00	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 005.03.400328)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,20	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dumai, 13 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

MAUDA MARTWENTY INE

LAPORAN PENGUKURAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS 1A
TAHUN 2025

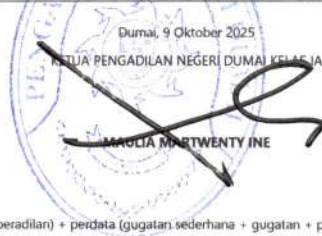
PERIODE PENGUKURAN CAPAIAN : TRIWULAN III

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ATRIBUT PENILAIAN INDIKATOR KINERJA	KINERJA PARSIAL (TRIWULAN III)			KINERJA KUMULATIF (SAMPAI DENGAN PERIODE PARSIAL)		
					REALISASI		CAPAIAN	REALISASI		CAPAIAN
					VOLUME	PERSENTASE (%)		VOLUME	PERSENTASE (%)	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	199	93,43%	98,34%	445	92,13%	96,98%
				Jumlah perkara yang diselesaikan	213			483		
		2 Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif	0			0		
				Perkara yang diajukan untuk restoratif	0			0		
		3 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	194	91,08%	95,87%	445	92,13%	96,98%
				Jumlah perkara yang diselesaikan	213			483		
		4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	97%	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	204	95,77%	98,74%	448	92,75%	95,62%
				Jumlah perkara khusus yang diselesaikan	213			483		
		5 Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	30%	Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil	0			0		
				Jumlah perkara diversi	0			0		
		6 Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	Nilai rata-rata	3,91	97,68%	108,53%	11,75	97,90%	108,78%
				Skala nilai	4			12		
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1 Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	Jumlah salinan putusan yang di munitasi dan dikirim tepat waktu	212	99,53%	99,53%	481	99,59%	99,59%
				Jumlah putusan keseluruhan yang dimunitasi/dikirim	213			483		
		2 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
				Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	9			24		
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan		Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	0			0		
				Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo	0			0		
		2 Perentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan		Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0			0		
				Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan	0			0		
		3 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	95%	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	12	100,00%	105,26%	69	100,00%	105,26%
				Jumlah permohonan layanan hukum	12			69		
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%	Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan	4	100,00%	2,5	6	100,00%	250,00%
				Jumlah permohonan eksekusi	4			6		

PENJELASAN CAPAIAN KINERJA :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 93,43% dari target sebesar 95%, sehingga tercapai sebesar 98,34%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A menyelesaikan 199 perkara pada triwulan ini dan sebanyak 213 perkara dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Namun terdapat 14 perkara yang tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu dengan kendala yang dihadapi sebagai berikut : 1. Perkara pidana sebanyak 0 perkara dan dapat diselesaikan dengan baik secara tepat waktu. 2. Perkara perdata sebanyak 14 perkara, yang diantaranya disebabkan oleh ketidakhadiran pihak atau saksi sesuai jadwal persidangan yang telah ditentukan dan permintaan penundaan sidang yang lebih dari 1 (satu) minggu dari para pihak kepada majelis hakim.
		2 Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Indikator kinerja sasaran strategis ini tidak terealisasi. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya perkara narkotika yang diajukan untuk diselesaikan menggunakan pendekatan Restorative Justice pada triwulan ini.
		3 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 91,08% dari target sebesar 95%, sehingga tercapai sebesar 95,87%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A menyelesaikan 213 perkara pada triwulan ini. Sebanyak 194 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding dan sisanya 19 perkara mengajukan upaya hukum banding yang disebabkan oleh ketidakpuasan pihak terhadap putusan sehingga menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya terhadap perkara.
		4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 95,77% dari target sebesar 97%, sehingga tercapai sebesar 98,74%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A menyelesaikan 213 perkara pada triwulan ini. Sebanyak 204 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan sisanya 9 perkara mengajukan upaya hukum kasasi yang disebabkan oleh ketidakpuasan pihak terhadap putusan sehingga menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya terhadap perkara.
		5 Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Indikator kinerja sasaran strategis ini tidak terealisasi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perkara pidana anak yang diajukan untuk diselesaikan secara diversi pada triwulan ini.
		6 Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 97,68% dari target sebesar 90%, sehingga tercapai sebesar 108,53%. Sebanyak 97,68% para penerima layanan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A pada triwulan ini dan 2,32% merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A pada triwulan ini. Hal ini disebabkan oleh kualitas penerapan SOP pelayanan yang diberikan oleh aparaturnya kepada masyarakat belum terlaksana secara optimal. Tindakan perbaikan akan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan pelayanan prima kepada aparaturnya terutama terhadap unsur-unsur layanan dimaksud.
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1 Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 99,53% dari target sebesar 100%, sehingga tercapai sebesar 99,53%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A menyelesaikan 213 perkara pada triwulan ini. Sebanyak 212 (tjuh ratus lima belas) putusan perkara telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dan sisanya 1 salinan putusan tidak dapat disampaikan ke para pihak tepat waktu yang disebabkan oleh buruknya kualitas pelayanan aparaturnya Pengadilan kepada para pihak

		2 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 0% dari target sebesar 3%, sehingga tercapai sebesar 0%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A menerima 9 perkara perdata yang diajukan untuk diselesaikan secara mediasi pada triwulan ini, namun tidak ada perkara yang berhasil diselesaikan secara mediasi. Hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya kesepakatan antar pihak dalam proses mediasi, sehingga perkara dilanjutkan ke persidangan.
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Indikator kinerja sasaran strategis ini tidak termasuk dalam target capaian kinerja.
		2 Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Indikator kinerja sasaran strategis ini tidak termasuk dalam target capaian kinerja.
		3 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (pcsbakum)	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 100% dari target sebesar 95%, sehingga tercapai sebesar 105,26%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A menerima 12 orang pencari keadilan golongan tertentu melalui pelayanan bantuan hukum pada triwulan ini. Seluruh para pencari keadilan golongan tertentu telah dilayani dengan baik sesuai oleh permohonan layanan bantuan hukum yang diajukan tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Hal ini didukung oleh sosialisasi layanan bantuan hukum yang telah terlaksana dan berjalan dengan baik.
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 100% dari target sebesar 40%, sehingga tercapai sebesar 250%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A menerima 4 permohonan eksekusi terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) pada triwulan ini. Seluruh permohonan eksekusi telah ditindaklanjuti dengan baik. Hal tersebut didukung oleh koordinasi yang baik dengan semua pihak yang terkait dan yang terlibat.



Catatan :

- 1 Penentuan target capaian direncanakan, dilakukan, dan disesuaikan berdasarkan IKU yang telah ditetapkan
- 2 Target volume perkara yang diselesaikan : perkara pidana (anak + biasa + singkat + cepat + lalu lintas + praperadilan) + perdata (gugatan sederhana + gugatan + perlawanan + permohonan + konsinyasi) yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
- 3 Target volume putusan keadilan restoratif : perkara pidana narkotika (anak + biasa) yang diputus dengan pendekatan restoratif melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi
- 4 Target volume perkara upaya hukum banding : perkara pidana (anak + biasa + singkat + cepat + lalu lintas) + perdata (gugatan + perlawanan) yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- 5 Target volume perkara upaya hukum kasasi : perkara pidana (diputus bebas murni) + perdata (permohonan) + sengketa pemilu + niaga + PHI yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- 6 Target volume perkara diversi : perkara pidana anak yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil
- 7 Target volume index kepuasan pencari keadilan : orang/pengguna layanan pengadilan yang merasa puas dengan pelayanan pengadilan (harus >=80%)
- 8 Target volume salinan putusan : salinan putusan perkara pidana (anak + biasa + singkat + cepat + lalu lintas + praperadilan) + perdata (gugatan sederhana + gugatan + perlawanan + permohonan + konsinyasi) yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu
- 9 Target volume perkara mediasi : perkara perdata gugatan yang dimediasi dan dinyatakan berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian/putusan perdamaian pada tahun berjalan
- 10 Target volume pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum : pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum
- 11 Target volume eksekusi : permohonan eksekusi terhadap putusan perkara perdata yang diajukan dan ditindaklanjuti pada tahun berjalan dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang, dan pengosongan, serta juga termasuk penetapan non executable

LAPORAN PENGUKURAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2025

PERIODE PENGUKURAN CAPAIAN

TRIWULAN II

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ATRIBUT PENILAIAN INDIKATOR KINERJA	KINERJA PARSIAL (TRIWULAN II)			KINERJA KUMULATIF (SAMPAI DENGAN PERIODE PARSIAL)		
					REALISASI		CAPAIAN	REALISASI		CAPAIAN
					VOLUME	PERSENTASE (%)		VOLUME	PERSENTASE (%)	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	1.626	100,00%	105,26%	2.985	100,00%	105,26%
				Jumlah perkara yang diselesaikan	1.626			2.985		
		2 Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif	0			0		
				Perkara yang diajukan untuk restoratif	0			0		
		3 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	1.620	99,63%		2.965	99,33%	
				Jumlah perkara yang diselesaikan	1.626			2.985		
		4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	97%	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	1.617	99,45%		2.959	99,13%	
				Jumlah perkara yang diselesaikan	1.626			2.985		
		5 Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	30%	Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil	0			0		
				Jumlah perkara diversi	0			0		
		6 Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	Nilai rata-rata	3,89	97,35%		7,84	98,01%	
				Skala nilai	4			8		
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1 Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	Jumlah salinan putusan yang di munitasi dan dikirim tepat waktu	1.626	100,00%	100,00%	2.985	100,00%	100,00%
				Jumlah putusan keseluruhan yang dimunitasi/dikirim	1.626			2.985		
		2 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil	0	0,00%		0	0,00%	
				Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	13			21		
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan		Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	0		105,26%	0		105,26%
				Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo	0			0		
		2 Perentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan		Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0			0		
				Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan	0			0		
		3 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	95%	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	26	100,00%		57	100,00%	
				Jumlah permohonan layanan hukum	26			57		
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%	Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
				Jumlah permohonan eksekusi	1			2		

PENJELASAN CAPAIAN KINERJA :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 100% dari target sebesar 95%, sehingga tercapai sebesar 105,26%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menyelesaikan 1626 perkara pada triwulan ini dan sebanyak 1626 perkara dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasas Perkara. Hal tersebut didukung oleh kualitas penyelesaian perkara yang baik oleh majelis hakim.
		2 Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Indikator kinerja sasaran strategis ini tidak terealisasi. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya perkara narkotika yang diajukan untuk diselesaikan menggunakan pendekatan Restorative Justice pada triwulan ini.
		3 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 99,63% dari target sebesar 95%, sehingga tercapai sebesar 104,87%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA meyelesaikan 1626 perkara pada triwulan ini. Sebanyak 1620 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding dan sisanya 6 perkara mengajukan upaya hukum banding yang disebabkan oleh ketidakpuasan pihak terhadap putusan sehingga menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya terhadap perkara.
		4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 99,45% dari target sebesar 97%, sehingga tercapai sebesar 102,52%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA meyelesaikan 1626 perkara pada triwulan ini. Sebanyak 1617 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan sisanya 9 perkara mengajukan upaya hukum kasasi yang disebabkan oleh ketidakpuasan pihak terhadap putusan sehingga menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya terhadap perkara.
		5 Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Indikator kinerja sasaran strategis ini tidak terealisasi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perkara pidana anak yang diajukan untuk diselesaikan secara diversi pada triwulan ini.
		6 Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 97,35% dari target sebesar 90%, sehingga tercapai sebesar 108,17%. Sebanyak 97,35% para penerima layanan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada triwulan ini dan 2,65% merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada triwulan ini. Hal ini disebabkan oleh kualitas penerapan SOP pelayanan yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat belum terlaksana secara optimal. Tindakan perbaikan akan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan pelayanan prima kepada aparatur terutama terhadap unsur-unsur layanan dimaksud.
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1 Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 100% dari target sebesar 100%, sehingga tercapai sebesar 100%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menyelesaikan 1626 perkara pada triwulan ini. Semua salinan putusan perkara telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Hal tersebut didukung oleh penerapan SOP yang baik oleh aparatur Pengadilan.
		2 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 0% dari target sebesar 3,03%, sehingga tercapai sebesar 0%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menerima 13 perkara perdata yang diajukan untuk diselesaikan secara mediasi pada triwulan ini, namun tidak ada perkara yang berhasil diselesaikan secara mediasi. Hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya kesepakatan antar pihak dalam proses mediasi, sehingga perkara dilanjutkan ke persidangan.

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Indikator kinerja sasaran strategis ini tidak termasuk dalam target capaian kinerja.
		2 Perentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Indikator kinerja sasaran strategis ini tidak termasuk dalam target capaian kinerja.
		3 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 100% dari target sebesar 95%, sehingga tercapai sebesar 105,26%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menerima 26 orang pencari keadilan golongan tertentu melalui pelayanan bantuan hukum pada triwulan ini. Seluruh para pencari keadilan golongan tertentu telah dilayani dengan baik sesuai oleh permohonan layanan bantuan hukum yang diajukan tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Hal ini didukung oleh sosialisasi layanan bantuan hukum yang telah terlaksana dan berjalan dengan baik.
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 0% dari target sebesar 40%, sehingga tercapai sebesar 0%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menerima 1 permohonan eksekusi terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) pada triwulan ini, namun tidak ada permohonan eksekusi yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini disebabkan oleh permohonan eksekusi tersebut masih dalam tahap penelaahan.

Dumai, 7 Juli 2025
HUKUM PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

MAULIA MARTWENTY INE

Catatan :

- 1 Penentuan target capaian dilakukan, direncanakan, dan disesuaikan berdasarkan IKU yang telah ditetapkan
- 2 Target volume perkara yang diselesaikan : perkara pidana (anak + biasa + singkat + cepat + lalu lintas + praperadilan) + perdata (gugatan sederhana + gugatan + perlawanan + permohonan + konsinyasi) yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
- 3 Target volume putusan keadilan restoratif : perkara pidana (anak + biasa) narkoba yang diputus dengan pendekatan restoratif melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi
- 4 Target volume perkara upaya hukum banding : perkara pidana (anak + biasa + singkat + cepat + lalu lintas + praperadilan) + perdata (gugatan sederhana + gugatan + perlawanan + permohonan + konsinyasi) yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- 5 Target volume perkara upaya hukum kasasi : perkara pidana (anak + biasa + singkat + cepat + lalu lintas + praperadilan) + perdata (gugatan sederhana + gugatan + perlawanan + permohonan + konsinyasi) yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- 6 Target volume perkara diversi : perkara pidana anak yang diajukan diversi terselesaikan melalui diversi
- 7 Target volume index kepuasan pencari keadilan : orang/pengguna layanan pengadilan yang merasa puas dengan pelayanan pengadilan (harus >=80%)
- 8 Target volume salinan putusan : salinan putusan perkara pidana (anak + biasa + singkat + cepat + lalu lintas + praperadilan) + perdata (gugatan sederhana + gugatan + perlawanan + permohonan + konsinyasi) yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu
- 9 Target volume perkara mediasi : perkara perdata gugatan yang masuk daftar pada tahun berjalan yang dilakukan mediasi
- 10 Target volume pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum : pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum
- 11 Target volume eksekusi : permohonan eksekusi yang diajukan dan ditindaklanjuti pada tahun berjalan dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang, dan pengosongan, serta juga termasuk penetapan non executable

LAPORAN PENGUKURAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS 1A
TAHUN 2025

PERIODE PENGUKURAN CAPAIAN

TRIWULAN I

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ATRIBUT PENILAIAN INDIKATOR KINERJA	KINERJA PARSIAL (TRIWULAN I)			KINERJA KUMULATIF (SAMPAI DENGAN PERIODE PARSIAL)		
					REALISASI		CAPAIAN	REALISASI		CAPAIAN
					VOLUME	PERSENTASE (%)		VOLUME	PERSENTASE (%)	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	1.358	100,00%	105,26%	1.358	100,00%	105,26%
				Jumlah perkara yang diselesaikan	1.358			1.358		
		2 Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif	0			0		
				Perkara yang diajukan untuk restoratif	0			0		
		3 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	1.344	98,97%	104,18%	1.344	98,97%	104,18%
				Jumlah perkara yang diselesaikan	1.358			1.358		
		4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	97%	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	1.341	98,75%	101,80%	1.341	98,75%	101,80%
				Jumlah perkara yang diselesaikan	1.358			1.358		
		5 Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	30%	Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil	0			0		
				Jumlah perkara diversi	0			0		
		6 Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	Nilai rata-rata	3,95	98,67%	109,63%	3,95	98,67%	109,63%
				Skala nilai	4			4		
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1 Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	Jumlah salinan putusan yang di munitasi dan dikirim tepat waktu	1.358	100,00%	100,00%	1.358	100,00%	100,00%
				Jumlah putusan keseluruhan yang dimunitasi/dikirim	1.358			1.358		
		2 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
				Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	8			8		
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan		Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	0			0		
				Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo	0			0		
		2 Perentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan		Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0			0		
				Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan	0			0		
		3 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	95%	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	31	100,00%	105,26%	31	100,00%	105,26%
				Jumlah permohonan layanan hukum	31			31		
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%	Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
				Jumlah permohonan eksekusi	1			1		

PENJELASAN CAPAIAN KINERJA :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN ATAS CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 100% dari target sebesar 95%, sehingga tercapai sebesar 105,26%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A menyelesaikan 1358 perkara pada triwulan ini dan sebanyak 1358 perkara dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Hal tersebut didukung oleh kualitas penyelesaian perkara yang baik oleh majelis hakim.
		2 Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Indikator kinerja sasaran strategis ini tidak terealisasi. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya perkara narkoba yang diajukan untuk diselesaikan menggunakan pendekatan Restorative Justice pada triwulan ini.
		3 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 98,97% dari target sebesar 95%, sehingga tercapai sebesar 104,18%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A menyelesaikan 1358 perkara pada triwulan ini. Sebanyak 1344 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding dan sisanya 14 perkara mengajukan upaya hukum banding yang disebabkan oleh ketidakpuasan pihak terhadap putusan sehingga menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya terhadap perkara.
		4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 98,75% dari target sebesar 97%, sehingga tercapai sebesar 101,8%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A menyelesaikan 1358 perkara pada triwulan ini. Sebanyak 1341 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan sisanya 17 perkara mengajukan upaya hukum kasasi yang disebabkan oleh ketidakpuasan pihak terhadap putusan sehingga menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya terhadap perkara.
		5 Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Indikator kinerja sasaran strategis ini tidak terealisasi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perkara pidana anak yang diajukan untuk diselesaikan secara diversi pada triwulan ini.
		6 Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 98,67% dari target sebesar 90%, sehingga tercapai sebesar 109,63%. Sebanyak 98,67% para penemu layanan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A pada triwulan ini dan 1,33% merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A pada triwulan ini. Hal ini disebabkan oleh kualitas penerapan SOP pelayanan yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat belum terlaksana secara optimal. Tindakan perbaikan akan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan pelayanan prima kepada aparatur terutama terhadap unsur-unsur layanan dimaksud.
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1 Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 100% dari target sebesar 100%, sehingga tercapai sebesar 100%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A menyelesaikan 1358 perkara pada triwulan ini. Semua salinan putusan perkara telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Hal tersebut didukung oleh penerapan SOP yang baik oleh aparatur Pengadilan.
		2 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 0% dari target sebesar 3,03%, sehingga tercapai sebesar 0%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A menerima 8 perkara perdata yang diajukan untuk diselesaikan secara mediasi pada triwulan ini, namun tidak ada perkara yang berhasil diselesaikan secara mediasi. Hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya kesepakatan antar pihak dalam proses mediasi, sehingga perkara dilanjutkan ke persidangan.

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Indikator kinerja sasaran strategis ini tidak termasuk dalam target capaian kinerja.
		2 Perentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Indikator kinerja sasaran strategis ini tidak termasuk dalam target capaian kinerja.
		3 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 100% dari target sebesar 95%, sehingga tercapai sebesar 105,26%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A menerima 31 orang pencari keadilan golongan tertentu melalui pelayanan bantuan hukum pada triwulan ini. Seluruh para pencari keadilan golongan tertentu telah dilayani dengan baik sesuai oleh permohonan layanan bantuan hukum yang diajukan tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Hal ini didukung oleh sosialisasi layanan bantuan hukum yang telah terlaksana dan berjalan dengan baik.
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Indikator kinerja sasaran strategis ini terealisasi 0% dari target sebesar 40%, sehingga tercapai sebesar 0%. Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A menerima 1 permohonan eksekusi terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) pada triwulan ini, namun tidak ada permohonan eksekusi yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini disebabkan oleh permohonan eksekusi tersebut masih dalam tahap penyelesaian.



Catatan :

- 1 Penentuan target capaian dilakukan, direncanakan, dan disesuaikan berdasarkan IKU yang telah ditetapkan
- 2 Target volume perkara yang diselesaikan : perkara pidana (anak + biasa + singkat + cepat + lalu lintas + praperadilan) + perdata (gugatan sederhana + gugatan + perlawanan + permohonan + konsinyasi) yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
- 3 Target volume putusan keadilan restoratif : perkara pidana (anak + biasa) narkoba yang diputus dengan pendekatan restoratif melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi
- 4 Target volume perkara upaya hukum banding : perkara pidana (anak + biasa + singkat + cepat + lalu lintas + praperadilan) + perdata (gugatan sederhana + gugatan + perlawanan + permohonan + konsinyasi) yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- 5 Target volume perkara upaya hukum kasasi : perkara pidana (anak + biasa + singkat + cepat + lalu lintas + praperadilan) + perdata (gugatan sederhana + gugatan + perlawanan + permohonan + konsinyasi) yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- 6 Target volume perkara diversi : perkara pidana anak yang diajukan diversi terselesaikan melalui diversi
- 7 Target volume index kepuasan pencari keadilan : orang/pengguna layanan pengadilan yang merasa puas dengan pelayanan pengadilan (harus >=80%)
- 8 Target volume salinan putusan : salinan putusan perkara pidana (anak + biasa + singkat + cepat + lalu lintas + praperadilan) + perdata (gugatan sederhana + gugatan + perlawanan + permohonan + konsinyasi) yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu
- 9 Target volume perkara mediasi : perkara perdata gugatan yang masuk daftar pada tahun berjalan yang dilakukan mediasi
- 10 Target volume pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum : pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum
- 11 Target volume eksekusi : permohonan eksekusi yang diajukan dan ditindaklanjuti pada tahun berjalan dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang, dan pengosongan, serta juga termasuk penetapan non executable